

**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL MASA  
REVOLUSI HIJAU (1970-1974)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta untuk  
Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan



**Oleh:**  
**II RUBI KANDAR**  
**10406244012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **“KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL MASA REVOLUSI HIJAU (1970-1974)”** ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 05 Juni 2014

Pembimbing,

ZULKARNAIN, M. Pd.

NIP. 19740809 200812 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunungkidul Masa Revolusi Hijau (1970-1974)” telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi tanggal 24 Juni 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Terry Irenewaty, M. Hum	Ketua Penguji		30/6/2014
Zulkarnain, M. Pd	Sekretaris		30/6/2014
Dr. Aman, M. Pd	Penguji Utama		30/6/2014

Yogyakarta, 1 Juli 2014

Dekan FIS

Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.

NIP. 19620321 198903 1 001

## **PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : II RUBI KANDAR

NIM : 10406244012

Jurusan : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul : Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunungkidul Masa Revolusi Hijau  
(1970-1974).

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai sumber data untuk referensi. Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 05 Juni 2014

Yang menyatakan,

II RUBI KANDAR

NIM. 10406244012

## MOTTO

*Allah tidak akan mengubah keadaan umat sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Akan tetapi jika Allah berkehendak akan menimpakan suatu siksa atas suatu kaum maka tidak ada yang dapat menolak siksa itu. Dan tidak ada bagi mereka seorangpun pelindung selain dari Allah S.W.T. (QS. Ar - Ra'du : 11)*

*Siwa yang kuat, menderita tanpa mengeluh. Siwa yang lemah, mengeluh tanpa menderita.*

*Bukan hasil akhir tapi proses menuju hasil akhir itu yang terpenting, maka janganlah takut gagal sebelum mencoba karena kegagalan adalah pengalaman yang sangat berharga untuk usaha selanjutnya.*

## PERSEMBAHAN

*Kepada Allah SWT terima kasih atas rahmat, karunia, cinta kasih-Nya.....*

*Untuk Bapak, Ibu, Adik-adik saya (Maya, Fudi dan April) dan Ucu Lisa serta keluarga terima kasih atas segala perhatian, kesabaran, bimbingan dan do'anya.....*

*Untuk teman-teman mahasiswa/i Pendidikan Sejarah angkatan 2010 FOS UNY, teman-teman dari Kab. Ketapang KAL-BAR yang kuliah di Jogja dan teman-teman Kos terima kasih kepada kalian semua yang susah dan senang berjuang bersama untuk mendapatkan setetes ilmu.....*

*Untuk adik-adik tingkatan Pendidikan Sejarah FOS UNY dan Khalayak Umum yang berminat membaca karya sederhana ini.....*

## **ABSTRAK**

### **KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL MASA REVOLUSI HIJAU (1970-1974)**

Oleh :  
II RUBI KANDAR  
NIM. 10406244012

Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul sebelum pelaksanaan Revolusi Hijau. Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul. Ketiga untuk mengetahui dampak sosial ekonomi pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan. pertama, penentuan topik, kedua pengumpulan sumber (heuristik) baik sumber primer maupun sekunder. Ketiga, kritik sumber (verifikasi), yaitu kritik ekstern maupun intern terhadap sumber yang diperoleh. keempat penafsiran (interpretasi) fakta sejarah yang ditemukan. kelima penulisan (historiografi) penjelasan sejarah secara kronologis.

Hasil penelitian ini, kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul dapat dilihat dari penggunaan tanah oleh petani yaitu tanah pekarangan, tanah tegalan dan tanah lereng bukit. Revolusi Hijau di satu pihak telah berhasil meningkatkan produksi beras tetapi dipihak lain telah menimbulkan pembagian keuntungan yang tidak merata dan dampak-dampak sosial ekonomi pada masyarakat pedesaan yang timbulnya gejala stratifikasi sosial. Kesejahteraan petani miskin dan buruh tani tak bertanah tetap mandek atau bisa diperbaiki pada tingkat yang sangat lambat. Kondisi sosial ekonomi petani diperburuk oleh beberapa faktor. Pertama, tanah menjadi bagian-bagian kecil yang ditimbulkan oleh hak waris tanah jawa yang cenderung untuk meningkatkan pemusatan kepemilikan tanah di tangan tuan tanah. Kedua, faktor yang berjalan seiring dengan proses di atas adalah meningkatnya pengangguran di daerah pedesaan yang mengakibatkan tekanan ekonomi luar biasa dan kemelaratan di desa. Ketiga, proses monetisasi melalui proses-proses modernisasi teknologi yang mengakibatkan petani terjerumus kedalam pusaran hutang. Keempat, semua jenis usaha pembangunan mengakibatkan polarisasi di desa-desa yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.

**Kata Kunci:** kondisi sosial ekonomi, gunungkidul, revolusi hijau, 1970-1974

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi dengan judul “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunungkidul Masa Revolusi Hijau (1970-1974)” disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan, untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Rohmat Wahab, M.Pd. M.A., rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bapak M. Rokhman, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah.
4. Bapak Zulkarnain, M.Pd., Panasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan nasehat, saran dan dorongan yang sangat besar manfaatnya bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu, Ucu Lisa dan adik-adik saya Maya, Yudi, April yang telah memberikan cinta, perhatian, bimbingan dan do'anya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Semua teman-teman Mahasiswa/i di Program Pendidikan Sejarah angkatan 2010. Terima kasih atas dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua sahabat dari Kab. Ketapang, Kal-Bar yang kuliah di Yogyakarta Dewi, Wahyu, Indra, Teras, Bang Deni, Yogi, Nurul, Jaka dan Sri terima kasih telah berbagi suka, duka dan rasa keluarganya.
8. Temen-temen kos Arif MIPA, Arif FBS, Jon, Farihin, Ipung, Alfa, Heri dan semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman yang di Kab. Ketapang (Kal-Bar) Gusti, Meddy, Bambang, Eko, Yoga, Sugeng dan semua teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulis dan penyusun skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala masukan dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 05 Juni 2014

Penulis,

II RUBI KANDAR

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Histriografi yang Relevan .....	9
G. Metodologi Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB II KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL</b>	
<b>SEBELUM PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU .....</b>	<b>21</b>
A. Kondisi Geografi .....	21
B. Struktur Administrasi Pemerintahan .....	26
C. Kondisi Sosial Ekonomi .....	27
 <b>BAB III PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU PADA MASYARAKAT</b>	
<b>GUNUNGKIDUL .....</b>	<b>36</b>
A. Kebijakan Pemerintah Pusat .....	36
B. Revolusi Hijau di Gunungkidul .....	42
C. Produksi Pertanian di Gunungkidul .....	48
 <b>BAB IV DAMPAK SOSIAL EKONOMI PELAKSANAAN REVOLUSI</b>	
<b>HIJAU PADA MASYARAKAT GUNUNGKIDUL .....</b>	<b>56</b>
A. Sitem Kepemilikan dan Peguasaan Tanah di Gunungkidul .....	56
B. Kemiskinan .....	67
C. Dampak Sosial Ekonomi .....	71
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## **DAFTAR SINGKATAN**

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Bimas	: Bimbingan Massa
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BT	: Bujur Timur
BULOG	: Badan Urusan Logistik
D.I.Y	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Inmas	: Intensifikasi Massa
LS	: Lintas Selatan
OPPA	: Organisasi Petani Pemakai Air
PB	: Peta Baru
Pelita	: Pembangunan Lima Tahun
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
SD	: Sekolah Dasar
Wilud	: Wilayah Unit Desa

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Peta Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
2. Sketsa Ketinggian Tanah di Kabupaten TK. II Gunungkidul.
3. Curah Hujan dari tahun 1955-1973.
4. Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Per Kecamatan Tahun 1961, 1971 dan 1980.
5. Rata-rata Banyaknya Penduduk dan Rumah Tangga Per Desa Diperinci Per Kecamatan 1961, 1971, 1980 Kabupaten : Gunungkidul.
6. Luas Geografi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1973.
7. Perkembangan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 1964 S/D 1973.
8. Harga Produksi Pertanian di Daerah Istimewa Jogjakarta Per Pertengahan Bulan Tahun 1969.
9. Surat Menteri Pertanian Kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia, Prihal: Pemberitaan Usaha-usaha Pembangunan. Djakarta, 26 Mei 1971.
10. Surat Bupati Daerah tingkat II Kab. Gunungkidul Kepada Kepala P.N. Pertanian Kesatuan Pemasaran D.I.U d/a Djl. A.M. Sangadji 19 di Yogyakarta, Prihal: Penyediaan Pupuk UREA untuk M.H. 1971/ 1972. Wonosari, 11 Oktober 1971.

11. Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada Camat se-Kab. Gunungkidul dan Kepala Dinas Pertanian Kab. Gunungkidul, Prihal: Usaha-usaha Menanggulangi Paceklik Th. 1973-1974. Wonosari, 1 Januari 1973.
12. Surat Bupati Kepala daerah Gunungkidul Kepada Kepala Biro otonomi dan Desentralisasi daerah Istimewa Yogyakarta, Prihal: Pemanfaatan Pompa Pantai Baron. Wonosari, 28 November 1974.
13. Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah D.I.Y di Yogyakarta, Prihal: Data-data Daerah Secara Rutin Kekurangan Pangan secara Serius dan Rencana Untuk Mengatasinya. Wonosari, 31 Januari 1973.
14. Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Prihal: Penyediaan Gudang Paceklik. Wonosari, 12 februari 1973.
15. Keadaan Tanah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 1973.
16. Surat Kepala Harian Kepada Ketua Badan Pembina Bimas D.I.Y di Yogyakarta, Prihal: Kekurangan Pupuk. Wonosari, 22 Desember 1973.
17. Surat Inspektur/Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada S.P. wakil kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Prihal: Dropping Pupuk ke Gunungkidul. Yogyakarta, 16 Februari 1974.
18. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata produksi Tanaman Bahan Makanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1974 – 1979.
19. Struktur Penguasaan Tanah di Kabupaten Gunungkidul dan Struktur Pemilikan Tanah di Kabupaten Gunungkidul.

20. Surat Kepala Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Prihal: Daerah-daerah Yang Secara Rutin setiap Tahun Kekurangan Bahan Makanan. Yogyakarta, 10 Februari 1973.
21. Penderita Honggeer Oedeem (HO) di Kabupaten Gunungkidul Tahun. 1972-1978.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada permulaan tahun 1970-an pemerintah Indonesia meluncurkan suatu program pembangunan pertanian yang dikenal secara luas dengan program Revolusi Hijau yang di masyarakat petani dikenal dengan program Bimas.<sup>1</sup> Konsep Revolusi Hijau yang di Indonesia dikenal sebagai gerakan Bimas adalah program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Peningkatan produksi beras padi merupakan program yang mendapat prioritas tertinggi pada Pelita I (dengan harapan dicapainya swasembada pada akhir pelita I), maka dibentuklah organisasi Bimas tingkat nasional sampai ketingkat kecamatan.<sup>2</sup> Tujuan tersebut dilatarbelakangi mitos bahwa beras adalah komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik dan sosial.

Bimas yang merupakan singkatan dari Bimbing Massal, dalam pengertian resmi dan aslinya merupakan suatu sistem Penyuluhan yaitu pembimbingan petani ke arah usaha tani yang lebih baik dan lebih maju, sehingga ia mampu meningkatkan usaha taninya. Bimas berintikan tiga komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi yang sering disebut Panca Usaha Tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi serta

---

<sup>1</sup> Loekman Soetrisno, *Pertanian Pada abad ke 21*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm 13.

<sup>2</sup> Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 135.

adanya dukungan kredit dan pertanian modern. Tujuan utama dari program tersebut adalah menaikkan produktivitas sektor pertanian, khususnya sub-sektor pertanian pangan, melalui penerapan paket teknologi pertanian modern.

Revolusi Hijau telah berhasil dalam penyebaran teknologi yang cocok dan cepat meningkatkan produktivitas padi pada sistem-sistem pertanian dataran rendah beririgasi.<sup>3</sup> Di kawasan ini pemerintah membangun berbagai prasarana guna menunjang program swasembada pangan. Akibatnya adalah muncul kesenjangan antara kawasan dataran rendah dengan kawasan dataran tinggi. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan dataran tinggi membawa akibat pula pada kelestarian dari infrastruktur penunjang Revolusi Hijau.

Revolusi Hijau atau program Bimas meskipun memakan waktu yang relatif lama kurang lebih 20 tahun, telah berhasil mengubah sikap para petani, khususnya para petani sub sektor pangan, dari “anti” teknologi ke sikap yang mau memanfaatkan teknologi pertanian modern, seperti pupuk kimia, obat-obatan pelindung, dan bibit padi unggul.<sup>4</sup> Revolusi Hijau sebagaimana telah umum diketahui di Indonesia tidak mampu mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berswasembada pangan secara tetap, tetapi hanya mampu dalam waktu lima tahun, yakni antara tahun 1984-1989. Disamping itu,

---

<sup>3</sup> Ruf Francois and Frederic lancon,” From Slash and Burn to Replanting: Green Revolution in the Indonesia Uplands”,a.b. Yoddang, *Dari Sistem Tebang Bakar ke Peremajaan Kembali: Revolusi Hijau di Dataran Tinggi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 4.

<sup>4</sup> Loekman Soetrisno, *op. cit.*, hlm. 13-14.

Revolusi Hijau juga telah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial pedesaan karena ternyata Revolusi Hijau hanyalah menguntungkan petani yang memiliki tanah lebih dari setengah hektar, dan petani kaya di pedesaan, serta penyelenggara negara di tingkat pedesaan.

Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu bagian antara kelima Daerah Tingkat II di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak dahulu daerah ini sudah dikenal sebagai daerah miskin. Kemiskinan yang terjadi di daerah ini dikarenakan oleh bentang alam yang berbukit-bukit, penuh dengan batu kapur, serta miskin sumber mata air. Keadaan ini sering disebut dengan kemiskinan alamiah. Menurut Rudolf S. Sinaga dan Benjamin White, kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat sumber langka jumlahnya atau karena tingkat perkembangan teknologi rendah.<sup>5</sup>

Sebagian besar petani Gunungkidul mengusahakan tanah tegalan yang hanya mengandalkan air hujan. Sedikit sekali areal tanah pertanian yang bisa diusahakan dengan pengairan tetap. Daerah yang masih dapat diusahakan dengan pengairan adalah Pojong, Ngawen, Nglipar, Karang Mojo dan Patuk. Kelima daerah tersebut terletak di Zona Utara dan *Zone ledok Wonosari* (Zona Tengah) yang relatif daerah tersebut tidak mengalami kesulitan air bersih termasuk pada musim kemarau. Hal ini berbeda dengan daerah yang berada di Zona Selatan atau bisa dikenal dengan Zona Pegunungan Seribu atau *Zuider Gebergton*. Wilayah zona ini mempunyai ketinggian 100-300 meter di atas permukaan laut. Daerah di Zona Selatan ini keberadaan air

---

<sup>5</sup> Dalam Bambang Tri Cahyo, *Masalah Petani Gurem*. Yogyakarta: Liberty, 1983, hlm. 2.

sangat sulit. Akan tetapi masyarakat Gunung Kidul yang tinggal di Zona Selatan sebagian besar (mayoritas) bekerja sebagai petani. Mereka tetap mengolah tanah yang berbukit-bukit itu dengan keterbatasan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pelaksanaan Revolusi Hijau di Gunungkidul terdapat perbedaan di bandingkan daerah lain, di daerah ini pembangunan pertanian dihadapkan pada persoalan mengatasi tanah kritis. Pada awal pembangunan muncul persoalan yang rumit manghadang, antara mendahulukan pembangunan pertanian tanaman pangan yang mengutamakan peningkatan produksi tanaman pangan, berarti mangundang erosi atau mendahulukan pencegahan erosi berarti mengundang kelaparan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah Gunungkidul sejak tahun 1969 telah berupaya menggerakan semua potensi sosial guna menunjang keberhasilan pembangunan di bidang pertanian. Untuk itu digunakan pupuk buatan serta obat-obatan pemberantas hama serta mulai juga menggunakan teknologi pertanian baru. Sebagai upaya penanggulangan erosi di tanam pohon Akasia.

Alasan-alasan diatas merupakan pangkal tolak dan pendorong dari studi ini untuk merekontruksi dan mendeskripsikan kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Gunungkidul masa Revolusi Hijau (1970-1974) dalam perkembangan Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini diharapkan pula berguna memperkaya referensi tentang kajian sejarah sosial ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Gunungkidul masa Revolusi Hijau.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan, maka rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunungkidul sebelum Pelaksanaan Revolusi Hijau?
2. Bagaimana pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul?
3. Bagaimana dampak Sosial Ekonomi pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum
  - a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir logis, kritis, sistematis, analitis, dan objektif sesuai dengan metodologi yang digunakan agar dapat memaknai nilai yang terkandung dalam setiap peristiwa.
  - b. Melatih kemampuan dalam rangka penerapan metode sejarah dalam suatu permasalahan sejarah yang dihadapi atau diteliti.
  - c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah.
2. Tujuan khusus
  - a. Untuk mengetahui kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunungkidul sebelum Pelaksanaan Revolusi Hijau.
  - b. Untuk mengetahui pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul.

- c. Untuk mengetahui dampak Sosial Ekonomi pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

- a. Menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan perkembangan Kabupaten Gunungkidul pada masa Revolusi Hijau.
- b. Melatih penulis untuk berfikir kritis dan objektif.
- c. Dapat memberikan sumbangan berupa karya tulis sejarah yang diharapkan berguna bagi perkembangan penulisan sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta.
- d. Hasil dari penulisan ini diharapkan bisa menjadi acuan tentang penulisan berikutnya.
- e. Menjadi kenang-kenangan hidup guna diwariskan kepada anak cucu kelak.

##### **2. Bagi Pembaca**

- a. Diharapkan setelah membaca skripsi ini pembaca mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul pada masa Revolusi Hijau (1970-1974).
- b. Setelah membaca skripsi ini diharapkan penulisan mengenai sejarah sosial-ekonomi akan semakin meningkat, karena masih banyak sejarah sosial ekonomi yang belum diangkat.

- c. Memperluas pengetahuan tentang perkembangan Kabupaten Gunungkidul pada masa Revolusi Hijau.

## E. Kajian Pustaka

Penulisan sejarah perlu mengetahui juga konsep-konsep tentang permasalahan yang akan dikaji. Salah satunya melalui sumber-sumber pustaka atau yang sering disebut kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau teori yang menjadi landasan pemikiran.<sup>6</sup> Pustaka-pustaka digunakan untuk menelaah setiap pertanyaan dalam rumusan masalah dalam garis besar.

Rumusan masalah pertama mengkaji tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul sebelum pelaksanaan Revolusi Hijau. Karya Fajar Pratikto yang Merupakan hasil penelitiannya untuk *Skripsi SI* yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul *Gerakan Rakyat Kelaparan. Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Tulisan Fajar lebih menekankan pada bidang politik yang terjadi pada dekade 1960-an di Gunungkidul tanpa mengesampingkan keadaan sosial ekonomi yang ada. Karya ini sangat membantu dalam memahami kondisi Gunungkidul pada dekade tersebut dan keadaan masyarakat pada umumnya di Gunungkidul pada saat menghadapi masa sulit.

---

<sup>6</sup> Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penelisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2006, hlm. 3.

Rumusan masalah kedua mengkaji tentang pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul. Tulisan Mubyarto menjelaskan bagaimana perkembangan pertanian di Indonesia dari masa ke masa yang sangat dipengaruhi kebijakan pemerintahan, munculnya kesenjangan antara kawasan dataran rendah dengan kawasan dataran tinggi atau kawasan non padi dan pemerintah juga menyediakan prasarana kredit serta prasarana penunjang lain seperti rehabilitasi pembangunan prasarana irigasi. Dalam karya ini memberikan penjelasan secara umum pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan pelaksanaan Revolusi Hijau khususnya pada Daerah Kabupaten Gunungkidul apakah ada perbedaan pada daerah lainnya.

Rumusan masalah ketiga mengkaji tentang dampak sosial ekonomi pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul. Tulisan Selo Soemardjan dalam bentuk sebuah buku berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Dalam tulisannya Selo Soemardjan menjelaskan bagaimana Perubahan Sosial di Yogyakarta dari jaman Penjajahan Kolonial Belanda sampai Kemerdekaan, Inovasi di Bidang Pertanian Rakyat, Petani dan lingkungannya, pembangunan pertanian juga menimbulkan akibat-akibat negatif, antara lain berupa timbulnya gejala pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian serta tergesernya petani penyangkap menjadi petani buruh upahan. Karya ini memberikan penjelasan bagaimana Perubahan Sosial di Yogyakarta. Namun, dalam karyanya ini banyak mengungkapkan daerah Yogyakarta secara umum dan sedikit menyinggung daerah

Gunungkidul. Tapi karya ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk melihat gambaran dan hubungan masyarakat khususnya di daerah Yogyakarta. Sedangkan tulisan ini mencoba melihat pengaruh Revolusi Hijau dan pembangunan pertanian di daerah Gunungkidul.

#### **F. Historiografi yang Relevan**

Historiografi adalah sebuah rekonstruksi sejarah melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa lampau.<sup>7</sup> Suatu penulisan sejarah membutuhkan sumber-sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Historiografi dapat berupa buku, disertasi, tesis atau skripsi yang kevalidan data yang terkandung dapat dipertanggung jawabkan, dan didalam historiografi yang relevan ini merupakan suatu proses perbandingan dan pengumpulan hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Hal ini berguna untuk mempelajari celah-celah yang belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya dan juga untuk menghindari suatu tindakan plagiat dan juga sebagai bahan acuan didalam memulai penulisan maupun pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian skripsi ini peneliti menggunakan Skripsi yang ditulis oleh Rina Widiastuti, *Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul (1969-1990-AN)*, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, FIB UGM, 2011. Dalam skripsi ini mendeskripsikan dan menrekontruksikan keadaan

---

<sup>7</sup> Louis Gottscalk, *Mengerti Sejarah*. (Penerjemah Nugraho Notosusanto), cet. IV. Jakarta: UI-Press, 1985, hlm. 94.

masyarakat desa Kepek, Dinamika Desa, kepadatan penduduk dan pembangunan sarana prasarana menjadi kajian topik yang penting. Penelitian Rina Widiastuti di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul di bagian Selatan, sedangkan penulis teliti adalah keadaan keseluruhan Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi hasil Penelitian ini sangat membantu penulis memahami masyarakat desa, khususnya di daerah lahan kering bagian Selatan di Gunungkidul.

Skripsi hasil penelitian Machmoed Effendhi berjudul, *Peluang Kerja dan Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa di Daerah Kering: Kasus Gunungkidul 1969-1983*, Laporan Penelitian, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, 1993. Skripsi ini memberi gambaran proses perubahan kehidupan sosial ekonomi penduduk pedesaan di daerah lahan kering. Dalam skripsi ini pengaruh politik masa lalu, tingkat kesuburan tanah, kepadatan penduduk dan pengaruh hubungan desa-kota yang semakin terbuka menjadi topik yang penting. Penelitian Machmoed Effendhi di desa Semin terletak di bagian Utara Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penulis teliti adalah keadaan keseluruhan Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi hasil dari penelitian ini sangat membantu untuk memahami masyarakat desa, khususnya di daerah lahan kering bagian Utara di Kabupaten Gunungkidul.

Skripsi hasil penelitian Nur Aini Setiawati yang berjudul *Kemiskinan di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Periode 1970-1995*, Laporan Penelitian Fakultas Sastra UGM, 1996. Skripsi ini memberikan gambaran proses kemiskinan penduduk pedesaan di lahan kering. Dalam skripsi ini

kemiskinan dan kehidupan sosial ekonomi di Kecamatan Rongkop serta kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Rongkop menjadi topik yang menarik untuk kebutuhan penelitian yang saya teliti. Penelitian Nur Aini Setiawati di Kecamatan Rongkop di bagian selatan Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penulis teliti adalah keadaan keseluruhan Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi hasil dari penelitian ini sangat membantu untuk memahami masyarakat desa, khususnya di daerah lahan kering bagian Selatan di Kabupaten Daerah Gunungkidul.

## **G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode sejarah kritis untuk merekonstruksi sebuah peristiwa atau rekaman sejarah. Seperti yang dituliskan dalam buku “Mengerti Sejarah” oleh Louis Gottscalk yang sudah diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto, bahwa metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu.<sup>8</sup> Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan lima tahap metode sejarah kritis seperti yaang disampaikan oleh Kuntowijoyo yaitu,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.<sup>9</sup>

Untuk uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan hal utama yang digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya skripsi. Menurut Kuntowijoyo, ada dua hal yang harus terpenuhi dalam pemilihan topik yakni, kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>10</sup> Apalagi kedekatan emosional memang diperlukan pada tahap ini guna memperlancar proses penelitian. Dia tidak terpengaruhi oleh siapapun, atau hal apapun, jadi memang atas dasar kehendaknya sendiri, pilihannya sendiri.<sup>11</sup>

b. Heuristik (Pengumpulan Data)

Sumber sejarah disebut juga data sejarah; bahasa Inggris datum bentuk tunggal, data bentuk jamak; bahasa latin datum berarti pemberian. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang ditulis. Sumber sejarah menurut bahannya dibagi dua, yaitu: tertulis dan tidak tertulis. Menurut penyampaiannya juga dibagi dua, yaitu: sumber primer dan sekunder.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (cet. IV). Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001, hlm. 89.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>11</sup> Louis Gottscalk, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>12</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 94-95.

### 1) Sumber Primer

Sumber primer disebut pula dengan sumber pertama ataupun sumber asli, yaitu evidensi (bukti) yang kontemporer (sezaman) dengan suatu peristiwa yang terjadi.<sup>13</sup> Sumber primer di dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dokumen, misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan pemerintah atau organisasi massa.

- a) Sumber Arsip Surat Menteri Pertanian no. 193/mentan/V/1971 kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia, Prihal: Pemberitaan Usaha-usaha Pembangunan (Djakarta, 26 Mei 1971).
- b) Sumber Arsip Kepala Daerah Gunungkidul no. Eko/ 634/ II/ e/ 6968/ 71 kepada P.N. Pertani kesatuan Pemasaran D.I.U, Prihal: meyediakan Pupuk UREA untuk M.H. 1971/1972 (Wonosari, 11 Oktober 1971).
- c) Sumber Arsip Surat kepala Daerah DIY No. K. 346/IV/B/Kwt/73 kepada menteri dalam Negeri, Prihal: tentang laporan Daerah-daerah yang secara rutin setiap tahun kekurangan bahan makanan di Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, dan Kab. Sleman (Yogyakarta, 10 februari 1973).

---

<sup>13</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 107.

- d) Sumber Arsip Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul NO. Eko/ 141/ IV/ d/ 779/ 73/ Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY, Prihal: tentang data-data daerah yang secara rutin Kekurangan Pangan Secara Serius dan Rencana untuk mengatasinya ( Wonosari, 31 Januari 1973).
- e) Sumber Arsip Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Prihal: Penyediaan Gudang Paceklik (Wonosari, 12 februari 1973)
- f) Sumber Arsip Surat Kepala Harian Kepada Ketua Badan Pembina Bimas D.I.Y di Yogyakarta, Prihal: Kekurangan Pupuk. Wonosari (22 Desember 1973)
- g) Sumber Arsip Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada Dinas Pertanian dan Camat se-kab. Gunungkidul, Prihal: Tentang Usaha-usaha Menanggulangi Panceklik Tahun 1973-1974 di Gunungkidul (Wonosari, 1 Januari 1973).
- h) Sumber Arsip Surat Inspektur/Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada S.P. wakil kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Prihal: Dropping Pupuk ke Gunungkidul. Yogyakarta (16 Februari 1974).

- i) Sumber Arsip Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K2733/ I/ A/ 75, Laporan Bupati Kepala Daerah Bantul dan Gunungkidul, Prihal tentang Pemanfaatan sumur pompa (Yogyakarta, 1 juli 1975).

## 2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak berasal pada saat peristiwa terjadi.<sup>14</sup> Sumber sekunder tidak berasal dari kesaksian pandangan langsung atau pandangan pertama melainkan berasal dari kesaksian orang yang tidak hadir dalam peristiwa. Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain:

- a. Mubyarto. 1983. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- b. Koentjaraningrat. 1972. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- c. Tjondronegoro, S.M.P dan G. Wiradi. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Bhatara.

## c. Kritik Sumber

Apabila kita telah menemukan topik, kemudian sumber tersebut juga sudah dikumpulkan. Maka hal selanjutnya yang akan

---

<sup>14</sup> Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2011, hlm. 44.

dilakukan adalah memverifikasi atau kritik sumber. Verifikasi ada dua macam: otentisitas, keabsahan, keaslian, kritik ekstern, dan kedua adalah kredibilitas, kebiasaan atau kritik intern.<sup>15</sup> Kritik sumber amat penting untuk dilakukan guna menyaring barang kali saja ada sumber yang palsu dan menyesatkan. Seperti yang disampaikan oleh Louis Gotschalk bahwa pemalsuan dokumen dalam keseluruhan atau untuk sebagian, meskipun bukan merupakan suatu hal yang biasa cukup sering terjadi sehingga para sejarawan harus benar-benar cermat dan teliti terhadapnya. “Dokumen Sejarah” dipalsu karena beberapa sebab dan diantaranya adalah sebagai pendukung klaim tertentu.<sup>16</sup>

d. Interpretasi atau penafsiran

Sering disebut juga sebagai biang subyektifitas. Sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar dikarenakan, tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa bicara. Sejarawan yang jujur akan mencatumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Interpretasi ada dua macam, yakni: analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 98-99.

<sup>16</sup> Louis Gotschahlk, *op. cit.*, hlm. 95.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 100-101.

#### e. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Aspek yang penting dalam penulisan sejarah adalah aspek kronologi. Karena aspek inilah yang akan membedakan dengan penulisan ilmu-ilmu sosial yang lain.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan yang Digunakan

Penulisan skripsi ini memerlukan pendekatan penelitian. Hal ini bertujuan agar mempermudah pengkajian data-data. Selain itu dengan adanya pendekatan penelitian maka batas-batas kajian penelitian ini dapat terlihat jelas dan diharapkan tidak terdapat kerancuan dalam proses pemikiran. Pendekatan penelitian juga menjelaskan sudut pandang yang digunakan oleh penulis. Peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian ini. Seperti, pendekatan Sosial, Ekonomi, Politik dan Geografi, untuk penjelasannya dibawah ini:

#### a. Pendekatan Sosial

Bila pendekatan ini digunakan dalam penggambaran tentang peristiwa masa lalu maka didalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Pendekatan sosial merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota atau golongan masyarakat terkait dengan ikatan adat, kebiasaan, kehidupan, tingkah laku dan keseniannya.<sup>19</sup> Selain itu

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>19</sup> Hasan Sadly, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 82.

pendekatan sosial juga menyoroti segi-segi sosial peristiwa yang di kaji, umpamanya golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungan dengan orang lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Pendekatan ini akan digunakan untuk melihat keadaan masyarakat Gunungkidul sebelum 1970 sampai 1974.

b. Pendekatan Ekonomi

Perekonomian merupakan hal terpenting dalam mencirikan sebuah perkembangan kota. Pendekatan ekonomi ini diperlukan untuk memperkuat konststruksi sejarah sosial-ekonomi yang akan saya teliti. Perekonomian juga merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat karena merupakan salah satu pintu menuju interkasi sosial dan membentuk pola kehidupan masyarakat yang lebih dinamis. Ekonomi yaitu kajian tentang pilihan, pilihan manusia yang dihadapkan pada tersedianya sumber material yang terbatas dan distribusi untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>21</sup> Pendekatan ekonomi sudah pasti diperlukan untuk mengkaji tentang dampak ekonomi dalam pelaksanaan Revolusi Hijau masyarakat Gunungkidul (1970-1974).

---

<sup>20</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 4.

<sup>21</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 22.

c. Pendekatan Politik

Politik secara umum menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Pendekatan politik merupakan pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan, dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Penulis menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis kebijakan pemerintah Orde Baru masa Revolusi Hijau Khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Karena dengan mengetahui hal tersebut maka akan diketahui dampak Revolusi Hijau pada masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

d. Pendekatan Geografis

Pada pendekatan geografis ini tentu akan diperlukan guna mencirikan atau memetakan masyarakat dalam hal kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama tentunya dan tidak kalah penting adalah perekonomian. Letak Kabupaten Gunungkidul yang unik membuat kawasan ini menarik untuk diteliti pada masa pemerintahan Orde Baru apakah memberi dampak sosial ekonomi kepada masyarakat pada masa Revolusi Hijau.

## H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan seperti, dibawah ini:

---

<sup>22</sup> Suhartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 4.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan diulas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian, pendekatan yang digunakan dan sistematika penelitian.

## **BAB II. KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL SEBELUM PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai kondisi geografis, struktur pemerintahan, keadaan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi.

## **BAB III. PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU PADA MASYARAKAT GUNUNGKIDUL**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai kebijakan pemerintahan pusat, revolusi hijau dan produksi pertanian.

## **BAB. IV DAMPAK SOSIAL EKONOMI PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU PADA MASYARAKAT GUNUNGKIDUL**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai tentang sistem kepemilikan dan penguasaan tanah di Gunungkidul, kemiskinan dan dampak sosial ekonomi.

## **BAB. V KESIMPULAN**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu jawaban dari seluruh rumusan masalah yang telah dipaparkan pada BAB I. Jawaban tersebut diperoleh dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dalam dari BAB II, BAB III dan BAB IV.

## BAB II

### KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL SEBELUM PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU

#### A. Kondisi Geografi

Secara geografis, Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunungkidul terkenal dengan sebutan daerah kritis karena tanahnya yang tandus dan sebagian besar terdiri dari tanah kapur. Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul terletak di bagian Tenggara dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 47%<sup>1</sup> dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan dengan ibukotanya Wonosari. Keadaan alam dikelilingi oleh dataran tinggi dan bergunung-gunung dengan daerah yang dikenal selalu kekurangan air serta rawan kekurangan pangan. Kabupaten Gunungkidul terletak pada 110° 36' BT 7° 58' LS, secara topografis terbagi dalam 3 Zona.<sup>2</sup>

1. Zona Batur Agung atau Bagian Utara dengan ketinggian antara 200-700 meter di atas permukaan laut. Keadaan berbukit-bukit, terdapat sungai diatas tanah, sumber mata air yang dapat digali sumur dengan kedalaman rata-rata 6-12 meter. Jenis tanah zona ini adalah *Vulkanis Laterit*, sedangkan batuan induknya adalah berupa *Dasiet* dan *Anddesiet*. Zona

---

<sup>1</sup> Biro Statistik DIY, *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta: Bagian I*. Yogyakarta, 1973, hlm. 19.

<sup>2</sup> Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan*. Yogyakarta ; Media Presindo, 2000, hlm. 29.

ini meliputi wilayah Patuk, Nglipar, Ngawen, Semin dan Ponjong Utara.<sup>3</sup>

Pada Zona bagian Utara ini tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup dengan baik adalah tanaman keras seperti: Jati, Sonokeling, Akasia, Mahoni, Tanaman buah-buahan, Cengkeh Melinjo serta Padi Gogo dan Palawija.

2. Zona Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150-200 meter di atas permukaan laut yang dikelilingi oleh pegunungan. Keadaannya agak landai dan sedikit bergelombang. Terdapat sungai di atas tanah serta dapat digali dengan kedalaman sekitar 5-25 meter. Apabila terjadi kemarau yang panjang daerah ini tidak akan kekurangan air karena masih ada sumber mata air. Pada Zona ini meliputi wilayah Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong Tengah dan Semanu Selatan.<sup>4</sup> Pada Zone Ledok Wonosari ini tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup dengan baik antara lain Padi Sawah atau Padi Gogo, Palawija, Tembakau, Kapuk Randu, Melinjo, Tebu dan Sayur-sayuran.

3. Zona Pegunungan Seribu atau *Zuider Gebergton* daerah ini ketinggiannya antara 100-300 meter di atas permukaan laut terletak dibagian selatan. Batuan dasarnya, batuan kapur yang membentuk bukit-bukit kapur (*terrerosa*). Batuan ini banyak jumlahnya dengan memanjang dari barat ke timur, bukit-bukit tersebut membentuk tempurung terbalik. Zona ini tidak ada sungai di atas tanah, karena tanahnya *Poreus* hanya di

---

<sup>3</sup> Biro Statistik Kabupaten Gunung Kidul, *Kabupaten Gunung Kidul Tingkat II: Gunung Kidul Dalam Angka Tahun 1980*. Yogyakarta: Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik, hlm. 4.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

sela-sela bukit terdapat genangan air hujan yang membentuk banyak telaga yang merupakan sumber air bagi kebutuhan masyarakat sekitar. Telaga-telaga tersebut menjadi kering bila memasuki musim kemarau panjang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat mencari air dari Zona Tengah atau masuk ke gua-gua yang terdapat sungai bawah tanah. Zona di Daerah Pegunungan Seribu ini, air tanah dalamnya sampai 100 meter atau lebih di bawah permukaan tanah. Ada beberapa daerah yang dapat ditemui adanya sungai di bawah tanah. Air sungai ini kadang-kadang tersembur ke luar tanah kemudian masuk lagi melalui gua atau luweng yang akhirnya bermuara di pantai. Daerah ini meliputi wilayah-wilayah Kecamatan Panggang, Paliyan, Tepus, Rongkop, Semanu Selatan dan Ponjong Selatan.<sup>5</sup>

Keadaan seperti itu menjadikan Kabupaten Gunungkidul di bagian Selatan pada musim kemarau banyak yang mengalami kekurangan air. Masyarakat yang tinggal di daerah Selatan untuk bertahan hidup mereka mencari air di daerah pegunungan dimana banyak terdapat sumber sungai bawah tanah. Dalam keadaan seperti itu penduduknya harus berjalan beberapa kilometer untuk mendapatkan air di musim kemarau. Sungai bawah tanah tersebut tidak kering pada musim kemarau karena debit air sungai bawah tanah relatif stabil. Berbeda dengan kondisi Danau atau Telaga yang terdapat di permukaan yang sering kering pada waktu musim kemarau panjang. Sumur buatan hampir tidak ada di daerah selatan untuk memenuhi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

kebutuhan air penduduk mengandalkan Telaga pada musim hujan dan Gua atau Luweng di musim kemarau.

Kabupaten Gunungkidul seperti diterangkan di atas dibagi menjadi 3 Zona, yaitu: Zona Batu Agung bagian Utara, Gunung Seribu bagian Selatan dan Lembah Wonosari bagian Tengah. Pembagian 3 Zona ini berdasarkan adanya perbedaan-perbedaan yang dijumpai pada batuan-batuan induk dan topografinya. Berdasarkan pada batuan induknya tanah di Kabupaten Gunungkidul dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: golongan yang berasal dari batu induk Kapur dan dari batu induk Vulkanik. Tanah yang berasal dari batu induk Kapur dibedakan menjadi dua, yaitu: Tanah Grumosol di Lembah Wonosari dan Tanah Mediteran atau Rensina di Pegunungan Seribu. Sedangkan Tanah yang berasal dari batuan induk Vulkanik terdapat di Zona Batu Agung dalam jenis tanah Latosol.

Daerah Batur Agung dan lembah Wonosari terdapat sumber air yang berasal dari sungai maupun sumur sedangkan di daerah Gunung Seribu keadaan ini tidak dijumpai tetapi daerah Gunung Seribu terdapat sungai di bawah tanah. Air hujan yang sampai pada batu induk kapur dapat ditembus dan tidak dapat menyimpan air yang mengakibatkan akan mengalir pada lapisan yang tidak di tembus. Air hujan tersebut kemudian mengalir atau mencari tempat didearah lebih rendah dan pada akhirnya akan menjadi sungai pada tanah yang bermuara masuk ke Pantai. Tetapi di Daerah Gunung Seribu terdapat banyak Telaga pada bagian topografinya rendah. Daerah ini memiliki lapisan tanah yang tebal akibat dari adanya proses erosi. Akibat dari volume

air hujan yang masuk ke daerah rendah ini lapisan tanah pada dasarnya sangat tebal, sehingga air tertampung di dalamnya menjadi relatif stabil meskipun pada musim kemarau panjang.

Sungai yang terbesar di daerah Gunungkidul adalah Sungai Oyo, walaupun demikian air sungai ini tidak bisa dimanfaatkan secara terus menerus untuk keperluan pertanian. Pada musim kemarau volume airnya berkurang dan sumber air ini umumnya dipergunakan untuk rumah tangga. Sumber air untuk keperluan pertanian hanya terdapat di beberapa daerah, seperti: Kecamatan Ponjong, Ngawen dan Karangmojo. Kebutuhan air pada di daerah Pegunungan Seribu dan Batur Agung menjadi terasa oleh penduduk desa pada setiap musim kemarau.

Keadaan iklim di Gunungkidul seperti juga daerah lainnya di Indonesia pada umumnya adalah beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Bagi petani di daerah ini kedua musim itu sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan usaha taninya. Kegiatan pertanian di Kabupaten Gunungkidul adalah sistem tadah hujan yaitu kebutuhan pengairan tanaman sepenuhnya tergantung air hujan. Adanya dua musim itu bagi petani telah membentuk pola keaktifannya terutama yang berkenaan dengan pemanfaatan tenaga kerja dalam bidang pertanian. Kedua musim itu setiap tahunnya tidak selalu mempunyai karakteristik yang sama mengenai curah hujan.

Berikut ini disajikan data mengenai curah hujan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 1955-1973 lihat gambaran (Data terlampir). Data

tersebut menyajikan rata-rata angka curah hujan sebesar 1806 mm setahun. Perhitungan rata-rata selama 19 tahun tersebut diperoleh hasil 7 bulan merupakan bulan basah, 1 bulan merupakan bulan lembab dan 4 bulan merupakan bulan kering. Bulan-bulan kering terdapat pada bulan Juni sampai dengan bulan September, sedangkan Bulan Lembab terdapat pada November sampai dengan bulan Mei.

## **B. Struktur Administrasi Pemerintahan**

Secara administratif daerah Kabupaten Gunungkidul pada awal Tahun 1960-an terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 144 kelurahan dengan luas geografinya keseluruhan  $\pm 1.485,13 \text{ km}^2$ . Wilayah Kabupaten Gunungkidul mempunyai batas administratif sebagai berikut: sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten daerah Tingkat II Klaten dan Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Jawa Tengah, sebelah Timur dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.<sup>6</sup> Pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Wonosari karena menjadi ibu kota Kabupaten. Daerah ini juga menjadi pusat kegiatan masyarakat dan menjadi kecamatan teramai jumlah penduduknya. Pembagian daerah kecamatan tersebut lihat gambaran (Data Terlampir).

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Banyaknya penduduk berdasarkan sensus tahun 1961 sebanyak 571,833 jiwa mencakup 114,675 jiwa rumah tangga. Kepadatan penduduknya 385 jiwa atau 3 jiwa per hektar dan rata-rata banyaknya rumah tangga adalah 5 orang.<sup>7</sup> Sebagian besar penduduk Gunungkidul mata pencariannya di bidang pertanian, karena tanah perkarangan selain untuk tempat tinggal digunakan juga sebagai tanah pertanian. Luas tanah Kabupaten Gunungkidul menurut penggunaannya lihat gambaran (Data Terlampir).

Kepadatan penduduk daerah Kabupaten Gunungkidul termasuk lebih kecil jumlah penduduknya dibandingkan daerah-daerah Kabupaten DIY lainnya. Besar dan luas Kabupaten Gunungkidul relatif kecil kepadatan penduduknya menandakan pedesaan Gunungkidul tidak mengalami tekanan penduduk serta kesulitan tanah yang ekstrem sebagaimana di daerah-daerah pedesaan Jawa lainnya. Keadaan seperti itu bukan tidak adanya masalah namun sebagian besar daerah kabupaten Gunungkidul ini berbukit-bukit dan tandus. Daerah-daerah yang bisa dijadikan lahan pertanian rakyat kebanyakan pertanian berupa sawah banyak terdapat di Zona Ledok Wonosari.

### **C. Kondisi Sosial Ekonomi**

Berdasarkan data statistik kependudukan Kabupaten Gunungkidul laju pertumbuhan penduduk tiap tahun rata-rata di Kabupaten Gunungkidul mencapai 2%. Bila dibandingkan Kotamadya Yogyakarta, yaitu laju

---

<sup>7</sup> Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Penduduk Gunungkidul*. Hasil Sensus Penduduk 1961, 1971, dan 1980 Dilengkapi Hasil Sensus Over All 1968. 1983, hlm. 2.

pertumbuhan rata-rata tiap tahun sebesar 1,65%. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunungkidul di atas angka rata-rata. Laju perkembangan penduduk Gunungkidul lihatlah gambaran (Data Terlampir).<sup>8</sup>

Pemukiman desa atau padukuhan-padukuhan di Gunungkidul umumnya membentuk pola bergelombol dan berdekatan satu sama lain, selain itu tidak jarang membentuk komunitas tersendiri yang diikat oleh tata cara dan adat istiadat desa. Unit pemukiman terbagi ke dalam petak-petak tanah yang merupakan kesatuan rumah tempat tinggal. Unit pemukiman yang lainnya milik orang lain dibatasi oleh pagar bambu atau tatanan batu memanjang (galengan), tetapi ada juga ditanami dengan pohon-pohon. Pemukiman di pedesaan biasanya terdapat jalan-jalan desa di mana rumah penduduk menghadap ke jalan itu. Rumah-rumah di pedesaan antara satu dengan rumah yang lain jaraknya berdekatan, bahkan kadang-kadang dalam satu perkarangan terdapat lebih satu rumah tangga terdiri dari kumpulan beberapa rumah tangga yang menempati rumah panjang membentuk keluarga besar (*Extended Family*). Rumah tersebut terdiri dari beberapa keluarga batih yang hubungannya dekat sekali.<sup>9</sup> Ciri-ciri pemukiman yang rapat itu secara sosiologis akan membentuk pola perilaku masyarakat, dimana masyarakat tersebut lebih bersifat kolektif (kebersamaan), gotong royong, dan kekeluargaan. Hal ini bisa dibandingkan dengan pola pemukiman penduduk

---

<sup>8</sup> Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 69.

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Falkultas Ekonomi Indonesia, 1984. hlm. 291.

pedesaan dimana letaknya berjauhan dan masyarakatnya lebih bercirikan individualis dengan ikatan-ikatan ekonomis yang bersifat rasional.

Bentuk rumah bagi orang Jawa pada umumnya seperti juga yang terdapat di Pedesaan Gunungkidul. Ada beberapa yang sesuai dengan dengan kemampuan dan derajat serta gengsi pemiliknya bukan penunjuk bagi kekayaan seseorang tetapi biasanya jenis bahan menggambarkan tingkat kekayaan pemiliknya.<sup>10</sup> Nama rumah tersebut sesuai dengan bentuk atapnya seperti *limasan* atau *lintring*, *kampung*, dan *joglo*. Rumah *limasan* atau *lintring* dimiliki oleh orang-orang kebanyakan yang kemampuan ekonominya cukup. Rumah *kampung* banyak didiami oleh penduduk yang kurang mampu. Rumah *joglo* dimiliki oleh keluarga yang masih menganggap sebagai warga paling terpandang di desa itu.

Besar dan gaya atap suatu rumah itu sering menjadi gengsi dan kedudukan sosial.<sup>11</sup> Atap kebanyakan dari genting tanah liat dan sebagian beratap alang-alang dinding rumah terbuat dari *gedhek* (ayaman bambu), papan dari kayu berbagai jenis ada juga dinding yang terbuat dari tembok. Lantai rumah sebagian besar masih berupa tanah tetapi ada juga yang dilapisi dengan semen atau tegel. Seorang warga desa biasa dikatakan sebagai orang cukup (*wong duwe*) mempunyai susunan rumah yang terdiri dari rumah *kampung* sebagai dapur, rumah *limasan* sebagai ruang keluarga dan rumah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1972, hlm. 332.

yang terletak di depan berbentuk *limasan* atau *lintring* sebagai menerima tamu. Bahan baku yang menjadi standar untuk menunjukkan bahwa rumah tersebut sudah berkualitas adalah kayu jati.

Masyarakat desa di dalam komunitas orang Jawa secara keseluruhan sebagai masyarakat tersendiri yang masuk dalam anggapan *wong cilik* (orang kelas bawah) dapat dibedakan dengan kehidupan masyarakat kaum bangsawan dan *priyayi* (abdi kerajaan) sebagai *wong gede* (kelas atas).<sup>12</sup> Perbedaan diantara keduanya juga disebutkan secara individual berdasarkan regionalitas meskipun sebenarnya pada gaya kehidupan seseorang yang mencerminkan sifat umum antara golongan atas dan golongan bawah yaitu *wong kotu* dan *wong deso*. Perbedaan antara orang desa dan orang kota istana pada masyarakat Jawa khususnya Kabupaten Gunungkidul tampak sampai masa antara tahun 1970-1974. Para pegawai kerajaan sebagai kaum *priyayi* merupakan penghubung antara rakyat (*wong cilik*) dengan pihak kerajaan yaitu kaum bangsawan.<sup>13</sup> Perbedaan struktur masyarakat seperti itu adalah jelas menunjukkan status seseorang atau posisi suatu kelompok masyarakat yang satu terhadap kelompok masyarakat yang lain. Kedua kelompok atau kelas itu *wong cilik* (rakyat kebanyakan) dan *wong gede* (para bangsawan dan

---

<sup>12</sup> Mengenai pengertian antara *wong cilik* dan *priyayi* lihat pada Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1820-1830*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hlm. 32.

<sup>13</sup> S.M.P. Tjondronegoro dan G. Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Bhatara, 1984, hlm. 43.

*priyayi*) terjalin pula dimana pihak pertama membentuk pola hubungan *patron-client* (pelindung-anak buah).<sup>14</sup>

Petani pedesaan di Jawa menurut lapisan sosial termasuk golongan *wong cilik* diantara mereka sendiri juga terbagi-bagi secara berlapis. Lapisan tertinggi dalam desa adalah *wong baku*. Lapisan ini terdiri dari keturunan orang-orang yang dulu pertama-tama datang dan menetap di desa. Mereka ini memiliki sawah, rumah dengan tanah perkarangannya. Lapisan kedua dalam rangka sistem pelapisan sosial di pedesaan adalah *kuli gandok* atau *lindung*. Mereka adalah laki-laki yang sudah menikah akan tetapi tidak mempunyai tempat tinggal sendiri, sehingga terpaksa menetap di rumah mertuanya. Namun begitu, tidaklah berarti mereka ini tidak mempunyai tanah-tanah pertanian. Biasanya mereka mendapatkan tanah pertanian yang diperoleh dari warisan atau pembelian.

Lapisan ketiga ialah lapisan *joko* dan *sinoman* atau bujangan. Mereka semuanya belum menikah dan masih tinggal bersama-sama dengan orang tuanya sendiri atau *ngenger* di rumah orang lain.<sup>15</sup> Golongan bujangan ini bisa mendapatkan atau memiliki tanah-tanah pertanian, rumah, dan perkarangannya dari pembagian warisan atau pembelian. Sistem pengolongan-penggolongan di atas tersebut selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 342.

yang berbeda-beda dari keluarga-keluarga atau anggota-anggota tiap-tiap ketiga lapisan itu.<sup>16</sup>

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul dapat dilihat dari tata guna tanah atau penggunaan tanah oleh petani. Penggunaan tanah oleh petani tidak hanya terbatas pada satu macam tanah saja apabila dilihat dari letak tanahnya. Terdapat tiga macam tanah yang dapat diusahakan oleh petani yaitu tanah perkarangan, tanah tegalan,<sup>17</sup> dan tanah lereng bukit atau lereng gunung. Tanah perkarang biasanya ditanami dengan pohon-pohon seperti pisang, mlinjo, jeruk, kelapa, pepaya, dan tanaman yang lainnya. Kadang-kadang perkarangan juga ditanami dengan ubi-ubian, sayuran, dan juga tanaman obat-obatan. Bagi petani yang tidak memiliki tanah tegalan tidak jarang mereka juga memanfaatkan tanah perkarangan untuk menanam tanaman pangan seperti tanah tegalan.

Hasil dari tanaman perkarang sering kali mempunyai nilai ekonomis yang sangat besar, dengan kata lain hasil-hasil yang didapat dari hasil panennya dapat diperdagangkan. Hasil dari perkarangan sebagian besar dipergunakan untuk konsumsi sendiri, walaupun tidak sedikit yang dijual kepasar desa atau kepada tengkulak kelapa dan buah-buahan.<sup>18</sup> Para tengkulak setiap musim panen tanaman tertentu datang kedesa-desa untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>17</sup> Tanah yang ditanami palawija dan sebagainya dengan tidak menggunakan sistem irigasi, tetapi bergantung pada air hujan.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 3.

membeli hasil dari tanah perkarangan yang bernilai tinggi bagi petani. Hasil dari tanaman perkarang ini mampu menambah pendapatan keluarga petani.

Kehidupan petani pada masa lalu sampai dasawarsa 60-an, tanah perkarangan masih cukup menjadi sumber pendapatan yang cukup penting. Para petani sebagian besar kurang mampu memanfaatkan tanah perkarangan secara efektif, karena hanya ditanami tanaman yang kurang produktif seperti tanaman bambu dan tanaman lain-lainnya. Oleh karena itu, jika tanah perkarangan digarap dengan baik akan memberikan sumbangan pendapatan bagi petani yang cukup besar. Sebagai perbandingan di daerah Sriharjo menurut kajian yang telah dilakukan oleh Masri Singarimbun dan D.H. Penny menyebutkan bahwa hasil dari tanah perkarangan lebih besar per hektarnya dari pada hasil yang didapatkan dari tanah sawah. Petani di daerah itu berusaha mengembangkan tanaman perkarangannya dengan cara mengubah sawah yang tidak produktif menjadi perkarangan.<sup>19</sup>

Tanah tegalan pada umumnya ditanami jenis tanaman jenis tanaman seperti ubi kayu, kedelai, jagung, kacang tanah, padi, dan jenis-jenis tanaman kacang-kacangan lainnya. Pola tanaman tanah tegalan adalah tumpang sari beberapa jenis tanaman tersebut ditanami pada lahan yang sama. Latar belakang yang mendasari pola tanam tersebut adalah lahan garapan yang sempit dan kondisi perairan pertanian. Keadaan seperti itu membuat para petani memikirkan lahan yang sempit untuk dimanfaatkan secara maksimal.

---

<sup>19</sup> Masri Singarimbun dan D.H. Penny, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1984, hlm. 60.

Para petani itu menginginkan hasil panen dari berbagai jenis tanaman seperti jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah. Tindakan ini merupakan cara petani di Gunungkidul untuk mengintensifkan penggunaan tanah. Usaha lain yang dilakukan oleh para petani adalah dengan cara memanfaatkan waktu sesuai dengan kondisi iklim. Jenis tanaman yang banyak memerlukan banyak air seperti jagung, padi, kedelai, dan sayur-sayuran serta ubi kayu di tanam pada awal musim hujan. Tanaman kacang tanah dan tembakau di tanam pada musim mereng atau kemarau. Keuntungan pola tanaman tumpang sari adalah mengurangi resiko kegagalan panen baik karena serangan hama maupun kurangnya curah hujan, selain itu petani dapat memperoleh hasil panen secara berturut-turut sesuai dengan umur tanaman.

Kehidupan para petani selalu bergulat tentang kondisi alam dengan perhitungan yang matang akan membawa mereka ke dalam perolehan hasil panen yang bagus. Beberapa teknik yang ada dalam bidang pertanian para petani memilih rutinitas dimana mereka dapat meminimalkan kemungkinan kegagalan dalam pengolahan tanaman pertanian. Teknik yang paling baik pun dalam bidang pertanian sekalipun tetap rawan. Petani amat miskin yang menggarap tanah kurang dari 0,5 ha juga sering disebut petani gurem.<sup>20</sup> Kebanyakan petani, terutama petani gurem dan petani kecil berusaha untuk menghindari resiko dari setiap proses produksi pertanian, karena mereka takut pada kemungkinan yang terjadi dalam proses produksi pertanian. Hal itu di

---

<sup>20</sup> Gagasan Perhepi, *Mengatasi Masalah Petani Gurem dan buruh Tani di Jawa*. Jakarta: Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, 1982, hlm. 1.

sebabkan oleh pengairan tanaman tergantung pada air hujan, sehingga untuk menggarap tanah tegalan harus mempertimbangkan saat akan turun musim penghujan.

Kebiasaan petani setempat dalam memulai menggarap tanah dengan melihat tanda-tanda alam sekitar. Sebagai tanda-tanda alam tersebut adalah rasi bintang *luku* yang menjadi simbol para petani. Jika posisi rasi bintang tersebut tegak lurus maka tibalah saat bagi petani untuk memulai menggarap tanah sebagai persiapan seperti memperbaiki galengan, mengangkut pupuk kandang, dan juga membajak tanah. Pada saat posisi kira-kira condong 45 derajat ke arah barat pertanda bila petani sudah diperbolehkan untuk menebarkan benih padi maupun palawija yang tahan panas.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rina Widiastuti, *Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat di desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten gunung Kidul (1969-1990-AN)*. Yogyakarta: Skripsi Jurusan Jurusan Ilmu Sejarah FIB UGM, 2011, hlm. 33.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU PADA MASYARAKAT GUNUNGKIDUL**

### **A. Kebijakan Pemerintahan Pusat**

Kebijakan pertanian merupakan kebijakan pokok Soeharto setelah upaya pemulihan ekonomi. Langkah pertama ketika ia berkuasa adalah meningkatkan produksi padi. Pada saat yang bersamaan di kalangan dunia pertanian tengah muncul upaya yang disebut Revolusi Hijau untuk meningkatkan produksi pangan. Soeharto dengan bantuan konsultan-konsultan asing dan pakar di dalam negeri langsung mengikuti sepenuhnya metoda yang ditawarkan melalui program Revolusi Hijau.<sup>1</sup>

Pemerintah segera membuat kebijakan yang bertujuan membantu perkembangan pertanian rakyat yang pada gilirannya berarti memajukan kehidupan dan meningkatkan pendapatannya. Para penyuluh pertanian harus dekat dengan rakyat dan secara terus menerus berusaha memperhatikan, serta menganalisis kehidupan petani sehari-hari, selain itu mendengar dan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi petani dan bila mungkin membantu memecahkannya. Inilah fungsi politik pertanian atau kebijakan pertanian pada tingkat mikro.

Tingkat makro atau tingkat nasional pemerintah melihat berbagai persoalan pertanian dari segi ekonomi. Misalnya pemerintah membandingkan kebutuhan pangan penduduk secara nasional dengan menghitung jumlah

---

<sup>1</sup> Andreas Maryoto, *Jejak Pangan: Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan*. Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 137.

penduduk dan menafsirkan kebutuhan minimumnya per tahun. Kalau jumlah kebutuhan nasional ini tidak tercukupi dari produksi dalam negeri, maka pemerintah menyusun program peningkatan produksi dan memperkirakan biaya yang diperlukan. Inilah yang secara umum disusun dalam Repelita dan program-program dalam APBN sektor pertanian.<sup>2</sup> Sekedar memberikan gambaran sebagai komitmen pemerintahan dalam pembangunan pertanian, selanjutnya, akan dipaparkan rumusan-rumusan tujuan umum pembangunan sektor pertanian dalam Repelita I 1969-1974. Tujuan umum, menaikkan produksi pangan khususnya beras, meningkatkan produksi dan diversifikasi tanaman ekspor serta memperluas kesempatan kerja, sedangkan tujuan khususnya swasembada beras pada akhir Pelita.<sup>3</sup>

Usaha-usaha untuk mengatasi masalah beras di Indonesia memang mendapat tempat utama dalam rencana pembangunan sejak tahun 1966.<sup>4</sup> Repelita I yang mulai dilancarkan pada tahun 1969, memilih pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian pangan atau beras sebagai titik sentral. Pengenalan teknologi baru yang memungkinkan untuk meningkatkan produksi beras dengan cepat sekali. Teknologi baru ini muncul dengan wujud benih-benih unggul yang sangat responsif terhadap pemakaian pupuk dalam arti bahwa pemakaian pupuk terhadap benih-benih unggul tersebut

---

<sup>2</sup> Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 41.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>4</sup> Arifin Hutabarat, *Usaha Mengatasi Krisis Beras*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1974, hlm. 43.

menghasilkan kenaikan produksi yang tinggi sekali. Selain itu, politik beras yang ditekankan pada kebijakan peningkatan produksi ini dikelola dalam program nasional yang menjadi terkenal sampai sekarang yaitu Bimas (Bimbingan Massa), dimana presiden secara langsung memonitor perkembangan sampai ke desa-desa. Bimas dilaksanakan melalui program *Panca Usaha* yaitu lima cara untuk menaikkan produksi (bibit unggul, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama, dan sistem bercocok tanam yang lebih baik.<sup>5</sup>

Pemerintah pada waktu itu membuka investasi asing untuk meningkatkan produksi padi. Produsen pestisida, benih, alat pertanian, dan lain-lain berlomba masuk ke Indonesia. Bersamaan dengan itu utang-utang asing ditawarkan untuk pembangunan pertanian, khususnya produksi padi, dengan membuat kebijakan harga gabah yang memungkinkan pengendalian harga yang menguntungkan petani dan tidak membebani produsen. Pemerintah juga memperkuat infrastruktur pertanian seperti koperasi, irigasi, pergudangan, fasilitas keuangan, transportasi, dan lain-lain melalui program Bimbingan Massa dan Intensifikasi Massa. Petani juga mendapat insentif seperti kepastian mendapatkan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan benih. Pertanian menjadi program prioritas yang dituangkan dalam Repelita I.

Bimas yang merupakan singkatan dari Bimbingan Massal, dalam pengertian resmi dan aslinya merupakan suatu sistem penyuluhan yaitu pembimbingan petani kearah usaha tani yang lebih baik dan maju, sehingga ia

---

<sup>5</sup> Mubyarto, *op.cit*, hlm. 73.

mampu meningkatkan pendapatan usaha taninya. Bimbingan ini dilaksanakan secara massal (untuk membedakan bimbingan individu). Karena, pertama yang hendak dicapai adalah peningkatan produksi dan pendapatan yang sangat besar 8-10% per tahun dan kedua, pembimbingan secara perorangan akan sangat lambat dan mahal. Karena Bimas merupakan sistem penyuluhan maka isinya berupa dorongan dan persuasi melalui contoh-contoh yang dapat ditiru, baik di kebun-kebun percobaan, demonstrasi plot (dem-plot) maupun di sawah-sawah petani maju.<sup>6</sup>

Istilah bimas mulai dipakai secara resmi pertama pada tahun 1967/1968 pada saat pemerintah ingin melaksanakan intensifikasi padi sawah seluas 1.000.000 ha dengan menerapkan sistem panca usaha. Salah satu dari lima usaha meningkatkan produksi padi ini adalah penggunaan bibit unggul. Karena, pada tahun 1967/1968 bibit ajaib PB 5 dan PB 8 mulia tersedia dalam jumlah yang sangat berlimpah, maka bibit unggul inilah yang menjadi simbol pengenalan sistem Bimas. Sebagaimana terjadi di negara-negara di Asia, bibit baru ini mampu meningkatkan produksi rata-rata 50%,<sup>7</sup> sehingga merupakan suatu kemajuan yang besar dan revolusioner. Inilah tahun permulaan “revolusi hijau” di Indonesia pada umumnya.

Salah satu faktor yang penting perannya dalam mendukung program Bimas adalah kredit. Karena untuk memungkinkan efektifnya bibit unggul tersebut, harus digunakan cukup banyak pupuk buatan dan karena pupuk ini

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>7</sup> *Ibid.*

harus dibeli dengan uang umumnya tidak dimiliki oleh petani terutama petani kecil, maka pemerintah menyediakan kredit yang diperlukan. Kelompok petani yang tidak memperoleh bagian kredit Bimas dimasukan kedalam daftar petani Inmas. Areal Bimas adalah areal intensifikasi dengan kredit BRI, sedangkan Inmas adalah areal intensifikasi di luarnya, yaitu yang tidak memperoleh jatah kredit yang disediakan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Selanjutnya salah satu tugas pemerintah dalam sistem ekonomi adalah mengusahakan rakyat dapat memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan pokoknya. Ditinjau dari tugas pemerintahan berkewajiban yang demikian, maka dalam politik harga pemerintahan berkewajiban agar harga-harga kebutuhan pokok rakyat terjangkau oleh daya beli mereka, khususnya pada tingkat perkembangan ekonomi pada waktu itu, bagi kelompok pendapatan yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Dalam hal kebutuhan pokok seperti beras misalnya, pemerintah mempunyai pedoman harga tertinggi yang dianggap wajar, sehingga pemerintah mengusahakan agar harga tersebut tidak terlampaui. Usaha untuk menetapkan harga maksimum ini dilakukan pemerintah dengan berbagai cara, misalnya dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang pada prinsipnya bertujuan sama.

Kebijakan pengadaan untuk menekan harga sebagai ilustrasi makin banyak barang di pasaran, dengan permintaan tetap, harga akan turun. Maka kalau pemerintah memberikan subsidi harga dengan ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya, kalau pertumbuhan produksi beras dalam negeri belum

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

secepat pertumbuhan penduduk, maka harga beras cenderung meningkat terus-menerus. Dalam keadaan seperti itu pemerintah mengimpor beras dan menjualnya dalam jumlah yang diperlukan di pasaran untuk menekan kembali harga beras. Keperluan akan adanya subsidi timbul bila ternyata harga beras impor yang dibeli pemerintah lebih tinggi daripada harga maksimum yang dianggap wajar oleh pemerintah. Besarnya subsidi adalah sama dengan harga beras impor dalam rupiah (termasuk ongkos angkut dan biaya-biaya lain di pelabuhan), dikurangi harga penjualan pemerintah. Jumlah subsidi secara keseluruhan adalah besarnya subsidi per kg dikalikan jumlah harga beras yang diimpor.

Musim tanam pada tahun 1969/1970 yaitu tahun pertama Pelita I barulah secara resmi pemerintah mengumumkan apa yang disebut harga dasar padi, yang ditetapkan bulan Agustus 1969. Harga dasar ini adalah Rp.13,20 per kg padi kering lumbung kualitas madium pada tingkat petani. Karena, dalam praktek BULOG tidak membeli beras atau padi langsung dari petani maka harga dasar ini berlaku kedalam harga beras giling eks-penggilingan padi yaitu Rp.36 per kg. Pada tingkat kota harga ini berlaku lebih lanjut menjadi Rp.47 per kg pada tingkat harga grosir. Sehubungan dengan ini ditetapkan pula harga maksimum (*ceiling price*) yaitu Rp.50 per kg pada tingkat eceran.<sup>9</sup> Sedangkan harga produksi pertanian yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1969/1970 untuk lebih jelasnya lihat gambaran (Data Terlampir).

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

Gelombang Revolusi Hijau yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an ternyata tidak pilih kasih. Artinya, ia tidak saja melanda daerah-daerah yang relatif subur seperti daerah persawahan tetapi juga melanda daerah-daerah lahan kering yang secara potensial miskin. Keadaan ini sesuai dengan intruksi Menteri Pertanian kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Seluruh Indonesia.<sup>10</sup> Begitu juga di Daerah Gunungkidul yang sebagian besar tanahnya berupa lahan kering mendapat terpaan gelombang Revolusi Hijau melalui program-program pembangunan yang masuk ke daerah itu. Terdorong oleh masalah dilematis yakni apabila pembangunan pertanian dilaksanakan dengan titik penekanan pada peningkatan produksi pertanian, kerusakan tanah yang semakin parah akibat erosi tidak dapat dihindarkan. Demikian juga, sebaliknya apabila pembangunan pertanian ditekankan pada penanggulangan erosi berarti akan mengundang kelaparan, maka pembangunan pedesaan di daerah ini dilakukan secara seimbang dan serasi.

## **B. Revolusi Hijau di Gunungkidul**

Masa pemerintahan Orde Baru kebijakan pertanian lebih ditujukan untuk mengejar produktivitas yang tinggi tanpa memperhatikan dampak yang muncul. Kebijakan pertanian lebih ditujukan untuk mencapai suatu stabilitas politik melalui kecukupan pangan dengan program Revolusi Hijaunya. Dalam konteks ini, Revolusi Hijau dianggap sebagai jawaban terhadap upaya

---

<sup>10</sup> Surat Menteri Pertanian Kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia, *Prihal: Pemberitaan Usaha-usaha Pembangunan*. Djakarta, 26 Mei 1971.

menciptakan stabilitas politik sekaligus ekonomi. Pada masa Orde Baru prioritas swasembada pangan (beras) menjadi prioritas utama. Beras dipandang sebagai produk kunci dalam perekonomian Indonesia, karena kekurangan suplai pada harga yang wajar dapat menjadi ancaman bagi kestabilan politik dan ekonomi.<sup>11</sup>

Pemerintahan Kabupaten Daerah Gunungkidul telah menerapkan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosial pada masa Revolusi Hijau. Teknologi yang digunakan pemerintahan berkaitan dengan penggunaan pupuk buatan, perbaikan prasarana produksi, perbaikan alat-alat produksi, penggunaan pemberantasan hama, penggunaan obat-obatan, pemakaian bibit unggul, dan metode bercocok tanam yang sesuai dengan kondisi alam. Adapun teknologi sosial berkaitan dengan kelembagaan dan pranata kemasyarakatan yang dibutuhkan sebagai wahana pemanfaatan teknologi yang berupa penempatan unit-unit produksi tani dan usaha pemanfaatan lembaga-lembaga tradisonal seperti lembaga masyarakat desa serta lembaga gotong royong guna menunjang pembangunan dibidang pertanian. Sejak tahun 1970-an pemerintah Gunungkidul sudah merintis usaha pengendalian erosi melalui program penghijauan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Noer Fauzi dan Khrisna Ghimire, *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001, hlm. 256.

<sup>12</sup> Machmoeh Effendhi, *Peluang Kerja dan keadaan Ekonomi Masyarakat Desa di Daerah kering: Kasus Gunungkidul (1969-1983)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Sastra UGM, 1993, hlm. 22.

Pelaksanaan Revolusi Hijau di Gunungkidul dalam menjalankannya Pemerintah daerah Gunungkidul melakukan beberapa kebijakan, seperti penyediaan pupuk Urea.<sup>13</sup> Kebutuhan akan pupuk Urea ini untuk mensukseskan program Bimas di daerah tersebut. Selain itu, Pemerintah Gunungkidul dalam menanggulangi musim Panceklik mengintruksikan kepada Camat dan Kepala Dinas Pertanian Gunungkidul melakukan usaha-usaha untuk mengatasinya.<sup>14</sup> Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Gunungkidul agar masyarakatnya dianjurkan dalam *musim mareng* atau musim kemarau supaya menanam tanaman pengganti gaplek yang dapat dipanen pada akhir *mareng*, yaitu: cantel dan ketela rambat. Selanjutnya, supaya menanam jenis *polo kependem*, misalnya: *gembili*, *gembolo*, *uwi*, *suweg*, *ganyong*, *garot*, *benguk*, *jenis koro-karoan*, dan lain-lain. Usaha lainnya juga menanam ketela pohon pada musim mareng di Gunung dengan cara memotong ketela pohon yang bercabang dua atau tiga yang diperkirakan dapat dipanen pada musim mareng 1974.

Sejak tahun 1970-an Pemerintah Gunungkidul telah mengupayakan semua potensi sosial dan teknologi pertanian agar masalah pembangunan di sektor pertanian dapat tercapai dan kekurangan pangan dapat ditekan. Lembaga-lembaga baru di pedesaan dibentuk seperti lembaga Wilayah Unit

---

<sup>13</sup> Surat Bupati Daerah tingkat II Kab. Gunungkidul Kepada Kepala P.N. Pertanian Kesatuan Pemasaran D. I.U d/a Djl. A.M. Sangadji 19 di Yogyakarta, *Prihal: Penyediaan Pupuk UREA untuk M.H. 1971/ 1972*. Wonosari, 11 Oktober 1971.

<sup>14</sup> Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada Camat se-Kab. Gunungkidul dan Kepala Dinas Pertanian Kab. Gunungkidul, *Prihal: Usaha-usaha Menanggulangi Paceklik Th. 1973-1974*. Wonosari, 1 Januari 1973.

Desa (Wilud), Organisasi Petani Pemakai Air (OPPA), kontak tani, kelompok tani, dan sebagainya. Dengan terbentuknya lembaga-lembaga itu dan turut andil tokoh-tokoh masyarakat untuk menggerakkan warga sangat besar.<sup>15</sup> Demikian pula, dengan pemakaian teknologi pertanian, memang produksi tanaman pangan dapat mengalami kenaikan. Tetapi, usaha untuk memaksimalkan produksi tanaman pangan tidak cukup karena teknologi Revolusi Hijau yang diterapkan sangat membutuhkan air mengalami kesulitan. Sedangkan, di Kabupaten Gunungkidul air menjadi masalah utama yang sulit diperoleh terutama pada musim kemarau.

Pemerintah Daerah Gunungkidul untuk mengusahakan akan kebutuhan air pada tahun 1973 telah megupayakan pengadakan Proyek Pengembangan Air Tanah (P2AT) disalah satu di daerah yaitu Pantai Baron. Dalam laporan tersebut hasil dari pemasangan pompa dapat menaikkan air rata-rata  $\pm 15$  L/dt, penggunaan air tersebut telah menghasilkan padi sawah jenis unggul  $\pm 5$  ha yang diperoleh  $\pm 60$  kwintal/ha dan tanaman palawija pada musim kemarau.<sup>16</sup> Meskipun proyek tersebut berjalan lancar tetapi tidak semua daerah terpasang sumur pompa mengakibatkan kebutuhan akan air di Daerah Gunungkidul secara umum masih kekurangan. Sehingga, untuk mencukupi kebutuhan air

---

<sup>15</sup> Nur Aini Setiawan, *Kemiskinan di Kecamatan Rongkop : Kabupaten Gunungkidul Periode 1970-1995*. Yogyakarta: Laporan Penelitian Fakultas sastra UGM, 1996, hlm. 34.

<sup>16</sup> Surat Bupati Kepala daerah Gunungkidul Kepada Kepala Biro otonomi dan Desentralisasi daerah Istimewa Yogyakarta, *Prihal: Pemanfaatan Pompa Pantai Baron*. Wonosari, 28 November 1974.

sangat tergantung pada air telaga dan bak penampungan air hujan yang semuanya tergantung pada air hujan.

Intervensi teknologi pertanian melalui program-program pembangunan pedesaan seperti di atas. Selain mampu merubah kebiasaan petani dalam menggunakan alat-alat produksi dan sarana produksi lainnya yang lebih modern juga hasil-hasil produksi pertanian mengalami perubahan yang cukup berarti. Pengenalan padi bibit unggul yang mempunyai batang pendek dan mudah rontok. Alat-alat produksi pertanian tradisional yaitu *ani-ani* telah menggeser penggunaan dengan digunakannya *sabit* yang lebih praktis dan tidak terlalu banyak menggunakan tenaga kerja. Berkembangnya sarana irigasi dengan dibangunnya Chek-Dam dan pemasangan oncoran sumur pompa diesel di beberapa tempat di daerah Gunungkidul, selain mampu meningkatkan jumlah produksi juga membawa akibat berubahnya sebagian sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi.<sup>17</sup> Begitu juga masuknya alat penggilingan padi modern (huller) telah menggeser pemakaian alat-alat tradisional seperti alat penumbuk padi (alu atau lesung).

Beberapa usaha pemerintah daerah Gunungkidul untuk meningkatkan produksi masyarakat, namun aktivitas itu yang baru dan tumbuh berkembang belum mampu untuk menciptakan peluang-peluang yang berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan. Beberapa keberhasilan petani dalam meningkatkan produksi pangan tersebut bisa dikatakan merupakan kemajuan dalam sistem pertanian rakyat, yang berarti

---

<sup>17</sup> Machmoeh Effendhi, *loc. cit.*

juga ada perbaikan ekonomi bagi keluarga petani. Namun, semua itu belumlah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, khususnya pada musim paceklik<sup>18</sup> lihat gambaran (data terlampir). Di samping itu, suatu hal yang menjadi kendala mereka dalam meningkatkan produksi pangan adalah masalah pengairan yang masih sangat terbatas bahkan kekurangan pada musim kemarau.

Pada musim paceklik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberi bantuan kepada masyarakat Gunungkidul dengan mendatangkan makanan pengganti pangan seperti jagung. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menanggapi kedatangan bantuan tersebut dengan menyediakan gudang paceklik.<sup>19</sup> Demikianlah usaha-usaha Pemerintah Gunungkidul dengan melakukan beberapa kebijakan dalam mensukseskan Revolusi Hijau di Gunungkidul, serta Pemerintah Gunungkidul juga melakukan usaha-usaha agar masyarakatnya terhindar dari bahaya kelaparan.

Revolusi Hijau di satu pihak telah berhasil meningkatkan produksi beras tetapi di pihak lain telah menimbulkan pembagian keuntungan yang tidak merata dan dampak-dampak sosial ekonomi pada masyarakat pedesaan yang timbulnya gejala stratifikasi sosial.<sup>20</sup> Kesejahteraan petani miskin dan buruh

---

<sup>18</sup> Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah D.I.Y di Yogyakarta, *Prihal: Data-data Daerah Secara Rutin Kekurangan Pangan secara Serius dan Rencana Untuk Mengatasinya*. Wonosari, 31 Januari 1973.

<sup>19</sup> Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, *Prihal: Penyediaan Gudang Paceklik*. Wonosari, 12 februari 1973.

<sup>20</sup> Mubyarto, *op. cit.*, hlm. 150.

tani tak bertanah tetap mandek atau bisa diperbaiki pada tingkat yang sangat lambat. Revolusi Hijau lebih menguntungkan petani kaya daripada petani miskin. Karena, petani kaya lebih mampu memperbaiki nasibnya berdasarkan aset tanah dan modal yang dimilikinya dibandingkan petani kecil, petani kaya dapat menanggung resiko gagal panen yang diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor yang tidak dikuasai petani kecil dan petani kaya dapat memperbesar produksinya dengan cara menyewa walaupun tidak menimbulkan akumulasi kepemilikan tanah tetapi menimbulkan akumulasi penguasaan tanah.

### C. Produksi Pertanian di Gunung Kidul

Seperti halnya daerah-daerah lain di pedesaan Jawa, masyarakat Gunungkidul sudah lama mendasarkan penghidupannya dengan bercocok tanam atau bertani. Kondisi alam yang kurang menguntungkan karena tandus dan berkapur bukanlah merupakan hambatan bagi penduduknya untuk mengembangkan pertanian demi kelangsungan hidupnya. Meskipun mereka kadang-kadang mengalami kekecewaan karena hasil yang diperolehnya kurang baik tidak jarang juga kegagalan panen selalu menghantui para petani. Di daerah ini ada juga tanah pertanian dengan perairan tetap (oncoran) di beberapa *Kapanewon* atau kecamatan dengan luas areal kurang dari 1.500 hektar, yaitu di Patuk 1.419 hektar, Nglipar 1.193 hektar, Semin 1.379 hektar dan Ngawen 1.104 hektar.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> BIRO STATISTIS DAERAH YOGYAKARTA, *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta: Bagian I*. Tahun 1973, hlm. 26.

Namun begitu pengairan tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan pengairan untuk areal pertanian rakyat secara umum di Daerah Gunungkidul. Hal itu menyebabkan produktivitas tanah di daerah Gunungkidul menjadi rendah karena fasilitas yang mendukung pertanian, seperti: irigasi yang belum memenuhi syarat bagi pertanian hanya ada di beberapa daerah saja. Suatu sistem pertanian yang sudah lama dikembangkan oleh para petani Gunungkidul dalam mensiasati keadaan tanahnya yang sebagian besar tidak subur adalah dengan bercocok tanam menggunakan sistem atau siklus *mongso*. Dalam sistem ini kegiatan pertanian di bagi empat tahap, yakni *mangso ketiga, mangso labuh, mangso rendheng dan mangso mareng*.

*Mangso Ketiga* (kemarau), antara bulan Juni sampai Agustus merupakan waktu pengolahan tanah dan mempersiapkan lahan pertanian. *Mangso Labuh*, antara bulan September sampai November saat hujan mulai turun merupakan awal masa tanam beberapa jenis tanaman seperti ketela pohon, padigogo, jagung, jewawut, dan cantel yang ditanam dalam satu lahan atau dikenal dengan sistem penanaman *tumpang sari*. *Mangso Labuh* merupakan awal penanaman kacang tanah dan kedelai. Pada *Mangso Rendhereng* (penghujan), biasanya terjadi pada bulan Desember sampai Februari para petani melakukan kegiatan pemeliharaan tanaman, penyiangan, dan pemberantasan hama tanaman. Sedangkan, pada *Mangso Mereng* antara bulan Maret sampai Mei

biasanya para petani melakukan panen terhadap tanaman-tanaman tertentu, seperti: jagung, cantel, padigogo dan jawawut.<sup>22</sup>

Cara bercocok tanam semacam itu para petani mencoba untuk fleksibel terhadap keteraturan alam sekaligus untuk menghindari bahaya kegagalan panen. Dalam sistem tersebut persoalan yang muncul adalah kurang bisa maksimalnya hasil produksi pertanian (padi) karena para petani hanya memanen padi sekali dalam setahun. Meskipun demikian disana ubi kayu dihasilkan lebih dari cukup untuk persediaan bahan pangan masyarakat desa. Keadaan seperti itu disebabkan ladang-ladang ubi kayu yang luas ada kalanya tidak sempat dipanen selama dua tahun atau lebih. Bibit pun hanya diambil dari batang yang tidak dapat dimakan, sehingga tidak mengurangi produksi pangan. Namun, harus diingat bahwa di daerah ini boleh dikatakan tidak ada sumber-sumber pendapatan lain bagi kaum tani di luar ladangnya.<sup>23</sup>

Petani yang mengusahakan tanaman padi di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya menggunakan sistem pola tanam tumpangsari sebagai upaya yang sering dilakukan petani di daerah kering. Maksud penggunaan pola tanam itu adalah untuk memperoleh produktivitas dari berbagai macam tanam dalam sekali waktu tanam sambil menunggu panen ketela pohon yang relatif panjang usianya berkisar 7-10 bulan.<sup>24</sup> Sistem tumpangsari pada umumnya

---

<sup>22</sup> Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan. Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media Presindo, 2000, hlm 41.

<sup>23</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1991, hlm. 183 dan 188.

<sup>24</sup> Nur Aini Setiawan, *op.cit.*, hlm. 37.

menggunakan proses tanaman pada satu lahan ditanami berbagai macam tanaman lainnya. Misalnya, padi gogo ditanam bersama dengan tanaman lain seperti canthel dan jagung. Selain itu, ketela pohon ditanam satu lahan dengan kacang tanah, kedelai, dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan terbatasnya kesempatan untuk melakukan penanaman yang sumber pengairannya sangat tergantung pada curah hujan. Dengan demikian, kegiatan pola tanam hanya dapat berlangsung bila musim hujan tiba, sedangkan pada musim kemarau kegiatan pola tanam tidak dapat dilakukan.

Sistem tumpangsari yang dilakukan oleh petani di daerah Gunungkidul mempunyai pertimbangan komersial untung-rugi. Karena, dalam menanam tanaman yang berlainan jenis tetapi kedudukannya sama mereka lebih cenderung mengutamakan tanaman jenis tertentu yang hasilnya lebih produktif dan menggunakan alat-alat produksi tertentu untuk lebih mengalokasikan sumber produksi semaksimal mungkin. Sistem bercocok tanam seperti itu selama bertahun-tahun tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Selama belum ada perubahan drastis umpamanya dengan tersedianya air yang melimpah ruah. Sehingga, menarik petani untuk memproduksi satu jenis tanaman yang dapat diandalkan maupun menunjang kesejahteraan keluarganya.

Sejak tahun 1969 perkembangan pertanian berusaha tidak menggunakan pupuk kandang namun telah menggunakan cara-cara modern seperti penggunaan pupuk buatan dan menerapkan teknologi Revolusi Hijau.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 54.

Meskipun telah digunakan teknologi modern, tetapi produktivitas lahan pertanian sangat terbatas karena teknologi Revolusi Hijau sangat membutuhkan air. Adapun air yang telah diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul guna mengembangkan sumber air tanah melalui penerapan sumur pompa Diesel yang selanjutnya dikenal dengan Proyek Pengembangan Air Tanah (P2AT) tidak mencukupi kebutuhan air penduduk, sehingga penduduk masih dalam taraf subsisten dan hasil yang diperoleh baru dinikmati untuk kebutuhan minimal mereka sendiri.

Rendahnya produktivitas pertanian juga disebabkan rendahnya intensitas penggunaan pupuk. Petani di daerah kabupaten Gunungkidul pada umumnya sering menghadapi kelangkaan pupuk Urea,<sup>26</sup> meskipun BIMAS telah membantu untuk mengusahakan adanya pupuk tersebut.<sup>27</sup> Kondisi ini disebabkan persediaan pupuk masih terbatas, sedangkan permintaan pupuk jenis Urea itu melampaui target lihat gambaran (Data Terlampir). Oleh karena itu, persediaan pupuk terbatas maka harga dipasar bebas melonjak dratis yaitu bisa mencapai 50% lebih.

Dengan demikian, petani sulit mencari pupuk yang karena terbatasnya pupuk yang tersedia dan karena mahalnya harga pupuk. Kondisi ini menyebabkan petani tidak mampu membeli pupuk dan terpaksa hanya

---

<sup>26</sup> Surat Kepala Harian Kepada Ketua Badan Pembina Bimas D.I.Y di Yogyakarta, *Prihal: Kekurangan Pupuk*. Wonosari, 22 Desember 1973.

<sup>27</sup> Surat Inspektur/Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada S.P. wakil kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, *Prihal: Dropping Pupuk ke Gunungkidul*. Yogyakarta, 16 Februari 1974.

menggunakan pupuk kandang. Kurangnya penggunaan pupuk itulah yang mengakibatkan kualitas produksi rendah sehingga, pendapatan petani juga rendah. Oleh karena, rendahnya pendapatan petani maka petani tidak memprioritaskan untuk mengembalikan kredit Bimas, tetapi petani lebih mementingkan untuk mencukupi kebutuhan lainnya seperti pembayaran sekolah anaknya dan kebutuhan keluarga lainnya.

Rendahnya produktivitas padi di Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan hasil tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Pengembangan tanaman padi sulit dilakukan di Kabupaten Gunungkidul karena, *Pertama*, sulitnya sumber air untuk keperluan pertanian, khususnya pada musim kemarau, air yang diharapkan adalah air hujan, sehingga musim tanam tergantung pada curah hujan. *Kedua*, kondisi tanah yang dapat ditanami padi hanya 6.080 Ha berupa sawah dan tegal 84.907 Ha.<sup>28</sup> *Ketiga*, tidak cocoknya sebagian besar tanah untuk ditanami padi karena jenis tanah yang berbukit-bukit dan berupa tanah kapur.

Di Daerah Kabupaten Gunungkidul walaupun daerahnya sebagian besar tidak cocok menanam padi, biasanya disana ketela pohon dihasilkan lebih dari cukup untuk persediaan masyarakat desa. Meskipun produktivitas padi rendah, namun hasil itu dapat mencukupi kebutuhan minimum penduduk dan sebagian hasil itu terpaksa di jual pada waktu panen tiba karena, penduduk harus memenuhi kebutuhan lainnya. Adapun ketika ketika musim paceklik tiba petani juga harus membeli kembali atau mengganti ketela pohon sebagai

---

<sup>28</sup> Biro Statistik DIY, *op. cit.*, hlm. 26.

makanan pokok. Untuk lebih jelasnya hasil produksi di Daerah Gunungkidul<sup>29</sup> lihat gambaran (Data Terlampir).

Satu hal lagi yang sangat menunjang sektor pertanian rakyat di daerah Gunungkidul adalah peternakan lembu. Hampir mayoritas petani yang cukup mampu memelihara lembu lebih dari satu ekor yang kemudian setelah besar lembu itu dijual untuk dijadikan modal atau untuk kepentingan lainnya. Sudah lama bahkan, daerah Gunungkidul dikenal sebagai pemasok lembu untuk konsumsi protein hewani di daerah DIY pada umumnya. Para petani sering kali memanfaatkan lembunya untuk membajak sawah serta ada kalanya untuk mengela gerobak sebagai alat pengangkut hasil-hasil produksi pertanian. Di samping fungsinya di bidang pertanian ternak-ternak seperti di kutip oleh Soemardjan dari Robert K Merton, lembu tersebut mempunyai fungsi tersembunyi dalam menaikkan prestise sosial bagi pemiliknya, karena dipandang sebagai lambang atau ukuran kekayaan di desa.<sup>30</sup> Di kalangan petani bawah memelihara lembu adalah suatu kebanggaan tersendiri karena jarang diantara mereka mempunyai cukup uang untuk membelinya kecuali kalau mereka sedang mendapatkan rezeki besar.

Pada tingkat nasional program peningkatan produksi ini berjalan lancar dan mampu menaikkan produksi beras dengan tingkat yang cukup tinggi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Biro Pusat statistik Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Kabupaten daerah Tingkat II Gunung Kidul Dalam Angka Tahun 1980*. Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik, hlm. 115.

<sup>30</sup> Selo Soemardjan, *op. cit.*, hal 197.

<sup>31</sup> Mubyarto, *op. cit.*, hlm. 73.

Sehingga, pada tahun 1970-an pemerintah bahkan menunjukkan beberapa kekhawatiran akan terjadi kelebihan produksi dan mengusulkan penurunan target produksi. Ternyata optimisme ini kurang berdasar karena disamping angka-angka produksi masih belum meyakinkan juga akumulasi stok beras masih belum mencapai jumlah yang menentramkan. Dalam situasi demikian terjadilah musim kemarau yang panjang pada tahun 1970-an yang berakibat kegagalan panen di Indonesia. Begitu juga di daerah Gunungkidul tidak terlepas dari kegagalan panen dan musim kemarau tersebut.

Dalam menghadapi musim kemarau khususnya Pemerintah Daerah Gunungkidul berupaya mengatasi krisis beras tersebut dengan mengkonsumsi tanaman pengganti pangan seperti ketela pohon. Disamping itu tidak tercapainya swasembada beras pada akhir Repelita I menyebabkan pemerintah meninjau kembali kebijakan berasnya. Impor beras yang sangat besar (lebih dari dua juta ton) sehingga hampir mencapai 30% dari seluruh beras yang diperdagangkan di pasar dunia tidak menguntungkan Indonesia.<sup>32</sup> Sementara itu timbul pula dugaan bahwa perhatian yang terlalu berlebihan pada produksi beras memang telah mengakibatkan kelesuan produksi tanaman-tanaman pangan lain di luar beras. Demikianlah gambaran umum pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia serta pelaksanaan Revolusi Hijau di Gunungkidul pada khususnya.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

## **BAB IV**

### **DAMPAK SOSIAL EKONOMI PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU PADA MASYARAKAT GUNUNGKIDUL**

#### **A. Sistem Kepemilikan dan Peguasaan Tanah di Gunungkidul**

Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul yang sebagian besar berbukit, kering dan tandus sering disebut dengan kemiskinan alamiah. Namun masyarakat di Gunungkidul juga disebut kemiskinan stuktural.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa keadaan kemiskinan alamiah di daerah ini tidak mampu menjelaskan tentang kemiskinan yang dialami masyarakat yang banyak segi merupakan perpanjangan dari sejarah feodalisme dan kolonialisme yang telah melahirkan kepentingan sumber-sumber ekonomi. Adanya kemiskinan struktural dapat dilihat dari hal kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian. Dalam konteks pedesaan Gunungkidul hampir mayoritas petani merupakan petani gurem yang memiliki tanah sempit (kurang dari satu hektar) dan tidak subur, petani penyangkap yang menyewa tanah pada tuan-tuan tanah atau kas desa berdasarkan sistem bagi hasil, buruh tani yang tidak memiliki tanah dan bekerja pada tuannya. Namun secara keseluruhan hak kepemilikan tanah hampir merata untuk setiap keluarga dan kepemilikan secara turun temurun.

Berdasarkan sumber dari Direktorat Agraria pada tahun 1973 dapat dilihat keadaan tanah di daerah Gunungkidul. Data menyebutkan banyaknya luas tanah milik rakyat atau hak milik menurut golongan luas tanah dengan

---

<sup>1</sup> Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan. Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media presindo, 2000, hlm. 32.

perinciaan mengusahakan tanah sawah sebesar 6.080 hektar dan tanah kering sebesar 84.907 hektar atau secara keseluruhan berjumlah 90.987 hektar<sup>2</sup> untuk lebih jelasnya lihat gambaran (data terlampir). Dengan gambaran tersebut menjelaskan bahwa mayoritas petani di pedesaan Gunungkidul banyak mengejarkan tanah kering dari pada tanah sawah untuk bercocok tanam guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal itu berarti masyarakat Gunungkidul sangat tergantung sekali pada curah hujan di musim penghujan dalam mengolah tanah pertaniannya dan memproduksi bahan pangan.

Lembaga pemilikan tanah di pedesaan Gunungkidul dibedakan menjadi dua bentuk kepemilikan, yakni pemilikan perorangan atau individu dan pemilikan komunal atau tanah desa. Pemilikan tanah perorangan tercermin dalam bentuk tanah *yasani*.<sup>3</sup> Proses kepemilikan tanah ini kemungkinan kerana pembelian, pewarisan dan pembukaan lahan baru. Dari arti kata *yasani* atau *yoso* yang dapat diterjemahkan membuat atau mencari sebenarnya pemilikan tanah ini lebih dekat dengan pengertian membuka

---

<sup>2</sup> Biro Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. *Statistik daerah Istimewa Yogyakarta*. 1973, hlm. 26.

<sup>3</sup> Gatut Murniatmo et.al. *Pola penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1989, hlm. 128.

tanah atau membuka hutan.<sup>4</sup> Artinya pemilikan tanah *yasana* lebih banyak diperoleh melalui pembukaan tanah baru dari pada pembelian atau warisan. Di atas tanah *yasana* ini pemiliknya mempunyai hak sepenuhnya untuk menguasai dan mengusahakan produksi tanaman untuk kepentingan keluarganya sendiri.

Tanah komunal atau tanah desa sendiri terdiri dari (1). Tanah garapan yang disediakan untuk penduduk desa baik itu berupa tanah persawahan maupun tegalan, tanah yang disediakan untuk penduduk miskin ini sering disebut sebagai tanah *soksara*, (2). Tanah jabatan atau *lungguh* atau *bengkok*, yaitu sebagai imbalan gaji untuk pamong desa, (3). Tanah *pengarema-arema*, yaitu tanah imbalan untuk pamong desa yang sudah pensiun, (4). Tanah untuk kepentingan umum yaitu dapat berupa makam, tanah pengembalaan, dan lain-lain dan (5). Tanah kas desa, yaitu tanah yang disediakan untuk pembiayaan desa.<sup>5</sup>

Hak penguasaan tanah komunal ini dilakukan oleh kepala desa dengan persetujuan rapat desa bersama warganya. Selain itu masih ada jenis tanah komunal yang diberikan kepada penduduk desa dengan hak pakai yang diatur secara bergilir. Hak pakai atas tanah ini dapat diwariskan dan

---

<sup>4</sup> Machmoeh Effendhi, *Peluang Kerja dan keadaan Ekonomi Masyarakat Desa di Daerah kering: Kasus Gunungkidul (1969-1983)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Sastra UGM, 1993, hlm. 23.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

kewajiban yang sama seperti pendahulunya seperti membayar pajak, ronda malam, dan pekerjaan-pekerjaan desa lainnya. Di daerah pedesaan Gunungkidul tanah jenis ini disebut tanah pekulen yang dapat berupa sawah, tegal maupun perkarangan.

Sistem kepemilikan dan penguasaan tanah atau pelepasan hak atas tanah kepada orang lain secara tetap dapat diakibatkan karena warisan atau hibah dan jual beli. Sebagaimana tradisi pewarisan yang umum berlaku di Jawa. Proses ini dapat menimbulkan fragmentasi tanah kian lama kian mengecil. Begitu juga proses jual beli akan mengakibatkan munculnya akumulasi tanah dan mendesak pemilik tanah yang semakin mengecil menjadi barisan petani tidak bertanah. Selain pelepasan hak atas tanah secara tetap juga terdapat proses pelepasan hak penguasa atas tanah yang bersifat sementara, yakni melalui sistem sewa menyewa. Di daerah yang kurang subur seperti di daerah Gunungkidul, sistem sewa menyewa yang umum dilakukan adalah dengan cara sewa tahunan atau sering disebut *oyodan*.<sup>6</sup> Hak penyewa adalah penguasaan tanah sewaan dan mengusahakannya selama kurung waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pemilik tanah. Sedangkan, kewajiban penyewa adalah memberikan sejumlah uang kepada pemilik tanah dan setelah batas waktu sewa selesai, pemilik tanah tidak berkewajiban mengembalikan uang sewa atau uang bunga.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

Gambaran perubahan pemilik dan penguasaan tanah di Kabupaten Gunungkidul selama 15 tahun yakni dari tahun 1968 sampai 1983. Berdasarkan sensus pertanian 1968 dan 1983 dapat dilihat mengenai struktur penguasaan tanah di daerah Gunungkidul pada awal tahun 1970-an. Data menyebutkan banyaknya pertanian rakyat menurut golongan luas tanah di daerah ini semula pada tahun 1968 jumlah orang yang mengusahakan tanah 0,5 Ha baru 21.898 orang atau 21,57 persen pada tahun 1983 meningkat menjadi 65.201 orang atau 49,45 persen. Sementara itu jumlah orang yang menguasai tanah lebih dari 0,5 ha mengalami penurunan dari 78,43 persen menjadi 50,55 persen. Demikian pula pola pemilikan tanah dari 43,02 persen yang memiliki tanah kurang dari 0,5 ha pada tahun 1968 meningkat menjadi 55,77 persen pada tahun 1983, sedangkan yang memiliki tanah diatas 0,5 mengalami penurunan dari 56,98 persen menjadi 44,23 persen pada tahun 1983 untuk lebih jelasnya lihat gambaran (data terlampir).

Sistem kepemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan Gunungkidul memang sudah terjadi sejak sebelum Pelita I, selain dapat dijelaskan melalui sistem waris atau hibah, sistem sewa menyewa, sistem sakap menyakap, dan sistem jual beli juga dapat dijelaskan melalui perspektif kelembagaan lembaga kekerabatan tradisioanal atau sering disebut *trah* yang sampai akhir Pelita I masih dapat dilihat di beberapa pedesaan Gunungkidul. Beberapa desa di Gunungkidul menyebut kelompok kekerabatan ini sebagai kelompok *kasepuhan*. Kelompok *trah* atau *kasepuhan* merupakan anak keturunan dari

penguasa desa atau demang di desa mereka tempati. Umumnya mereka ini adalah pemilik tanah yang sangat luas dan secara kualitatif tanahnya subur dibandingkan dengan penduduk kebanyakan, serta mereka juga menguasai sumber-sumber ekonomis di desanya. Dengan demikian, tersedianya modal mereka mampu dengan leluasa menguasai banyak tanah baik itu dengan cara bagi hasil di atas tanah penduduk yang tidak mampu mengolahnya sendiri maupun dengan cara yang lain.

Dengan struktur agraria seperti itu, kita dapat mengatakan bahwa kondisi penguasaan tanah dan kepemilikan tanah di pedesaan Gunungkidul pada awal tahun 1970-an tidaklah jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa yakni sangat timpang. Kemungkinan besar keadaan lebih parah lagi karena tanah yang diusahakan petani sebagian besar merupakan tanah kering yang tandus dan tidak subur. Gambaran tersebut memang belumlah menjadi potret yang komprehensif mengenai struktur agraria di Gunungkidul karena itu tidak mencakup data mengenai tanah yang disewakan, dikontrakan dalam sistem penyangkap atau tanah yang dibagi hasil dan tidak menunjukkan bagian penduduk desa yang tidak memiliki tanah sama sekali. Di samping itu, daftar tanah di kantor-kantor pedesaan biasanya menunjukkan luas tanah milik rata-rata lebih tinggi dan jumlah pemilik lebih sedikit dari sesungguhnya.

Hal itu disebabkan tidak semua pemilik tanah disebutkan dalam daftar pemilik tanah, meskipun mereka semua dikenal oleh para anggota

masyarakat lainnya dan oleh pemerintah desanya.<sup>7</sup> Namun dari data yang sudah ada paling tidak kita bisa mendapatkan penjelasan tentang adanya penyempitan atau fragmentasi tanah di daerah Gunungkidul dimana sebagian besar pemilik tanah yang sedikit dan tanah tidak subur sehingga lahan pertanian itu dari segi ekonomis tidaklah mencapai standar kelayakan. Ada beberapa hal yang cenderung menjadi penyebab adanya fragmentasi tanah di daerah Gunungkidul yakni sistem pewarisan tanah yang telah disebutkan diatas. Dalam sistem ini orang tua meninggal maka tanah warisannya akan dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan keadaan luas tanahnya. Sistem itu mengakibatkan terbaginya tanah-tanah itu menjadi bagian yang kecil-kecil.

Realitas dalam tanah warisan itu karena jumlahnya tidak seberapa maka banyak ahli warisnya yang lebih suka menjualnya dari pada untuk mengembangkannya menjadi lahan pertanian yang produktif. Masalah kebutuhan akan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai modal usaha seringkali juga merupakan penyebab seseorang untuk menjual atau menggadaikan tanahnya ke orang lain. Misalnya seorang petani akan terpaksa mengontrakkan, menggadaikan atau menjual tanah mungkin karena kemampuan produksi yang rendah dari bidang tanahnya yang sempit atau untuk menompang kebutuhan ekonominya. Keadaan ini

---

<sup>7</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 184.

membuat petani itu tergantung pada pemilik tanah yang bersyarat atau berjanji hendak memenuhi kebutuhan itu. Seringkali para petani tersebut menggarap sendiri tanah yang sudah dijualnya ke orang lain (tuan tanah) sebagai petani penyangkap atau bagi hasil sehingga itu sebetulnya menurunkan statusnya menjadi petani yang hidupnya tergantung pada orang lain.<sup>8</sup>

Dalam proses fragmentasi tanah tersebut ada juga indikasi bahwa telah terjadi pemecahan tanah milik menjadi persil yang kecil-kecil. Tanah tertumpuk pada pemilik melalui pembelian, sistem lintah darat dan yang lebih penting lagi melalui berbagai transaksi yang cenderung memusatkan penguasaan atas tanah ke dalam tangan orang-orang kaya di desa atau di luar desa (*absente*) dan lebih cenderung ke arah pemidahan hak milik tanah.<sup>9</sup>

Mengenai nasib para petani yang tidak memiliki tanah pertanian baik sawah ataupun tanah kering jelas mengalami kesusahan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu sumber penghidupan yang paling realitis dilakukan adalah mengusahakan industri rumah tangga atau kerajinan tetapi kerana keterbatasan modal juga para petani tersebut tidak tertarik pada usaha itu dan kalau bekerja di situ sebagai tenaga kerja kasar. Praktis yang bisa dilakukan mereka adalah mengerjakan tanah orang lain atau tanah kas desa

---

<sup>8</sup> Fadjar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>9</sup> Margo L. Lyon, "Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa", dalam Sediono M.P Tjondronegoro et. al, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta: PT Gramedia-Yayasan Obor Indonesia, 1984 . hlm. 173.

(*tanah lungguh*). Dengan adanya sejumlah tanah yang sudah secara pasti dikerjakannya sepanjang tahun serta sambilannya dalam mengerjakan kerajinan tangan (industri rumah tangga) mereka sudah merasa aman dalam menyambung kehidupan ekonomi keluarga.

Dalam banyak hal sebagaimana terjadi di Gunungkidul kepemilikan tidak selalu mencerminkan penguasaan tanah. Karena, memang ada berbagai jalan untuk menguasai, misalnya melalui sewa, sakap, gadai dan sebagainya. Pemilik tanah luas biasanya tidak selalu menggarap tanahnya sendiri sebaliknya pemilik tanah sempit dapat pula menggarap tanah milik orang lain melalui sewa atau sakap disamping menggarap tanahnya sendiri. Dengan demikian penduduk pedesaan dapat di golongan menjadi:

- a. Pemilik penggarap murni yaitu petani yang menggarap tanahnya sendiri,
- b. Penyewa dan penyangkap murni yaitu mereka yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai tanah garapan melalui sewa dan atau bagi hasil,
- c. Pemilik penyewa dan atau pemilik penyangkap yaitu mereka yang disamping menggarap tanahnya sendiri juga menggarap tanah orang lain,
- d. Pemilik bukan penggarap,
- e. Tuna kisma mutlak yaitu mereka yang benar-benar tidak memiliki tanah garapan (sebagian besar adalah buruh tani dan hanya sebagian kecil saja yang pekerjaannya bukan petani).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, Dalam Tjondronegoro, *Ibid.*, hlm 302-303.

Dalam struktur agraria yang demikian terdeferensiasi penduduk pedesaan Gunungkidul seolah-olah terbagi menjadi kelas-kelas sosial yang didasarkan pada kepemilikan dan penguasaan tanah. Oleh karenanya diferensiasi itu semakin memperlebar jurang antara penduduk yang kaya yang merupakan pemilik tanah yang luas dengan penduduk desa yang miskin yang biasanya tidak memiliki tanah. Pejabat desa yang memiliki tanah *bengkok* atau *lungguh* dan petani yang memiliki lebih dari 5 hektar merupakan kelas sosial yang tinggi. Biasanya kehidupan ekonomi mereka jauh lebih baik dan serba kecukupan dari rata-rata kehidupan tetangganya seperti rumahnya cukup bagus (besar), perabotan rumahnya lengkap dan cukup mewah ternak sapi atau kambing yang banyak dan sebagainya.

Tanah pertanian dalam masyarakat pedesaan merupakan atau melambangkan status sosial. Pelapisan sosial tersebut terdiri dari:

1. Golongan elite desa, yaitu penguasa desa yang menguasai tanah *bengkok*, bersama golongan pemilik tanah *yaasan*,
2. Kuli *Kenceng*, mereka yang mempunyai rumah sendiri, perkarangan sendiri dan menguasai bagian sawah komunal,
3. Kuli *Kendho*, mereka yang mempunyai rumah dan pekarangan sendiri tetapi belum mempunyai bagian sawah,
4. Kuli *Gundhul*, mereka yang mempunyai tanah pertanian tetapi tidak memiliki rumah dan perkarangan,

5. *Magersari*, mereka yang tidak mempunyai tanah pertanian dan tidak mempunyai tanah perkarangan tetapi mempunyai rumah sendiri yang didirikan di atas perkarangan orang lain. Biasanya *megersari* ini melakukan pekerjaan sebagai buruh tani,
6. Golongan atau lapisan bawah adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai baik rumah, perkarangan dan tanah pertanian. Golongan ini disebut *mondhok*, *empok*, *bujang*, dan *tlosor*.<sup>11</sup>

Penduduk desa yang memiliki tanah, sawah, perkarangan, dan rumah mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari pada mereka yang tidak memiliki sawah tetapi memiliki tanah tegalan dan sebuah rumah beserta perkarangan. Di bawah kelompok ini ada penduduk yang hanya memiliki rumah dan sebidang tanah dan mereka berada dalam derajat yang lebih tinggi daripada mereka yang mendirikan rumah diatas tanah perkarangan orang lain. Sedangkan, kelompok yang terendah dari kesemuanya adalah mereka tidak memiliki tanah ataupun rumah tetapi hidup dengan cara mengontrak rumah orang lain. Konsekuensi logis dari pengelompokan kelas sosial yang berdasarkan pada pemilikan tanah dan penguasaan tanah tersebut adalah terjadinya polarisasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat desa yang cukup tajam. Hal ini di sebabkan karena distribusi dan kekayaan desa lebih banyak dipegang oleh kelas sosial atas, seperti: tuan tanah, petani kaya dan

---

<sup>11</sup> Gunawan Wirandi, "Dalam Kompas 25 Maret 1983", Dalam Gatut Murniatmo et. al, *op.cit.*, hlm. 93-94.

pejabat desa. Sedangkan kelas sosial dibawahnya seperti petani gurem, penyakap dan buruh tani hanya mendapatkan tetesan yang sedikit sehingga mereka tetap hidup di bawah garis kemiskinan.

## **B. Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (khususnya pangan).<sup>12</sup> Di pedesaan Jawa, orang menggunakan pula istilah cukup bagi mereka yang tidak termaksud miskin dan tidak cukup (kekurangan) bagi mereka benar-benar miskin. Terdapat beberapa kriteria atau pedoman yang telah digunakan oleh para ahli untuk melihat keadaan stratifikasi sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Masing-masing kriteria bersandar pada sekitar kemampuan petani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang tentu saja erat kaitannya dengan hasil pertaniannya. Kriteria-kriteri itu ada yang dinyatakan secara verbal maupun dengan ukuran angka Masri Singaribun dan D.H. Penny mengambil istilah “cukupan” yang tidak lazim digunakan oleh masyarakat jawa. “Cukupan” diartikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang secara wajar diperlukan oleh petani biasa.

Pada tahun 1970-an, seorang petani dikatakan “cukupan” jika ia mengolah tanah sawah tadah hujan seluas 0,7 hektar dan 0,3 hektar tanah

---

<sup>12</sup> Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 171.

perkarangan atas namanya sendiri dengan pendapatan sebesar 900 kg beras dan 300 kg setara beras dari hasil perkarangannya per keluarga per tahun.<sup>13</sup> Dengan demikian, 1,2 ton setara beras itu petani sudah dapat hidup berkecukupan dan apabila jumlah anggota keluarga rata-rata 4,5 orang jiwa maka penghasilan per kapita penduduk 267 kg beras per tahun. Sementara itu sepantasnya membuat batasan jumlah penghasilan yang diterima oleh petani per tahun untuk mengetahui seseorang dikatakan kaya atau miskin. Penduduk dikatakan sebagai orang miskin jika pendapatan per kapita per tahun kurang dari 320 kg setara beras dan penduduk yang miskin sekali apabila pendapatan per kapita per tahun kurang dari 240 kg setara beras.<sup>14</sup> Kedua ukuran pendapatan ekonomi rumah tangga petani seperti di atas dapat disetarakan dasar pengertiannya yaitu jumlah atau tingkat pengkonsumsi penduduk akan beras.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang struktural memiliki dimensi yang luas dan memerlukan penelitian yang menyeluruh atas berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga tidak bisa hanya diamati beberapa bulan saja. Oleh karena itu skripsi ini hanya memberi batasan pada kajian sosial ekonomi pada pedesaan Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten

---

<sup>13</sup> Masri Singarimbun dan D.H Penny, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1984, hlm, 42.

<sup>14</sup> D. H. Penny dan Meneth Ginting, *Perkarangan, Petani dan Kemiskinan: Suatu Studi Tentang Sifat dan Hakekat Masyarakat Tani di Sriharjo Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yayasan Agro Ekonomika, 1984, hlm. 15.

Gunungkidul pada masa itu masyarakat pedesaannya kebanyakan petani miskin. Daerah-daerah miskin disebabkan oleh faktor alam dan faktor pendidikan. Kondisi ini tidak dapat disangkal melihat jenis tanahnya yang kebanyakan berbukit-bukit karang atau batu kapur serta banyaknya telaga dan genangan air hujan, sedangkan pada musim kemarau penduduknya sangat kekurangan air. Penyebab kondisi kemiskinan salah satunya karena terbatasnya sumber daya air yang dibutuhkan penduduk untuk mandi, minum, dan pengairan sawah. Pada musim kemarau kebutuhan akan air penduduk tidak tercukupi. Sehingga, sebagian masyarakat membeli air atau kadang-kadang mendapatkan sumbangan air yang dialirkan melalui pompa.

Pendidikan pada masyarakat Gunungkidul secara umum masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat rendahnya tingkat pendidikan orang-orang dewasa yang ada pada masa itu seperti umumnya masyarakat pedesaan di Indonesia. Di Kabupaten Gunungkidul belum banyak orang memperoleh pendidikan yang cukup atau pendidikan yang formal. Secara tradisional masyarakat Gunungkidul telah mengenal pendidikan yang mempunyai kaitan dengan pembentukan kepribadian dan tata susila untuk hidup berdampingan dengan orang lain sehingga tercipta suatu hubungan antawarga yang harmonis. Pendidikan tradisional ini dimulai sejak orang masih kecil di dalam lingkungan keluarga sebagai bentuk sosialisasi dari anak.

Orang-orang yang tergolong dewasa di Kabupaten Gunungkidul belum banyak memperoleh pendidikan yang cukup. Banyak dari mereka yang hanya tamat SD, tidak menyelesaikan SD dan lebih banyak lagi yang buta huruf. Golongan anak-anak pun fasilitas pendidikan di Gunungkidul masih belum memadai. Pendidikan lanjutan atas hanya terdapat di ibukota kabupaten, yaitu Wonosari. Pendidikan lanjutan pertama selain di Wonosari terdapat pula di setiap kecamatan meskipun hanya satu di setiap kecamatan. Pendidikan SD sudah merata di setiap kelurahan dengan jumlah 1-2 buah di tiap-tiap kelurahan itu.

Karena rendahnya tingkat pendidikan bagi anak-anak di Gunungkidul ini ternyata hal itu sangat kompleks.<sup>15</sup> Hal ini disebabkan terbatasnya fasilitas yang ada dan lebih penting lagi tidak ada dorongan dari orang tua mereka untuk menimba ilmu dan tidak adanya suasana untuk terselenggaranya suatu proses dan kesempatan belajar bagi anak-anak mereka. Para orang tua tidak ingin anak-anak mereka menjadi pandai dan berwawasan luas. Bila anak mereka sudah dapat membaca, menulis dan berhitung secara sederhana hal itu dirasa cukup bagi para orang tua. Hal yang sangat ditanamkan bagi orang tua adalah kelak anak-anak mereka dapat menggantikan para orang tua untuk menjadi petani yang akan dapat mewarisi usaha taninya setelah mereka dewasa. Oleh karena itu, tidaklah

---

<sup>15</sup> Nur Aini setiawati, *Kemiskinan di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Periode 1970-1995*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Sastra UGM, 1996, hlm. 57.

mengerankan jika sejak kecil anak-anak sudah diajak untuk ikut membantu orang tua mereka di tegalan.

### C. Dampak Sosial dan Ekonomi

Faktor alam sangat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul. Keadaan tanah di sana yang tandus dan sering kekurangan air serta terbatasnya lahan pertanian rakyat yang memadai, telah membuat banyak petani hidup terombang-ambing oleh ketidakpastian terutama pada musim kemarau. Kemiskinan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup khususnya bahan pangan adalah fenomena yang umum dalam kehidupan ekonomi petani Gunungkidul pada masa Repelita I<sup>16</sup> untuk lebih jelasnya lihat gambaran (Data Terlampir).

Akibat dari tekanan penduduk yang meningkat atas sumber daya tanah yang terbatas dalam keadaan teknologi yang konstan, batas-batas penguasaan tanah diperluas ke daerah yang lebih marginal dan tenaga kerja yang diperkerjakan pada setiap unit tanah yang ditanami jumlahnya lebih besar sehingga biaya produksi pangan pun mengalami kenaikan. Dalam keadaan semacam itu pendapatan petani atau buruh tani serta penyangkap mengalami penurunan sampai batas minimum untuk hidup. Tingkat

---

<sup>16</sup> Surat Kepala Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta, *Prihal: Daerah-daerah Yang Secara Rutin setiap Tahun Kekurangan Bahan Makanan*. Yogyakarta, 10 Februari 1973.

pendapatan mereka nyaris tidak cukup untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang layak. Sementara itu surplus produksi lebih dinikmati oleh para petani kaya dan tuan tanah dalam bentuk kenaikan sewa tanah.<sup>17</sup>

Kecendurungan tersebut memang merupakan suatu fenomena yang sangat umum di daerah pedesaan Jawa. Petani gurem yang luas tanahnya dibawah 0,5 hektar merupakan lapisan petani marginal yang jauh tertinggal, antara lain kerana kurangnya modal serta ketidakmampuannya melepaskan diri dari ikatan sebagian besar petani lapisan atas. Termasuk dalam golongan ini adalah lapisan buruh tani dan (setengah) *proletar* di pedesaan yang terutama bergantung pada kerja menjadi buruh upahan atau beragam usaha tani lainnya yang bermodal kecil.<sup>18</sup> Golongan ini tidak pula dimasukkan kedalam golongan petani yang berdiri sendiri yang dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dalam program intensifikasi pemerintah.

Kondisi sosial ekonomi petani dengan demikian diperburuk oleh beberapa faktor. Pertama, tanah menjadi bagian-bagian kecil yang ditimbulkan oleh hak waris tanah Jawa yang cenderung untuk meningkatkan pemusatan kepemilikan tanah di tangan tani kaya atau tuan tanah. Kedua, faktor yang berjalan seiring dengan proses di atas adalah meningkatnya pengangguran di daerah pedesaan yang mengakibatkan tekanan ekonomi

---

<sup>17</sup> Fadjar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>18</sup> Akira Nagazumi, *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986, hlm. 23.

luar biasa dan kemelaratan di desa. Ketiga, proses monetisasi melalui proses-proses modernisasi teknologi yang mengakibatkan petani terjerumus kedalam pusaran hutang. Keempat, semua jenis usaha pembangunan mengakibatkan polarisasi di desa-desa yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.<sup>19</sup>

Gejala memburuknya penghidupan sosial ekonomi petani, khususnya dalam hal mengkonsumsi bahan pangan juga harus ditinjau sebagai akibat dari keadaan dimana warga yang sedikit banyaknya tergantung pada penghasilan uang telah menjadi semakin miskin. Jumlah mereka telah meningkat dengan pasti pada tahun 1970-an yang menyebabkan meningkatnya permintaan atas bahan pangan pengganti yang bernilai rendah seperti *gaplek*, *bulgur*, *mil*, dan sebagainya. Meningkatnya permintaan ini sampai tidak terkejar oleh peningkatan produksi pertanian. Keberadaan golongan orang-orang yang keadaan pangannya memperhatikan inilah terutama padi di musim kemarau dan paceklik mendorong pemerintah mengambil tindakan-tindakan tertentu seperti memberi bantuan pangan.

Mereka yang dibantu adalah termasuk petani yang tidak memiliki tanah dan sering juga petani pemilik tanah yang sempit yang luas perkarangannya dan tanah garapannya tidak memadai serta tidak menghasilkan sama sekali untuk priode waktu tertentu. Sehingga, penghasilan mereka dari hasil panen

---

<sup>19</sup> Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 114.

atau dari kredit telah habis digunakan sebelum panen baru tiba.<sup>20</sup> Keadaan seperti itu menyebabkan penurunan daya beli petani miskin akibat sangat rendahnya pendapatan serta tingginya harga bahan pangan yang menyebabkan timbulnya masalah pangan yang gawat. Keadaan pendapat yang sangat rendah dan ketersediaan bahan pangan yang minim itu hanya bisa diringankan dalam saat genting oleh bantuan masyarakat yang tertanam dalam strata sosial tradisional.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa paceklik tingkat pendapatan banyak orang berada pada nilai-nilai yang kritis demikian halnya bagi harga-harga sarana produksi dan ekonomi pasar. Dalam keadaan seperti itu persaingan meningkat tajam dan mengakibatkan pendapatan dan harga-harga memakai nilai-nilai numerik yang ekstrem. Akibatnya, kekuatan yang besar dari potensi pasar selama keadaan kelaparan tidak dapat dihindari lagi menuju ke arah perubahan yang bersifat mundur seperti melemahnya fungsi sosial masyarakat.<sup>21</sup> Dalam kondisi untuk mempertahankan diri para petani yang mengalami pemiskinan dan kelaparan berusaha menjual ternaknya (lembu), tanah ataupun perabotan lainnya. Tidak jarang juga mereka sudah tidak menghasilkan apa-apa lagi serta tidak memiliki apa-apa lagi untuk di jual.

---

<sup>20</sup> Egbert de Vries, *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, 1985, hlm. 38.

<sup>21</sup> D. H. Penny dan Meneth Ginting, *op.cit*, hlm. 12-13.

Daerah pedesaan di Gunungkidul telah menjadi kecenderungan umum bahwa angka kematian terkait dengan ketidak tersedianya pangan. Angka kematian yang disebabkan oleh ketidadaan pangan meningkat dengan tajam pada tahun-tahun 1970-an. Menurut Penny, kematian yang diakibatkan oleh kelaparan akan terjadi satu titik dimana pendapatan riil menjadi sangat rendah, sehingga penghidupan tidak mungkin lagi dipertahankan. Di dalam teori, pendapatan dan konsumsi dapat digambarkan baik dalam bentuk fisik maupun uang. Sudah jelas bahwa apabila pendapatan seseorang sudah tidak lagi mencukupi untuk hidup, ia akan tergantung pada uluran bantuan materi dari pemerintahan pada dari berbagai tingkatan baik pusat, daerah maupun desa serta dari sejumlah sumber lain seperti anggota keluarga. Pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mungkin juga digantikan dengan uang yang diperoleh dari penjualan harta kekayaan (apa pun bentuknya) atau dengan cara meminjam dari rentenir.

Adanya kegiatan pasarisasi, maka petani dapat membeli dan mengkonsumsi hasil produksi (komoditas) yang dihasilkan oleh orang lain. Hal ini berarti dalam proses pasarisasi (yang sehat) derajat saling ketergantungan (*interdependensi*) antar manusia meningkat dan menurut ekonomi pasar si penjual dan si pembeli akan saling ketergantungan.<sup>22</sup> Atau lebih sederhananya, kegiatan ekonomi menjadi lebih komersial apabila orang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

atau keluarga mulai tergantung pada pasar, yaitu pada pertukaran barang dan jasa yang mereka miliki untuk memperoleh uang yang kemudian dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan.

Jika keadaan ekonomi yang dimaksudkan proses pasarisasi itu sesuai dengan teori pasar, maka adanya faktor-faktor pembangunan pertanian. Misalnya program intensifikasi pertanian dan terbukanya pasar sampai ke daerah pedesaan. Seharusnya membawa petani kejenjang kemakmuran yang lebih baik. Dengan kata lain, kalau teori pasar terwujud pada tataran konkret sudah seharusnya ada peningkatan pendapatan ekonomi petani. Akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kebanyakan petani justru lebih miskin setelah proses pasarisasi berlangsung. Disebabkan oleh karena petani komersial, yakni petani kaya dan tuan tanah yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berlebihan, sehingga lebih diuntungkan oleh sistem pasar. Akibat dari sistem pasarisasi itu, dengan demikian bukannya mendorong keadaan ke arah kemakmuran. Melainkan sebaliknya, proses pasarisasi telah memperluas dan memperdalam kemiskinan bagi mayoritas penduduk pedesaan.<sup>23</sup>

Dampak yang jauh dari sistem pasar pada pertengahan tahun 1970-an diguncang oleh krisis pangan yang diakibatkan oleh kemarau yang panjang.

---

<sup>23</sup> Fajar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 63.

Krisis pangan ini menunjukkan kenaikan harga secara terus-menerus. Kenaikan harga secara umum melanda segala jenis barang, mulai harga pangan, pakaian sampai bahan-bahan pertanian. Dengan demikian tingkat penghidupan ekonomi mayoritas penduduk desa menjadi lebih buruk dan miskin.

Hampir sebagian besar petani pedesaan tidak cukup mampu membeli bahan pangan, khususnya beras dan jagung. Pada saat-saat tertentu, mereka bahkan tidak sanggup mengkonsumsi bahan pangan pengganti yang kualitas dan nilai gizinya lebih rendah seperti *gaplek*, *bulgur* dan *mil*.<sup>24</sup> Ketidakmampuan mereka membeli bahan pangan itulah yang menyebabkan terjadinya kelaparan dan mewabahnya penyakit Hongeroedem (HO)<sup>25</sup> di daerah Gunungkidul pada tahun 1970-an. Berikut ini daftar penderita Honger Oedeem di Kabupaten Gunungkidul ( Data Terlampir ).

Selanjutnya dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan Gunungkidul kita tidak bisa mengabaikan peran tengkulak, pengijon dan tuan tanah yang cukup besar. Misalnya peran tengkulak pengijon baik besar maupun kecil memegang peran yang sangat penting sekali dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Sementara tuan tanah

---

<sup>24</sup> Rina Widiastuti, *Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul (1969-1990-AN)*. Yogyakarta: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah FIB UGM, 2011, hlm. 39.

<sup>25</sup> Biro Statistik D.I.Y, *Yogyakarta dalam trend Statistik 1972-1978*. 1972, hlm.2.

memegang peran penting dalam penguasaan aset-aset produksi pertanian. Mengenai keadaan tengkulak di daerah Gunungkidul kita dapat melihat cara kerja mereka dalam mendapatkan dan mendistribusikan bahan pangan.

Sebagaimana diketahui bahwa daerah produksi pertanian disana amat menyebar dan petani perorangan biasanya hanya menjual hasil produksinya dalam jumlah yang kecil-kecil. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk mengumpulkan, menyotir dan mengangkut ke kota untuk di jual ke konsumen. Selain itu pekerjaan tengkulak yang lainnya adalah melakukan pembelian pada saat panen dan melakukan penjualan pada saat tidak ada panen lagi sehingga, ia sebetulnya menstabilkan harga. Pada waktu panen ia membantu menghindari jatuhnya harga dengan membelinya dan pada waktu paceklik ia membantu menghambat kecenderungan naiknya harga melalui operasi penjualannya. Namun demikian, yang harus diingat bahwa tujuan operasi jual belinya adalah mencari keuntungan sehingga, biasanya ia selalu berusaha membeli semurah-murahnya dari petani lalu dijualnya kembali dengan harga yang setinggi-tingginya.<sup>26</sup>

Kemudian yang menjadi khas dari sikap para petani-penjual yang berorientasi pada kebutuhan adalah tidak adanya minat mereka untuk mengetahui kemana hasil-hasil produksi dibawa oleh tengkulak dan untuk

---

<sup>26</sup> Mubyarto, *op. cit.*, hlm. 156-157.

apa barang-barang tersebut digunakan di daerah-daerah diluar jangkauan.<sup>27</sup> Tujuan utama menjual produksi mereka adalah untuk mendapatkan uang bukan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya para tengkulak melakukan jual beli hasil bumi dari desa untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya kerana, itu mereka berusaha mengetahui faktual harga pasar yang lebih baik. Pengetahuan mereka yang lebih luas akan situasi pasar membuat kedudukan mereka lebih kuat berhadapan dengan petani penjual. Lagipula keterbatasan alat pengangkutan telah mempersempit pasaran kaum tani dan dalam banyak hal para tengkulak memegang monopoli pembelian yang sesungguhnya di daerah-daerah pedesaan tertentu.<sup>28</sup>

Asal usul para tengkulak di daerah Gunungkidul kemungkinan besar sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda, ketika sistem ekonomi pasar dan komersialisasi berkembang serta mempengaruhi kehidupan ekonomi pedesaan yang subsisten. Perlu diketahui juga bahwa di desa-desa para tengkulak tidak selalu pedagang kuat sebagaimana yang dilakukan para pedagang Cina, tetapi banyak diantara mereka bahkan termasuk pedagang gurem yang miskin. Tengkulak ini pada umumnya bukanlah orang asing tetapi para petani banyak dari mereka adalah sebagai warga desa dan ada

---

<sup>27</sup> Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 201.

<sup>28</sup> *Ibid.*

juga termasuk keluarga sendiri.<sup>29</sup> Harus diingat bahwa di kalangan para tengkulak sendiri, juga terjadi persaingan yang cukup tajam dalam mendapatkan daerah operasinya. Tengkulak-tengkulak dari kalangan etnis Cina yang mempunyai modal besar biasanya lebih dominan.

Kegiatan dalam proses penjualan hasil-hasil produksi pertanian di daerah Gunungkidul dikenal juga praktek ijon. Dalam praktek ini, para pedagang perantara membayar uang muka atau memberikan persekot pada hasil panen yang masih hijau di sawah. Karena hasil produksi dibeli pada saat tanaman masih hijau atau belum waktunya panen maka harganya lebih murah atau rendah dibandingkan harga panen yang sesungguhnya. Perbedaan harga panen dan harga ijon inilah yang pada dasarnya merupakan bunga yang harus dibayar oleh petani. Para petani harus membayar yang tingkatannya biasanya sangat tinggi dapat mencapai 50 persen bahkan lebih hanya dalam waktu 2-3 bulan.<sup>30</sup> Dengan demikian jelas bahwa sistem ijon ini sangatlah merugikan petani serta lebih menguntungkan pengijon. Sistem ijon dalam kehidupan petani dapat dikatakan merupakan lingkaran setan yang tidak bisa diputuskan begitu saja.

Ciri-ciri kredit ijon adalah yang biasanya diinginkan oleh penduduk pedesaan, yaitu mudah, cepat, dan tepat walaupun syarat murah tidak

---

<sup>29</sup> Mubyarto, *op.cit.*, hlm. 159.

<sup>30</sup> Fajar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 54.

terpenuhi.<sup>31</sup> Ternyata murah atau mahal nya kredit tidaklah ditentukan oleh besarnya bunga yang akhirnya dibayar oleh peminjam tetapi lebih ditentukan oleh dapat tidaknya atau mampu tidaknya bunga tersebut dibayar kembali. Misalnya pada kasus penjualan buah-buahan lima bulan sebelum panen. Dengan menjual buah yang masih dipohon ini, petani terhindar sama sekali dari resiko pencurian dan kegagalan lain. Di samping terhindar dari kewajiban sosial untuk membagi hasil panen pada sanak saudara.

Para pengijon memerlukan “bisnis” dan para petani pada saat paceklik menjelang panen biasanya sudah kehabisan uang tunai sama sekali untuk memenuhi kebutuhan berbagai keperluan konsumsi sehari-hari. Tidak jarang petani juga dihadapkan pada keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif dan sebenarnya dapat ditunda seperti pengadaan selamatan, perkawinan dan upacara ritual lainnya. Praktek ini terutama berlangsung di kalangan petani yang lebih miskin, yang kebutuhan uangnya sudah kronis.<sup>32</sup> Semua itu merupakan sebab-sebab para petani lari menuju jerat yang dipasang oleh para kaum pengijon. Seperti halnya tengkulak, pengijon biasanya adalah orang-orang kota yang mempunyai modal besar, meskipun ada juga pengijon yang berasal dari suatu desa seperti petani kaya atau tuan tanah. Dalam hubungan-hubungan sosial dan produksi keberadaan para pengijon tidak

---

<sup>31</sup> Mubyarto, *op.cit.*, hlm. 158.

<sup>32</sup> Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 197.

dipandang sebagai suatu persoalan oleh penduduk desa meskipun secara objektif dan ekonomis sistem ini sangat merugikan para petani. Dasar pertimbangan petani bukanlah bersifat ekonomis tetapi soal sosial meskipun kadangkala merupakan kebutuhan yang datangnya mendesak.

Satu lagi elemen yang mempunyai peran penting dalam sektor ekonomi pedesaan adalah golongan tuan tanah. Kelas tuan tanah menjadi begitu besar perannya dalam ekonomi pedesaan karena aset yang dipunyainya. Beberapa aset tersebut meliputi modal, baik yang berupa uang maupun barang (perhiasan, tanah, alat produksi, dan sebagainya) yang tidak dimiliki oleh golongan masyarakat di bawahnya. Posisi ekonomis para tuan tanah yang lebih baik daripada anggota masyarakat lainya inilah yang membawanya berada di lapisan atas struktur sosial. Sedangkan para petani gurem, penyangkap dan buruh tani karena kehidupannya yang pas-pasan serba kekurangan serta memiliki ketergantungan yang besar pada kelas tuan tanah. Sehingga, mereka berada pada lapisan terbawah struktur sosial-ekonomi masyarakat desa.

Peran kelas tuan tanah dalam proses eksploitasi ekonomi di daerah pedesaan dapat kita kaji dari hubungan-hubungan sosial produksi yang dilakukannya.<sup>33</sup> Dengan modal yang dimilikinya para tuan tanah dapat menyewa tenaga orang lain untuk mengolah tanahnya dengan baik, membeli

---

<sup>33</sup> Fajar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 56.

bibit unggul dan pupuk buatan serta membeli air untuk mengalir sawahnya secara teratur. Semua itu memungkinkan mereka mampu menghasilkan tanaman pertanian (bahan pangan) secara lebih baik. Selain hasilnya dijual dan sisanya disimpan sebagai hasil persediaan di musim paceklik.

Selain itu, istilah tuan tanah menunjuk pada setiap orang yang dapat mengeksploitasi perjanjian kerja dan memonopoli produksi pertanian. Sehingga istilah ini tidak saja mencakup mereka yang memiliki tanah relatif yang luas yang meperkerjakan orang lain dan atau menyewa tanah kepada penyewa dan sub penyewa. Tetapi, juga mereka yang mencakup mereka yang tanpa memperhitungkan luas tanah yang benar-benar mereka miliki dan mempunyai cukup modal untuk menguasai tanah orang lain. Mereka juga menarik hipotek atas tanaman dan tanahnya serta mereka yang bertindak sebagai perantara dalam sistem hipotek tanaman.<sup>34</sup>

Dari gambaran tersebut cukup jelas bahwa kelas tuan tanah bisa dikatakan sebagai petani yang komersil. Kerena mereka mau mengeluarkan uang untuk pemasukan tenaga buruh dan meningkatkan produksi pertanian demi keuntungan yang besar serta mengakumulasi modal melalui cara-cara yang lain. Dengan demikian kedudukan yang kuat itu para tuan tanah berhasil pula mengadopsi program intensifikasi pertanian secara lebih maksimal. Di samping itu ada juga di antara para tuan tanah yang sekaligus

---

<sup>34</sup> Margo L. Lyon, "Dasar-Dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa", Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro *et.al*, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta: Pt. Gramedia-Yayasan Obor Indonesia, 1984, hlm 174-175.

memainkan peran sebagai pedagang perantara (tengkulak) atau pengijon, sehingga mereka benar-benar mendominasi kehidupan sosial dan perekonomian desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul dapat dilihat dari tata guna tanah atau penggunaan tanah oleh petani. Penggunaan tanah oleh petani tidak hanya terbatas pada satu macam tanah saja apabila dilihat dari letak tanahnya. Terdapat tiga macam tanah yang dapat diusahakan oleh petani yaitu tanah perkarangan, tanah tegalan, dan tanah lereng bukit atau lereng gunung. Gelombang Revolusi Hijau yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an ternyata tidak pilih kasih. Artinya, ia tidak saja melanda daerah-daerah yang relatif subur seperti daerah persawahan tetapi juga melanda daerah-daerah lahan kering yang secara potensial miskin. Begitu juga di Daerah Gunungkidul yang sebagian besar tanahnya berupa lahan kering mendapat terpaan gelombang Revolusi Hijau melalui program-program pembangunan yang masuk ke daerah itu. Terdorong oleh masalah dilematis yakni apabila pembangunan pertanian dilaksanakan dengan titik penekanan pada peningkatan produksi pertanian, kerusakan tanah yang semakin parah akibat erosi tidak dapat dihindarkan. Demikian juga, sebaliknya apabila pembangunan pertanian ditekankan pada penanggulangan erosi berarti akan mengundang kelaparan, maka pembangunan pedesaan di daerah ini dilakukan secara seimbang dan serasi.

Revolusi Hijau di satu pihak telah berhasil meningkatkan produksi beras tetapi di pihak lain telah menimbulkan pembagian keuntungan yang tidak merata dan dampak-dampak sosial ekonomi pada masyarakat pedesaan yang timbulnya gejala stratifikasi sosial. Kesejahteraan petani miskin dan buruh tani tak bertumbuh tetap mandek atau bisa diperbaiki pada tingkat yang sangat lambat. Revolusi Hijau lebih menguntungkan petani kaya daripada petani miskin. Karena, petani kaya lebih mampu memperbaiki nasibnya berdasarkan aset tanah dan modal yang dimilikinya dibandingkan petani kecil, petani kaya dapat menanggung resiko gagal panen yang diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor yang tidak dikuasai petani kecil dan petani kaya dapat memperbesar produksinya dengan cara menyewa walaupun tidak menimbulkan akumulasi kepemilikan tanah tetapi menimbulkan akumulasi penguasaan tanah.

Rendahnya produktivitas padi di Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan hasil tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Pengembangan tanaman padi sulit dilakukan di Kabupaten Gunungkidul karena, *Pertama*, sulitnya sumber air untuk keperluan pertanian, khususnya pada musim kemarau, air yang diharapkan adalah air hujan, sehingga musim tanam tergantung pada curah hujan. *Kedua*, kondisi tanah yang dapat ditanami padi hanya 6.080 Ha berupa sawah dan tegal 84.907 Ha. *Ketiga*, tidak cocoknya sebagian besar tanah untuk ditanami padi karena jenis tanah yang berbukit-bukit dan berupa tanah kapur.

Lembaga pemilikan tanah di pedesaan Gunungkidul dibedakan menjadi dua bentuk kepemilikan, yakni pemilikan perorangan atau individu dan pemilikan komunal atau tanah desa. Sistem kepemilikan dan penguasaan tanah atau pelepasan hak atas tanah kepada orang lain secara tetap dapat diakibatkan karena warisan atau hibah dan jual beli. Penguasaan tanah dan kepemilikan tanah di pedesaan Gunungkidul pada awal tahun 1970-an tidaklah jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa yakni sangat timpang. Kemungkinan besar keadaan lebih parah lagi karena tanah yang diusahakan petani sebagian besar merupakan tanah kering yang tandus dan tidak subur.

Kabupaten Gunungkidul pada masa itu masyarakat pedesaannya kebanyakan petani miskin. Daerah-daerah miskin disebabkan oleh faktor alam dan faktor pendidikan. Kondisi ini tidak dapat disangkal melihat jenis tanahnya yang kebanyakan berbukit-bukit karang atau batu kapur serta banyaknya telaga dan genangan air hujan, sedangkan pada musim kemarau penduduknya sangat kekurangan air. Penyebab kondisi kemiskinan salah satunya karena terbatasnya sumber daya air yang dibutuhkan penduduk untuk mandi, minum, dan pengairan sawah. Pada musim kemarau kebutuhan akan air penduduk tidak tercukupi. Sehingga, sebagian masyarakat membeli air atau kadang-kadang mendapatkan sumbangan air yang dialirkan melalui pompa.

Pendidikan pada masyarakat Gunungkidul secara umum masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat rendahnya tingkat pendidikan orang-orang dewasa yang ada pada masa itu seperti umumnya masyarakat pedesaan di Indonesia. Di

Kabupaten Gunungkidul belum banyak orang memperoleh pendidikan yang cukup atau pendidikan yang formal. Secara tradisional masyarakat Gunungkidul telah mengenal pendidikan yang mempunyai kaitan dengan pembentukan kepribadian dan tata susila untuk hidup berdampingan dengan orang lain sehingga tercipta suatu hubungan antawarga yang harmonis. Pendidikan tradisional ini dimulai sejak orang masih kecil di dalam lingkungan keluarga sebagai bentuk sosialisasi dari anak.

Karena rendahnya tingkat pendidikan bagi anak-anak di Gunungkidul ini ternyata hal itu sangat kompleks. Hal ini disebabkan terbatasnya fasilitas yang ada dan lebih penting lagi tidak ada dorongan dari orang tua mereka untuk menimba ilmu dan tidak adanya suasana untuk terselenggaranya suatu proses dan kesempatan belajar bagi anak-anak mereka. Para orang tua tidak ingin anak-anak mereka menjadi pandai dan berwawasan luas. Bila anak mereka sudah dapat membaca, menulis dan berhitung secara sederhana hal itu dirasa cukup bagi para orang tua. Hal yang sangat ditanamkan bagi orang tua adalah kelak anak-anak mereka dapat menggantikan para orang tua untuk menjadi petani yang akan dapat mewarisi usaha taninya setelah mereka dewasa. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sejak kecil anak-anak sudah diajak untuk ikut membantu orang tua mereka di tegalan.

Kondisi sosial ekonomi petani diperburuk oleh beberapa faktor. Pertama, tanah menjadi bagian-bagian kecil yang ditimbulkan oleh hak waris tanah Jawa yang cenderung untuk meningkatkan pemusatan kepemilikan tanah di tangan tani

kaya atau tuan tanah. Kedua, faktor yang berjalan seiring dengan proses di atas adalah meningkatnya pengangguran di daerah pedesaan yang mengakibatkan tekanan ekonomi luar biasa dan kemelaratan di desa. Ketiga, proses monetisasi melalui proses-proses modernisasi teknologi yang mengakibatkan petani terjerumus kedalam pusaran hutang. Keempat, semua jenis usaha pembangunan mengakibatkan polarisasi di desa-desa yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Sumber Arsip Surat Menteri Pertanian no. 193/mentan/V/1971 kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia, *Prihal: Pemberitaan Usaha-usaha Pembangunan* (Djakarta, 26 Mei 1971).

Sumber Arsip Kepala Daerah Gunungkidul no. Eko/ 634/ II/ e/ 6968/ 71 kepada P.N. Pertani kesatuan Pemasaran D.I.U, *Prihal: tentang meyediakan Pupuk UREA untuk M.H. 1971/1972* (Wonosari, 11 Oktober 1971).

Sumber Arsip Surat kepala Daerah DIY No. K. 346/IV/B/Kwt/73 kepada menteri dalam Negeri, *Prihal: tentang laporan Daerah-daerah yang secara rutin setiap tahun kekurangan bahan makanan di Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, dan Kab. Sleman* (Yogyakarta, 10 februari 1973).

Sumber Arsip Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul NO. Eko/ 141/ IV/ d/ 779/ 73/ Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY. *Prihal: tentang data-data daerah yang secara rutin kekurangan pangan secara serius dan rencana untuk mengatasinya* ( Wonosari, 31 Januari 1973).

Sumber Arsip Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, *Prihal: Penyediaan Gudang Paceklik* (Wonosari, 12 februari 1973).

Sumber Arsip Surat Kepala Harian Kepada Ketua Badan Pembina Bimas D.I.Y di Yogyakarta, *Prihal: Kekurangan Pupuk*. Wonosari (22 Desember 1973).

Sumber Arsip Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada Dinas Pertanian dan Camat se- kab. Gunungkidul, *Prihal: Tentang Usaha-usaha Menanggulangi Panceklik Tahun 1973-1974 di Gunungkidul* (Wonosari, 1 Januari 1973).

Sumber Arsip Surat Inspektur/Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada S.P. wakil kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, *Prihal: Dropping Pupuk ke Gunungkidul*. Yogyakarta (16 Februari 1974).

Sumber Arsip Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K2733/ I/ A/ 75, Laporan Bupati Kepala Daerah Bantul dan Gunungkidul, *Prihal: tentang Pemanfaatan Sumur Pompa* (Yogyakarta, 1 Juli 1975).

## Buku

- Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. (2011), *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Andreas Maryoto. (2009). *Jejak Pangan: Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan*. Jakarta: Kompas.
- Arifin Hutabarat (1974). *Usaha Mengatasi Krisis Beras*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers.
- Bambang Tri. Cahyo (1983). *Masalah Petani Gurem*. Yogyakarta: Liberty
- Biro Statistis DIY.(1973). *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta: Bagian I*.
- Biro Statistik Kabupaten Gunung Kidul. *Kabupaten Gunung Kidul Tingkat II: Gunung Kidul Dalam Angka Tahun 1980*. Yogyakarta: Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik.
- Fajar Pratikto. (2000). *Gerakan Rakyat Kelaparan. Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Francois, Ruf and Frederic Lancon. 2005. "From Slash and Burn to Replanting: Green Revolution in the Indonesia Uplands" a.b. Yoddang. *Dari Sistem Tebang Bakar ke Peremajaan Kembali: Revolusi Hijau di Dataran Tinggi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gagasan Perhepi. (1982). *Mengatasi Masalah Petani Gurem dan buruh Tani di Jawa*. Jakarta: Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia.
- Gatut Murniatmo et.at. (1989). *Pola penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.
- Gottscalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*, ( penerjemah Nugroho Notosusanto), cet. IV, Jakarta: UI-Press.
- Hasan Sadly. (1984). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Helius Sjamsuddin. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Jurusan Pendidikan Sejarah. (2006), *Pedoman Penelisan Tugas Akhir Skiripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.

Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Penduduk Gunung Kidul. Yogyakarta: Hasil Sensus Penduduk 1961, 1971, dan 1980. 1983. Dilengkapi Hasil sensus Over All 1969.*

Koentjaraningrat. (1972). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

\_\_\_\_\_ (1984). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*, (cet. IV). Yogyakarta: Bentang Budaya.

Loekman Soetrisno. (1998). *Pertanian Pada Abad ke 21*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mubyarto. (1983). *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.

Nagazumi, Akira. (1986). *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Noer Fauzi dan Khrisna Ghimire. (2001). *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Penny, D. H dan Meneth Ginting. (1984). *Perkarangan, Petani dan kemiskinan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press dan Yayasan Agro-Ekonomi.

Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_. (1984). *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.

Selo Soemardjan. (1986). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suhartono W Pranoto. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Singarimbun, Masri dan D.H. Penny. (1984) *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Suhartono. (1991). *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1820-1830*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tjondronegoro, S.M.P dan G. Wiradi. (1984). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Bhatara.

Vries, Egbert de. (1985). *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia.

### **Skripsi**

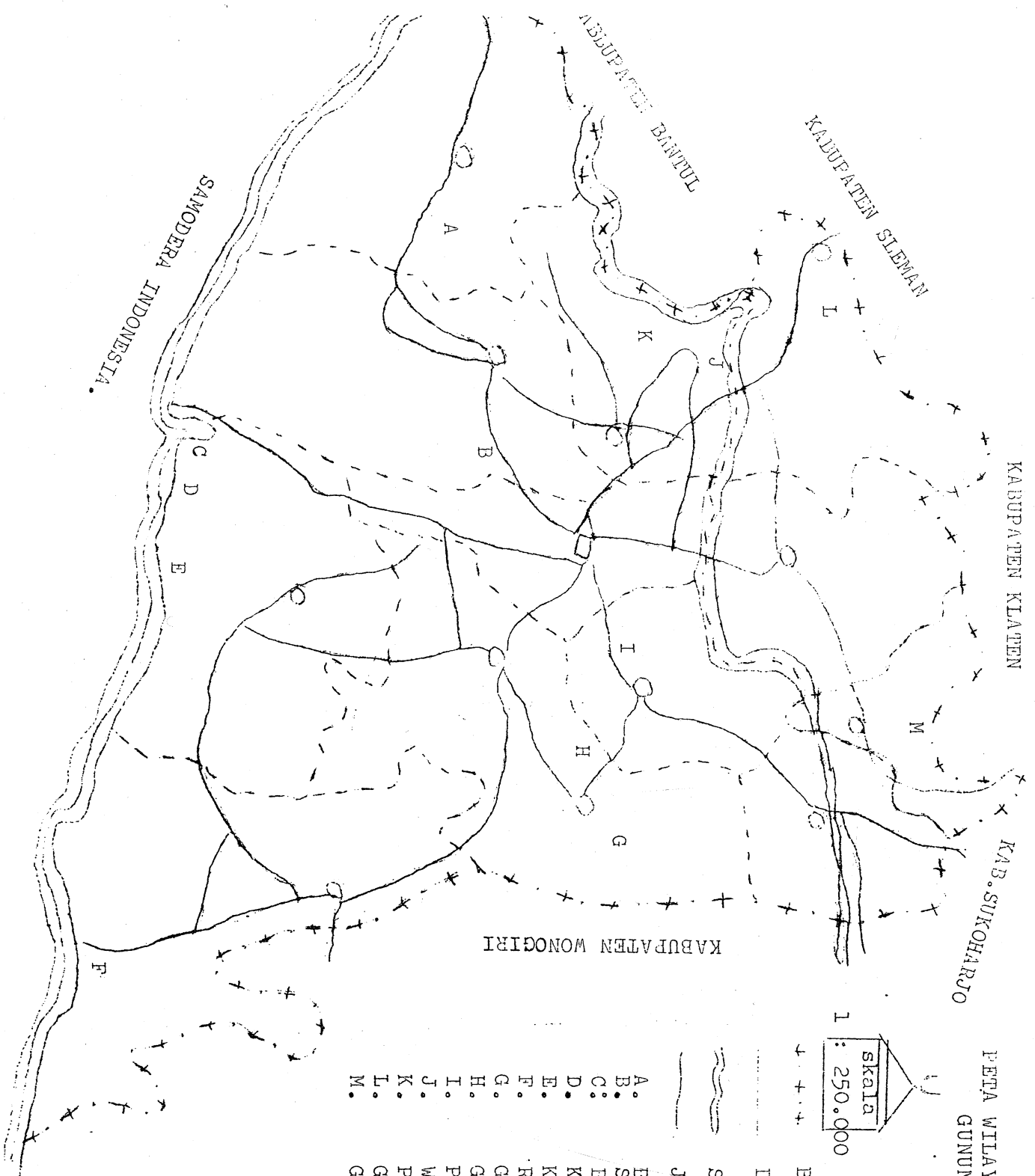
Machmoed Effendhi. (1993). *Peluang Kerja dan Keadan Ekonomi Masyarakat Desa di Daerah Kering: Kasus Gunungkidul*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.

Nur Aini Setiawati. (1996). *Kemiskinan di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Periode 1970-1995*. Laporan Penelitian Fakultas Sastra UGM.

Rina Widiastuti. (2011). *Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul (1969-1990-AN)*. Skripsi. Yogyakarta. Jurusan Ilmu Sejarah. FIB UGM.

**LAMPIRAN**

PETA WILAYAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL.



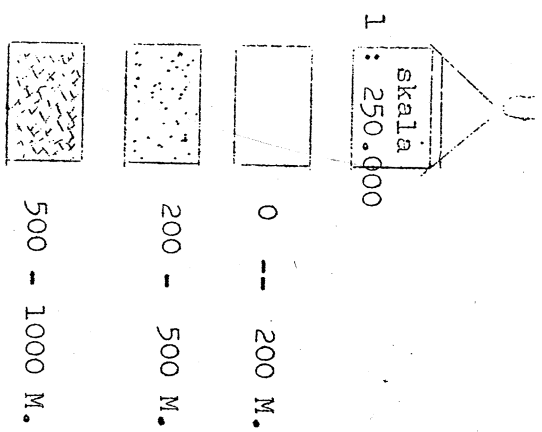
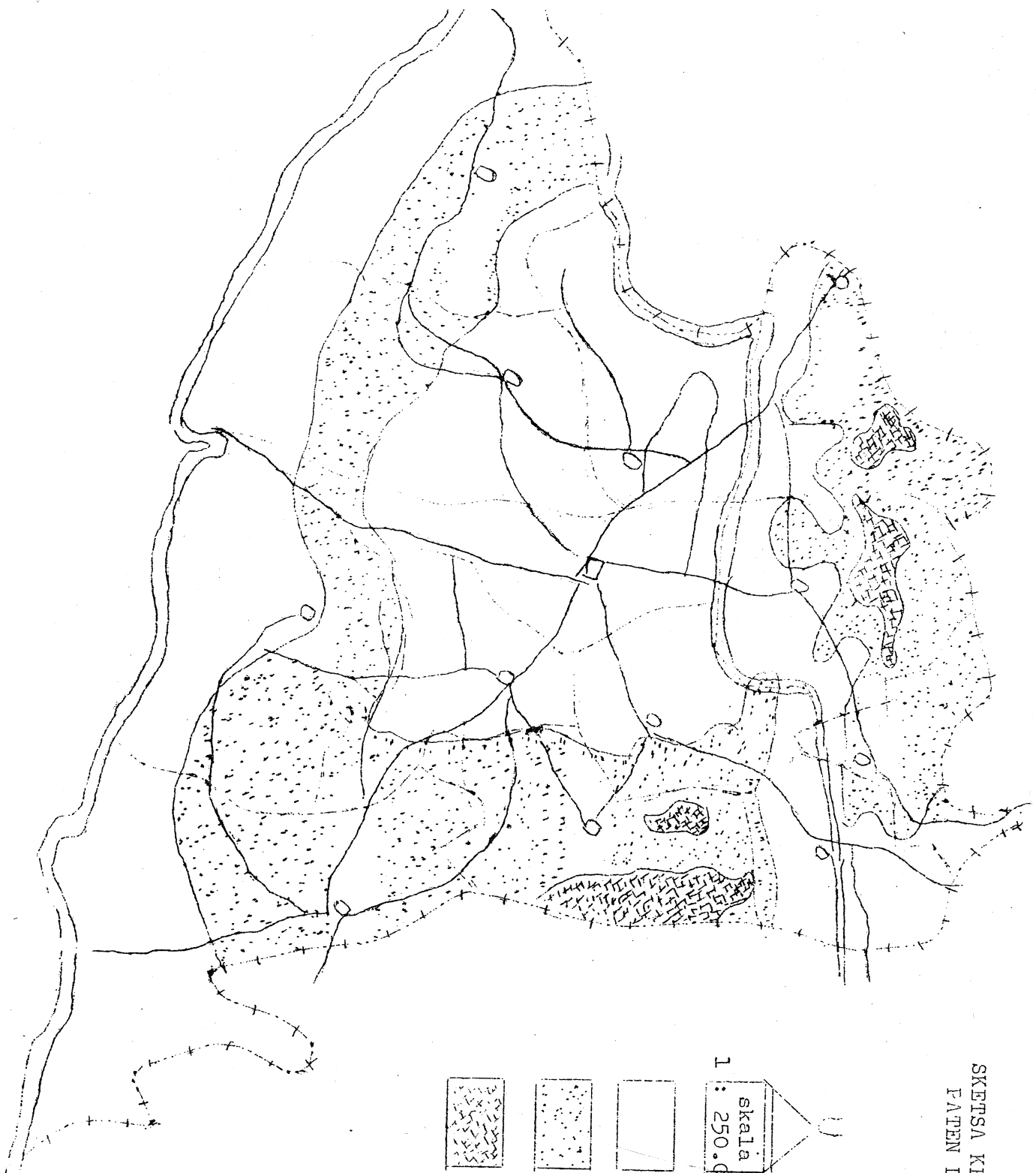
- A. Banglampir
- B. Sodo
- C. Baron
- D. Krakal
- E. Rongkop (Sarangburung)
- F. Guwalawa
- G. Gelaran
- H. Pusat Pengolahan mete.
- I. Gunung Kendil
- J. Gunung Gamber
- K.
- L.
- M.

Batas Kabupaten  
Batas Kecamatan

Sungai

Jalan

SKETSA KETINGGIAN TANAH DI KABU-  
PATEN DAERAH TK. II GN. KIDUL.



Lampiran

Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga

Per Kecamatan Tahun 1961, 1971 dan 1980

Kecamatan	Luas Kecamatan Km <sup>2</sup>	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga		
		1961	1971	1980	1961	1971	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Panggang	171,56	45.009	48.091	47.984	8.207	8.946	9.582
2. Paliyan	145,90	53.065	55.952	60.139	10.409	11.088	13.022
3. Tepus	176,54	50.183	54.763	59.587	9.710	10.290	12.231
4. Rongkop	178,03	48.175	51.833	52.935	9.199	9.846	11.302
5. Semanu	108,39	42.933	45.199	49.177	8.801	9.364	10.484
6. Ponjong	104,49	45.021	48.070	51.237	8.889	9.170	10.423
7. Karangmojo	80,12	46.365	49.754	52.135	9.304	9.872	11.199
8. Wonosari	75,51	48.443	56.642	65.474	9.609	11.089	13.207
9. Playen	109,25	45.204	49.123	52.269	9.483	10.057	11.502
10. Patuk	100,99	37.904	39.651	42.615	8.131	8.131	9.251
11. Nglipar	103,04	38.225	41.845	44.466	8.290	8.565	9.526
12. Ngawen	53,54	28.399	31.683	33.422	5.910	8.581	7.423
13. Semin	77,77	42.907	47.479	48.046	8.724	8.905	10.023
Jumlah	1.485,13	571.833	620.085	659.486	114.675	122.173	139.175

Lampiran

Rata-rata Banyaknya Penduduk dan Rumah Tangga Per Desa

Diperinci Per Kecamatan 1961, 1971,1980

Kabupaten : Gunungkidul

Kecamatan	Jumlah Desa	Rata-rata Penduduk			Rata-rata Rumah Tangga		
		1961	1971	1980	1961	1971	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Panggang	11	4.092	4.372	4.362	746	813	871
2. Paliyan	14	3.790	3.997	4.296	744	192	930
3. Tepus	10	5.018	5.476	5.959	971	1.029	1.223
4. Rongkop	16	3.011	3.240	3.308	575	615	706
5. Semanu	5	8.587	9.040	9.835	1.760	1.873	2.097
6. Ponjong	11	4.093	4.370	4.658	809	834	948
7. Karangmojo	9	5.152	5.528	5.793	1.034	1.097	1.244
8. Wonosari	14	3.460	4.046	4.677	686	792	943
9. Playen	13	3.477	3.779	4.021	729	774	885
10. Patuk	14	2.707	2.832	3.044	581	594	661
11. Nglipar	10	3.822	4.184	4.447	829	866	953
12. Ngawen	7	4.057	4.526	4.775	844	940	1.060
13. Semin	10	4.291	4.728	4.805	872	890	1.002
Jumlah	144	3.971	4.306	4.580	796	848	966

## Lampiran

### Luas Geografi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1973

No	Kodya/ Kebupaten	Luas Tanah Milik rakyat/ Hak Milik								Luas Tanah Lunggug Pangaremarem dan Kas desa							
		Sawah		Tegal		Perkarangan		Jumlah		Sawah		Tegal		Perkarangan		Jumlah	
		Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>
1	Kodya Yogyakarta	467	0.000	77	0.000	1.308	0.000	2.032	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Bantul	14.342	1.789	6.258	2.614	17.554	3.783	38.154	8.186	3.852	8.356	988	1.357	17	6.635	4.858	6.348
3	Kab. Kolon Progo	8.942	5.475	9.750	3.604	28.730	8.276	47.423	7.356	2.479	8.546	631	6.939	33	7.605	3.145	3.090
4	Kab. Gunung Kidul	6.080	9.180	84.907	5.483	23.426	4.222	114.414	8.885	1.110	8.800	10.710	3.880	7	3.272	11.828	5.952
5	Kab. Sleman	21.599	4.116	4.895	3.019	15.229	2.334	41.723	9.469	6.178	3.597	1.759	7.974	37	8.770	7.976	0.341
D.I.Y		51.612	0.558	105.888	4.720	86.248	8.618	234.749	3.896	13.621	9.299	14.090	0.150	96	6.282	27.808	5.731
%		16		33		27		76		4		5		-		9	

Lanjutan Lampiran

No	Kodya/ Kebupaten	Luas Tanah Bekas RVO		Luas Tanah Hutan		Luas Tanah Lain- lain		Luas Daerah			Penduduk Akhir Tahun 1973	Kepadatan Tiap-tiap Km <sup>2</sup>	Keterangan
		Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>				
1	Kodya Yogyakarta	9	7.825	-	-	1.108	2.175	3.250	0.000	1	335.857	10.888	1. Sumber Direktorat Aggraria 2. Kotamadya Sumber Kantor Urusan Tanah. 3. Untuk RVO Sumber Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah.
2	Kab. Bantul	6	5.588	918	4.000	6.746	5.878	50.685	0.000	16	581.822	1.148	
3	Kab. Kolon Progo	3	1.330	1.045	4.000	7.006	4.224	58.624	0.000	18	382.457	652	
4	Kab. Gunung Kidul	0	1.829	14.412	8.565	7.879	4.706	148.536	0.000	47	636.212	428	
5	Kab. Sleman	51	7.941	1.545	0.000	6.185	2.276	57.482	0.000	18	600.197	1.044	
D.I.Y		71	4.549	171.921	6.565	28.925	9.259	318.577	0.000	100	2.554.545	802	
%				6		9		100					

# Lampiran

## Perkembangan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 1964 S/D 1973

Tahun		Penduduk Kepala Keluarga Pada Awal Tahun			Penduduk/Kepala Keluarga Pada Akhir Tahun			Tambah/Kurang			Prosentase Tambah/Kurang		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1964	a	286.466	292.008	578.474	281.818	289.883	571.701	-4.648	-2.125	-6.773	-1,62	-0,72	-1,17
	b	85.637	19.371	105.008	85.571	19.351	104.922	-66	-20	-86	-0,07	-0,10	-0,17
1965	a	281.818	289.883	571.701	283.950	291.527	575.477	2.132	1.644	3.776	0,75	0,56	0,66
	b	85.571	19.488	105.059	85.703	19.488	105.191	132	137	269	0,15	0,70	0,25
1966	a	283.950	291.527	575.477	286.734	294.929	581.663	2.784	3.402	6.186	0,98	1,16	1.07
	b	85.703	19.488	105.191	86.115	19.642	105.757	412	154	566	0,48	0,79	0,53
1967	a	286.734	294.929	581.663	292.990	301.822	594.812	6.256	6.893	13.149	2,18	2,33	2,26
	b	86.115	19.642	105.757	86.466	19.816	106.282	351	174	525	0,40	0,88	0,49
1968	a	292.990	301.822	594.812	297.077	306.607	603.684	4.087	4.785	8.872	1,39	1,58	1,49
	b	86.466	19.816	106.282	86.855	19.627	106.482	389	-189	200	0,48	-0,95	0,18
1969	a	297.077	306.607	603.684	299.998	310.810	610.808	2.921	4.203	7.124	0,98	2,37	2,18
	b	86.855	19.627	106.482	87.406	19.724	107.130	551	97	648	1,63	1,49	1,61
1970	a	299.998	310.810	610.808	304.138	315.088	619.226	4.140	4.278	8.418	1,38	1,37	1,37
	b	87.406	19.724	107.130	88.514	19.688	108.202	1.108	-36	1.072	1,26	-0,18	1,00
1971	a	304.138	315.088	619.226	307.106	317.791	624.897	2.968	2.703	5.671	0,98	0,86	0,92
	b	88.514	19.688	108.202	93.402	20.335	113.737	4.888	700	5.588	5,52	3,55	5,16
1972	a	307.106	317.791	624.897	310.117	321.193	631.310	3.011	3.402	6.413	0,98	1,07	1,03
	b	93.402	20.335	113.737	94.447	20.017	114.464	1.045	-318	727	1,12	-1,56	0,64
1973	a	310.117	321.193	631.310	321.320	323.892	645.212	2.203	2.899	5.102	0,71	0,84	0,77
	b	94.447	20.017	114.464	94.677	20.100	114.777	233	80	313	0,25	0,39	0,27

Keterangan: 1. Sumber: Laporan Bulanan Menurut Daftar F dari Kabupaten Gunungkidul.

2. a = Jiwa, b = Kepala Keluarga

## Lampiran

### Harga Produksi Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta Per Pertengahan Bulan Tahun 1969

Bulan	Beras					Djagung					Ketela Pohon				
	Kody a	Sleman	Kl. Pg	Bantul	Gn. Kd	Kody a	Slema n	Kl. Pg	Bantul	Gn. Kd	Kody a	Slema n	Kl. Pg	Bantu l	Gn. Kd
Januari	32,-	29,-	30,-	30,-	37,50,-	12,-	15,-	20,-	22,-	9,-	5,-	6,-	7,5,-	6,-	6,50,-
Februari	30,-	29,-	30,-	29,-	35,-	12,-	11,50,-	20,-	22,-	12,50,-	6,-	4,50,-	10,-	6,-	-
Maret	28,-	29,-	27,-	29,-	32,50,-	12,-	17,50,-	20,-	14,-	12,50,-	6,-	5,-	5,-	6,25,-	-
April	30,-	26,-	26,-	27,-	30,-	17,-	20,-	20,-	17,-	15,-	6,-	7,-	6,-	5,-	-
Mei	28,-	24,-	25,-	28,-	31,25,-	-	19,-	20,-	25,-	15,-	6,-	4,-	15,-	5,-	-
Djuni	30,-	26,50,-	28,-	28,-	30,-	18,-	18,-	22,50,-	26,-	20,-	6,-	6,50,-	6,-	6,-	-
Djuli	31,-	29,50,-	28,50,-	29,-	32,50,-	18,-	22,50,-	22,50,-	28,-	20,-	7,-	6,-	5,50,-	6,-	-
Agustus	37,-	36,-	36,-	38,-	45,-	18,-	30,-	24,-	27,-	20,-	9,-	7,-	5,-	7,-	-
September	41,-	39,50,-	39,-	37,50,-	50,-	24,-	30,-	24,-	22,50,-	25,-	9,-	7,-	6,-	6,50,-	-
Oktober	48,-	44,-	42,50,-	46,-	44,-	30,-	35,-	32,50,-	25,-	30,-	9,-	7,50,-	7,50,-	10,-	-
November	50,-	46,50,-	52,50,-	50,-	52,50,-	30,-	35,-	37,-	32,50,-	24,-	10,-	8,-	9,-	11,-	-
Desember	50,-	47,50,-	52,-	51,50,-	52,50,-	30,-	20,-	32,-	27.50,-	30,-	9,-	8,-	7,-	10,-	-

Lanjutan Lampiran

Bulan	Ketela Rambat					Katjang Tanah					Kedelai				
	Kodya	Sleman	Kl. Pg	Bantul	Gn. Kd	Kodya	Sleman	Kl.pg	Bantul	Gn.Kd	Kodya	Sleman	Kl. Pg	Bantul	Gn. Kd
Januari	5,-	5,-	10,-	5,50,-	-	50,-	25,-	27,50,-	33,-	35,-	45,-	48,-	50,-	42,-	-
Februari	6,-	3,-	5,-	5,50,-	-	50,-	20,-	25,-	35,-	40,-	45,-	50,-	37,-	45,-	59,-
Maret	6,-	4,-	-	6,-	-	60,-	20,-	15,-	35,-	27,50,-	50,-	45,-	54,-	60,-	60,-
April	6,-	-	5,-	5,-	-	60,-	18,75,-	20,-	35,-	35,-	45,-	55,-	140,-	60,-	60,-
Mei	6,-	4,-	-	5,-	-	60,-	-	20,-	34,-	20,-	55,-	55,-	130,-	56,-	47,-
Djuni	9,	6,-	5,-	6,-	-	60,-	-	25,-	50,-	33,-	58,-	65,-	62,50,-	58,-	55,-
Djuli	7,-	6,-	6,50,-	6,-	-	60,-	-	20,-	57,-	45,-	54,-	45,-	63,-	57,-	62,50,-
Agustus	9,-	6,50,-	6,-	6,-	-	60,-	20,-	32,50,-	50,-	45,-	54,-	41,-	50,-	42,-	63,-
September	9,-	6,-	8,-	6,-	-	60,-	35,-	31,-	50,-	40,-	54,-	45,-	53,-	51,50,-	62,50,-
Oktober	9,-	6,-	5,-	8,-	-	60,-	35,-	31,-	32,50,-	50,-	54,-	46,-	53,-	56,-	57,50,-
November	10,-	7,50,-	11,50,-	10,-	-	60,-	50,-	34,-	42,50,-	59,-	55,-	50,-	55,-	52,50,-	67,50,-
Desember	9,-	7,50,-	9,50,-	8,50,-	-	60,-	45,-	37,-	40,-	-	55,-	50,-	66,-	47,50,-	65,-

Lampiran

Keadaan Tanah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 1973

No	Nama Kecamatan	Luas Tanah Milik rakyat/ Hak Milik								Luas Tanah Lunggug Pangaremarem dan Kas Desa							
		Sawah		Tegal		Perkarangan		Jumlah		Sawah		Tegal		Perkarangan		Jumlah	
		Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>
1	Wonosari	30	4.300	4.293	0.143	1.767	5.337	6.090	9.780	0.	4.700	558	9.375	0	1.165	559	5.240
2	Paliyan	49	6.530	9.039	0.935	1.565	6.906	10.654	4.371	13	9.250	916	9.350	0	1.994	931	0.594
3	Panggang	140	3.645	12.120	0.115	990	3.705	13.250	7.465	64	6.925	581	1.950	0	2.970	646	1.845
4	Playen	137	0.235	3.444	5.685	1.878	7.100	5.460	3.020	52	4.760	491	5.180	0	6.120	544	6.060
5	Patuk	1.419	9.705	4.183	4.715	2.620	6.985	8.224	1.405	204	3.600	166	5.800	0	3.600	371	3.000
6	Nglipar	1.193	9.365	3.662	8.615	2.209	4.307	7.066	2.287	189	1.565	123	6.475	0	9.698	313	7.738
7	Karangmojo	126	8.035	3.014	9.640	3.089	0.455	6.230	8.130	52	5.165	451	6.820	0	7.015	504	9.000
8	Semin	1.379	1.755	3.903	3.590	2.011	9.635	7.294	4.980	169	8.755	79	5.710	0	2.350	249	6.815
9	Ponjong	407	3.590	6.513	2.970	1.895	8.685	8.816	5.245	109	0.550	898	3.035	-	3.700	1.007	7.285
10	Semanu	10	1.750	6.462	9.130	1.889	8.237	8.362	9.117	7	4.950	924	3.290	0	1.300	931	9.540
11	Tepus	62	4.625	13.877	7.635	1.159	3.480	15.099	5.740	28	7.125	1.949	6.730	0	0.315	1.978	9.750
12	Rongkop	18	6.700	12.296	7.840	903	3.015	13.218	7.555	-	-	3.239	2.425	1	9.085	3.240	2.740
13	Ngawen	1.104	8.945	2.095	4.470	1.444	6.375	4.644	9.790	218	1.455	328	7.740	1	7.150	584	6.345
	Jumlah	6.080	9.180	84.907	5.483	23.426	4.222	114.414	8.885	1.110	8.800	10.710	3.880	7	3.272	11.828	5.952

Lanjutan Lampiran

No	Nama Kecamatan	Luas Tanah Bekas RVO		Luas Tanah Hutan		Luas Tanah Lain-lain		Luas Daerah		Keterangan
		Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	Ha	M <sup>2</sup>	
1	Wonosari	0	1.892	512	0.050	423	3.038	7.586	0.000	Sumber dari Direktorat Agraria
2	Paliyan	-	-	2.841	4.920	539	0.115	14.966	0.000	
3	Panggang	-	-	2.496	5.945	464	4.745	16.958	0.000	
4	Playen	-	-	3.801	5.000	719	5.920	10.526	0.000	
5	Patuk	-	-	692	8.000	809	7.595	10.098	0.000	
6	Nglipar	-	-	2.141	6.000	449	3.975	9.971	0.000	
7	Karangmojo	-	-	930	4.000	449	8.870	8.116	0.000	
8	Semin	-	-	84	5.000	461	3.205	8.090	0.000	
9	Ponjong	-	-	-	-	624	7.470	10.449	0.000	
10	Semanu	-	-	607	7.925	983	3.418	10.886	0.000	
11	Tepus	-	-	49	3.250	584	1.260	17.260	0.000	
12	Rongkop	-	-	254	8.475	622	1.230	17.336	0.000	
13	Ngawen	-	-	-	-	748	3.862	5.942	0.000	
	Jumlah	0	1.892	14.412	8.565	8.879	4.706	148.536	0.000	



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

Ag. No. M3575/II/1971

Tgl. 10/7/71 19 71

Nomor : 193/Mentan/V/1971.  
Lamp. :  
Perihal : Pemberitaan usaha2  
Pembangunan.

Djakarta, 26 Mei 1971.

Kepada Jth.  
Sdr. Gubernur/Kepala Daerah  
Propinsi seluruh Indonesia

Sebagai-mana telah dimaklumi oleh Saudara2 para Gubernur, salah satu dari kuntji berhasilnya pembangunan di Tanah Air kita ialah adanya saluran penerangan yang baik kepada Rakyat tentang proses dan kemajuan usaha2 pembangunan. Pemberitaan mengenai hal2 tersebut sebagian besar disiarkan lewat pers dan radio, sedang sebagian ketjil lewat T.V. Tujuan dari pemberitaan ini ialah membina dinamika dan gairah untuk membangun dan berusaha memperbesar pengertian/partisipasi Rakyat.

Untuk dapat meningkatkan tertjapainya tujuan tersebut diatas, kami mengharap kesediaan para Kepala Dinas dan PN-PN bidang Pertanian diwilayah Saudara untuk mengirimkan berita perkembangan Usaha2 pembangunan pertanian sekurang-kurangnya sekali sebulan, dengan terlebih dahulu diberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dari Saudara. Setelah disaring dan dilah seperlunya, kami akan menyiarkannya melalui berbagai mass media di Pusat maupun di Daerah. Penjaringan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan timbulnya salah penafsiran dan pengertian masyarakat.

Berita2 tersebut dapat dikirimkan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Pertanian, Jalan Imam Bondjol 29 Djakarta.

Atas bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih.

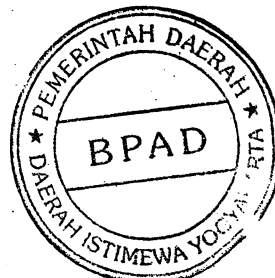


Menteri Pertanian

Prof. Dr Ir Tojib Hadiwidjaja ).

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Dinas bidang Pertanian Dati I seluruh Indonesia;
3. PN-PN bidang Pertanian seluruh Indonesia.



**TURUNAN :**

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA.**

**-/Wtj.**

**Nomor : 193/Mentan/V/1971.**

**Djakarta, 26 Mei 1971.**

**Lamp. :**

**Perihal : Pemberitaan usaha2  
Pembangunan.-**  
-----

**Kepada Jth.**

**Sdr. Gubernur/Kepala Daerah**

**Propinsi Seluruh Indonesia.**  
-----

Sebagai-mana telah dimaklumi oleh Saudara2 para Gubernur salah satu dari kuntji berhasilnja pembangunan di Tanah Air kita ialah adanya saluran penerangan yang baik kepada Rakjat tentang proses dan kemadjuan usaha2 pembangunan. Pemberitaan mengenai hal2 tersebut sebagian besar disiarkan lewat pers dan radio sedang sebagian ketjil lewat T.V. Tudjuan dari pemberitaan ini ialah membina dinamika dan gairah untuk membangun dan berusaha memperbesar pengertian/partisipasi Rakjat.

Untuk dapat meningkatkan tertjapainja tudjuan tersebut diatas, kami mengharap kesediaan para Kepala Dinas dan PN-PN bidang Pertanian diwilajah Saudara untuk mengirimkan berita perkembangan Usaha2 pembangunan pertanian sekurang-kurangnya sekali sebulan, dengan terlebih dahulu diberikan petunjuk-petunjuk seperlunja dari Saudara. Setelah disaring dan dilah seperlunja, kami akan menjiarkannya melalui berbagai mass media di Pusat maupun di Daerah. Penjaringan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan timbulnja salah penafsiran dan pengertian masjarakat.

Berita2 tersebut dapat dikirimkan kepada Kepala Biro Hubungan Masjarakat Departemen Pertanian, djalan Imam Bondjol 29 Djakarta.

Atas bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnja kami mengutjapkan diperbanyak terima kasih.

**Menteri Pertanian.**

**ttd.**

**Tembusan :**

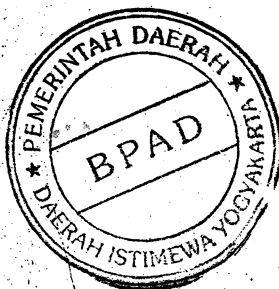
**( Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwidjaja ).-**

- 1. Menteri Dalam Negeri ;**
- 2. Kepala Dinas bidang Pertanian  
Dati I seluruh Indonesia ;**
- 3. P.N.-M.N. bidang Pertanian  
seluruh Indonesia .**

**Turunan sesuai dengan aslinja.**

**Sekretariat Pemerintah Daerah D.I.J.**

**Kepala Urusan Arsip,**



**( Sastrowirjoseetjipto ).-**

KEPALA DAERAH

DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

===== W =====

No.

:

K 1078/II/A/2

Lamp. : 1.

Hal

:

Pemberitaan Usaha 2  
Pembangunan.-

Jogjakarta, 22 Djuli - 1971.

5/11

K e p a d a

Jth. Kepala Perwakilan Departemen Pertanian  
Daerah Istimewa Jogjakarta.  
d/a. Dinas Kehutanan D.I.J.S e g e r a .

Bersama ini dikirimkan turunan surat Menteri Pertanian ttg. 26 Mei 1971 No. 193/Mentan/V/1971 perihal seperti tersebut diatas, dengan pengharapan agar Saudara teruskan kepada jbs untuk ditjukupi seperlunja.

Kemudian menunggu keterangan.

Kepala Daerah

Daerah Istimewa Jogjakarta

Sekretaris Daerah I, d.



(Moeljono Moeliadi S.H.)

+1078/II/A/2

4  
22-7-71

Ag. No. 1605/2/3/71  
Tgl. 15/10/71

Nomor : 240/634/II/c/6968/71

Perihal : Pengedaran Pupuk UREA  
untuk M.H. 1971/1972.-

**K E P A D A :**

Jth. : Kepala P.N. Pertani  
Kesatuan Pemasaran D.I.J.  
d/n. Djl. A. M. Sangadji 19  
di -  
J O G J A K A R T A.-

Berhubung mengingat hal sebagai berikut :

1. Musim Rendengan 1971 / 1972 sudah sangat dekat, dimana para petani di Kabupaten Gunung Kidul menggunakan pupuk UREA bulan Nopember '71.
2. Pengalaman Rendengan 1969 / 1970 dan 1970 / 1971 kebutuhan pupuk UREA di Kabupaten Gunung Kidul  $\pm$  1.200 ton.
3. Berdasarkan target areal Bapel Bimas Kabupaten Gunung Kidul untuk Rendengan 1971 / 1972 = 10.000 Ha. berarti membutuhkan 1.000 ton pupuk UREA.
4. Bahwa sampai saat ini ( tanggal 11 Oktober 1971 ) belum ada penyalur pupuk swasta yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Gunung Kidul ; sedang berdasarkan laporan Stock pupuk P.N. Pertani SUB. Kesatuan Pemasaran Gunung Kidul sebagai berikut :

- Pupuk T. S. P. :  $\pm$  90 tpn;

- Pupuk U R E A :  $\pm$  135 ton ;

Sehingga dengan demikian untuk daerah Kabupaten Gunung Kidul masih membutuhkan dropping / tambahan  $\pm$  865 ton pupuk UREA untuk Bimas Rendengan 1971 / 1972.

Oleh karena itu bersama ini kami mohon dengan sangat agar dapat ditukupi kebutuhan pupuk UREA untuk daerah Kabupaten Gunung Kidul demi suksesnya Bimas M.H. 1971 / 1972.

Demikian atas perhatian Saudara kami mengutjakan banjak2 terima kasih.-

Wonosari, 11 Oktober 1971.

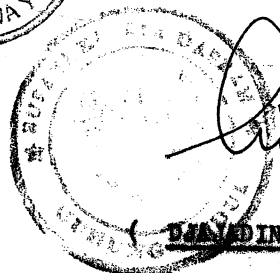
Bupati Kepala Daerah Daerah  
Tingkat II Kab. Gunung Kidul



Tembusan :

Dimohon bantuannja kepada Jth. :

- ✓ 1. Kepala Daerah Tk. I D.I.J. ;
2. Inspektur Bapel Bimas Tk. I. D.I.J. ;
3. Dinas Pertanian Rakjat D.I.J. ;
4. Bapel Bimas Tk. II Kab. Gn. Kidul ;
5. Diperta Kabupaten Gunung Kidul ;
6. A r s i p.-
7. P.N. Pertani Sub. Kes. Pemas. G. Kidul



( DEJADININGRAT B.A. )

BUPATI KEPALA DAERAH  
GUNUNGKIDUL

Wonosari, 1 Januari 1973.

Nomer : Eko/14/11/121778/73.  
Lamp. : ---  
Hal : Usaha-2 menanggulangi  
paceklik Th.1973-1974.  
-----

Kepada

1. Yth. Sdr. Camat se-  
Kab. Gunungkidul.
  2. Yth. Sdr. Kepala Diperta  
Kab. Gunungkidul.
- 

Dengan ini kami permaklumkan, bahwa paceklik th.1973-1974 diduga akan lebih parah dari pada th.1972-1973. Sebabnya sebagai berikut :

1. Musim hujan th.1972 - 1973 yang mulainya kasip diduga akan berhenti lebih awal dari waktu yang sebetulnya dan diduga, bahwa musim hujan th. 1973 - 1974 datangnya akan lebih lambat lagi dari pada musim hujan th.1972 - 1973, sehingga akan terjadi musim kemarau yang panjang.
2. Berdasarkan penelitian stempat-2 oleh Dinas Pertanian D.I.Y. bersama-sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul tanaman-2 yang nampak baik adalah didaerah Kecamatan Patuk, Nglipar, Ngawen, Semin, yang jumlah luas tanaman tidak seberapa, sedangkan didaerah yang lebih luas lagi misalnya : Tepus, Rongkop, Paliyan, dan sebagian Panggang keadaan tanamannya sebagian besar jelek, bahkan tanaman ketela pohon hampir sama sekali tidak tumbuh. Adapun daerah Kecamatan Karangmojo, Wonosari, Playen, Semanu, dan Ponjong keadaan tanamannya nampak sedang. Oleh karena itu kami mengharap agar rakyat dianjurkan dalam musim mareng yang akan datang supaya menanam tanaman pengganti gaplek yang dapat dipanen pada akhir mareng yaitu sejenis "cantel" dan ketela rambat.
3. Lain dari pada itu juga supaya menanam jenis polo kependem yang lain misalnya : gembili, gembolo, uwi, suweg, ganyong garut, benguk, jenis koro-2an dll. Juga supaya diusahakan menanam ketela pohon pada musim mareng di Gunung dengan cara memotong ketela pohon yang bercabang dua atau tiga yang diperkirakan dapat dipanen pada musim mareng 1974.
4. Kami mengharap ada perhatian yang sungguh-2 dari Saudara Camat dan Saudara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul untuk segera mengusahakan biji dan bibitnya guna mensukseskan usaha-2 menanggulangi paceklik tahun 1973 - 1974. Selanjutnya kami minta laporan realisasi dari pada hal tersebut diatas.
5. Demikian agar maklum dan diindahkan seperlunya.

Bupati Kepala Daerah  
Gunungkidul,

t.t.d.

Tindakan dikirim kepada Yth. :

1. S.P. Kepala Daerah D.I.Y.
  2. Pimpinan D.P.R.D. Kabupaten  
Gunungkidul.
  3. A r s i p .
- 

( DJOJODININGRAT B.A. ).

Jang ambilturunan

YOGYAKARTA, 1 Juli  
-April- 1975.

Nomor : K-2733/I/A/75

Lampiran : —

Perihal : Pemanfaatan sumur  
Pompa.

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah

Kabupaten :

1. Bantul.

2. Gunungkidul.

Berkaitan dengan surat laporan Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul tertanggal, 19 -Juli- 1974 No.: 5775/Sekr/Da/74 dan laporan Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 28 -Oktober- 1974 No.: Eko/134/II/c/8123/74, perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini dipernakutkan bahwa penempatan sumur pompa dalam operasi percobaan jangka pendek oleh Departemen P.U.T.L. ex. Direktorat Jendral Pengairan baik dipedukukan Gunung Kalurahan Flered Kecamatan Gondokusung Kabupaten Bantul maupun di Baron Kabupaten Gunungkidul untuk eksplorasi air tanah keperluan pertanian telah menunjukkan hasil yang memuaskan, maka dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penempatan sumur pompa tersebut adalah dalam rangka eksplorasi pemanfaatan air tanah untuk keperluan usaha pertanian, yang telah melampui masa percobaannya (trial-run) dengan hasil baik, maka perlu dikembangkan lebih lanjut.

Dalam hal ini Departemen P.U.T.L. ex. Direktorat Jendral Pengairan akan terus membiayai eksploitasi dan pemeliharaan sumur pompa diatas selama 2 (dua) tahun sebagai masa peralihan, sekaligus untuk mendapatkan data-2 yang lebih lengkap dalam masalah penggunaan air tanah untuk keperluan pertanian.

2. Bahwa pada dasarnya semua usaha pompa air untuk keperluan pertanian dan lain-2 ditanggung/dibebankan kepada para pemakai air.

Selama masa peralihan diatas, penyelenggaraan pompa-2 air masih diurus oleh P.2 A.T., untuk kemudian dialihkan kepada P.P.A. yang sudah harus terbentuk dan siap menerima kewajiban-kewajibannya.

3. Bertalian dengan hal-2 tersebut diatas kami sarankan supaya dapat dibentuk organisasi pengelolaan yang baik untuk memelihara kelangsungan berfungsinya pompa tersebut serta memikirkan pengikut sertaan masyarakat petani yang bersangkutan dalam pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan selanjutnya.

4. Adapun mengenai usul Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menambah sebuah pompa lagi dapat kami pertimbangkan.

Kemudian harap menjadikan perkara adanya.

Tembusan dikirimkan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Direktorat Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Direktorat Pembangunan DIY



negeri 7524

YOGYAKARTA, -- April -- 1975.

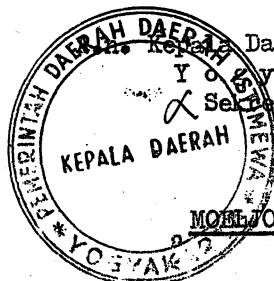
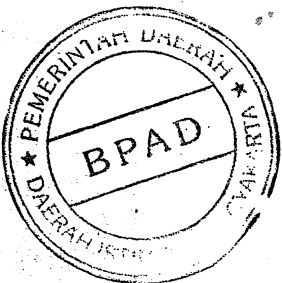
Nomor :  
Lampiran : --  
Perihal : Pemanfaatan sumur  
Pompa.

K e p a d a  
Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah  
K a b u p a t e n :  
1. B a n t u l .  
2. Gunungkidul.

Berkenaan dengan surat laporan Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul tertanggal, 19 -Juli- 1974 No. : 5775/Sekr/Bt/74 dan laporan Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 28 -Nopember- 1974 No. : Eko/134/II/C/8128/74, perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini dipermaklumkan bahwa penempatan sumur pompa dalam operasi percobaan jangka pendek oleh Departemen P.U.T.L. cq. Direktorat Jendral Pengairan baik dipedukuhan Gunung Kalurahan Plered Kecamatan Gondowulung Kabupaten Bantul maupun di Baron Kabupaten Gunungkidul untuk explorasi air tanah keperluan pertanian telah menunjukkan hasil yang memuaskan, maka dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. *1 diganti* Bahwa penempatan sumur pompa tersebut yang semula dimaksudkan hanya untuk explorasi seperti yang telah disebutkan diatas, tetapi melihat hasilnya yang baik, maka oleh Dirjen Pengairan operasi percobaan tersebut akan diteruskan guna menambah produksi Daerah yang bersangkutan. Dengan ketentuan bahwa pengelolaan dilakukan oleh Daerah dan dengan tenaga dari masing-masing Daerah yang bersangkutan, sedang biaya eksploitasi dan pemeliharaan sumur pompa tersebut selama 2 (dua) tahun ditanggung oleh Pemerintah Pusat cq. Dirjen Pengairan Departemen P.U.T.L.
2. *2 diganti* Bahwa pada dasarnya semua usaha pompa air untuk keperluan Pertanian dan lain-lain dibebankan kepada para pemakai. Khusus untuk masa peralihan maka penyelenggaraan pompa-pompa masih diurus oleh P.2 A.T. untuk kemudian apabila P.P.A. sudah terbentuk dialihkan keseluruhannya kepada sipemakai.
3. *kehapus* Bertalian dengan hal-hal tersebut diatas kami sarankan agar supaya dapat dibentuk organisasi pengelolaan yang baik untuk memelihara kelangsungan berfungsinya pompa tersebut serta memikirkan pengikut sertaan masyarakat petani yang bersangkutan dalam pembeayaan eksploitasi dan pemeliharaan selanjutnya.
4. *kehapus* Adapun mengenai usul Saudara Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menambah sebuah pompa lagi dapat kami pertimbangkan.

Kemudian harap menjadikan periksa adanya.



Moeliono Moeliadi S.H.  
Kepala Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta.  
Sekretaris Daerah,

DIREKTORAT PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.-

Ag. No. UU 1761/44/74

21-12-74  
YOGYAKARTA, 21 Desember - 1974.

NO. : 2432/Dit.Pem./574/Ds/74.

Lamp. : --

Hal : Pemanfaatan sumur Pompa.

Yth. Sri Paduka Wakil Kepala Daerah  
Daerah Istimewa  
YOGYAKARTA.

*12911*  
*x) hml*  
*x)*  
Berkenaan dengan surat laporan Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul tertanggal, 19 Juli 1974 No. *x)* 5175/Sekr/Bt/74 dan surat laporan Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 28 Nopember - 1974 No. *x)* Eko/134/II/C/8128/74, masing-masing laporan mengenai pemanfaatan sumur Pompa yang ditempatkan dipedukuhan Gunung Kalurahan Plered Kecamatan Gondowulung Kabupaten Bantul dan pemanfaatan sumur Pompa yang ditempatkan dipantai Baron Kabupaten Gunungkidul.

Sehubungan dengan hal itu, maka dengan hormat kami haturkan laporan sebagai berikut:

I. Dengan ditematkannya sumur Pompa untuk Pertanian dipedukuhan Gunung Kalurahan Plered Kecamatan Gondowulung hal ini telah memberikan manfaat bagi :

1. Disekitar pedukuhan Gunung tersebut dapat menggunakan sumur Pompa itu untuk mengairi tanah seluas 20 Ha.
2. Pada musim kemarau para petani pemilik tanah/tegal dapat menanam polowijo. Sedang penghasilan yang diperoleh para petani tersebut setelah diambil untuk pembiayaan kesutuhan mesin Pompa masih mempunyai keuntungan. menurut laporan Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul tanggal, 19 Juli 1974 keadaan sumur Pompa masih berjalan dengan baik.

II. Adapun keadaan sumur Pompa dan manfaatnya yang ditempatkan di Baron Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Sumur Pompa telah selesai dipasang pada Tahun 1973 dengan baik dan dapat menaikkan air rata-rata  $\pm$  15 liter per detik.
2. Penggunaan air dari hasil Pompa tersebut dimulai pada musim rendengan Tahun 1973/1974 dan dapat menghasilkan padi sawah jenis unggul  $\pm$  5 Ha. per hektar menghasilkan 60 Kw. Disamping itu juga menghasilkan tanaman polowijo dalam musim kemarau.
3. Sumur Pompa tersebut juga untuk keperluan air minum dan pengguyangan ternak.  
Untuk pengguyangan ternak telah dibikinkan bak guna menampung air, agar ternak-ternak tersebut tidak diguyang dipantai Baron. Dengan demikian tidak akan mengganggu kebersihan pantai.  
Pada waktu sebelum Pompa dan bangunan kolam/saluran dibangun, pengambilan air minum dan pengguyangan ternak menjadi satu dimuara sungai Baron.
4. Setelah sumur Pompa dipasang dan saluran dibangun tanah yang tadinya hanya merupakan tanah tadah hujan hanya dapat ditanami polowijo saja, sekarang ini menjadi tanah sawah yang dapat menghasilkan padi rata-rata  $\pm$  60 Kw. per hektar.
5. Untuk menjaga jangan sampai terjadi kemacetan penggunaan Pompa tersebut, olen Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul diusulkan ditambah sebuah Pompa lagi sebagai persediaan bilamana Pompa yang telah ada mengalami kerusakan.

Kemudian agar menjadikan periksa adanya.



*Surat dari Bupati*  
*No: 5775/Sekr/Bt di kirim Dit. Lem.*

*00/kl 6849/II/B/74*

*terlampir*

*26/12/74*



Kepala Direktorat Pemerintahan  
Sekretariat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta,

*R. RIO PRODIKOTODJO. L*

TEMBUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH  
GUNUNGKIDUL

Tel. 5-12-74

Wonosari, 28 November 1974.

Nomer : Eko/1349 II/C/8/28/74.

Lamp. : ---

H a l : Pemanfaatan pompa  
pantai Baron.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Biro Otonomi dan  
Desentralisasi Daerah Isti-

mewa Yogyakarta

di

YOGYAKARTA

Segera

Menunjuk surat Saudara tanggal 14 Oktober 1974  
No. 2029/Otdes/74, perihal tersebut dalam pokok surat, bersama  
ini dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Pompa telah selesai dipasang pada tahun 1973 dengan baik dan dapat menaikkan air rata-2  $\pm 15$  l/dt.
2. Penggunaan air dari hasil pompa tersebut dimulai pada musim rendengan th. 1973/74, telah menghasilkan padi sawah jenis unggul  $\pm 5$  ha  $\pm 60$  q/ha dan tanaman polowijo dalam musim kemarau.
3. Untuk keperluan air minum dan pengguyangan ternak.  
Untuk pengguyangan ternak telah dibikinkan bak untuk menampung air tersebut agar ternak-2 tadi tidak diguyang dipantai Baron, dengan demikian tidak mengganggu kebersihan pantai; dahulu sebelum pompa dan bangunan kolam/saluran dibangun, pengambilan air minum dan pengguyangan ternak menjadi satu di muara Sungai Baron.
4. Tanah yang dapat diairi dari pompa tersebut, sebelumnya merupakan tanah tadah hujan yang hanya dapat ditanami polowijo, setelah pompa dipasang dan saluran dibangun dapat menjadi tanah sawah yang dapat menghasilkan padi rata-2  $\pm 60$  kwintal/ha
5. Untuk menjaga jangan sampai terjadi kemacetan penggunaan pompa tersebut kami mengusulkan ditambah sebuah pompa lagi sebagai persediaan bilamana pompa yang telah ada mengalami kerusakan.

Kemudian agar menjadikan periksa adanya.

Tindakan kepada Yth.:

1. Sri Paduka Kepala Daerah DIY.
2. Sdr. Kepala Dinas Pengairan  
Kab. Gunungkidul.



**DIREKTORAT PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

YOGYAKARTA, 19 - Desember - 1974.

**NO. : 2432/Dit.Pem./574/Ds/74.**

**K e p a d a**

**Lamp. : ---**

**Yth. Sri Paduka Wakil Kepala Daerah  
Daerah Istimewa  
YOGYAKARTA.**

**H a l : Pemanfaatan sumur Pompa.**

Berkenaan dengan surat laporan Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul tertanggal, 19 Juli 1974 No. : 5775/Skr/Bt/74 dan surat laporan Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul tertanggal, 28 Nopember - 1974 No. : Eko/134/II/C/8128/74, masing-masing laporan mengenai pemanfaatan sumur Pompa yang ditempatkan dipemukuan Gunung Kalurahan Plered Kecamatan Gondowilung Kabupaten Bantul dan pemanfaatan sumur Pompa yang ditempatkan dipantai Baron Kabupaten Gunungkidul.

Sehubungan dengan hal itu, maka dengan hormat kami haturkan laporan sebagai berikut:

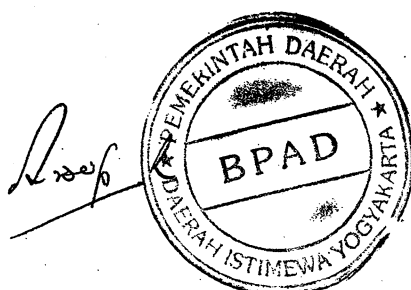
**I. Dengan ditematkannya sumur Pompa untuk Pertanian dipemukuan Gunung Kalurahan Plered Kecamatan Gondowilung hal ini telah memberikan manfaat bagi :**

1. Disekitar pemukuan Gunung tersebut dapat menggunakan sumur Pompa itu untuk mengairi tanah seluas 20 Ha.
2. Pada musim kemarau para petani pemilik tanah/tegal dapat menanam polowijo. Sedang penghasilan yang diperoleh para petani tersebut setelah diambil untuk pembiayaan kebutuhan mesin Pompa masih mempunyai keuntungan. Menurut laporan Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul tanggal, 19 Juli 1974 keadaan sumur Pompa masih berjalan dengan baik.

**II. Adapun keadaan sumur Pompa dan manfaatnya yang ditempatkan di Baron Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :**

1. Sumur Pompa telah selesai dipasang pada Tahun 1973 dengan baik dan dapat menaikan air rata-rata  $\pm$  15 liter per detik.
2. Penggunaan air dari hasil Pompa tersebut dimulai pada musim rendengan Tahun 1973/1974 dan dapat menghasilkan padi sawah jenis unggul  $\pm$  5 Ha. per hektar menghasilkan 60 Kw. Disamping itu juga menghasilkan tanaman polowijo dalam musim kemarau.
3. Sumur Pompa tersebut juga untuk keperluan air minum dan pengguyangan ternak.  
Untuk pengguyangan ternak telah dibikinkan bak guna menampung air, agar ternak-ternak tersebut tidak diguyang dipantai Baron. Dengan demikian tidak akan mengganggu kebersihan pantai.  
Pada waktu sebelum Pompa dan bangunan kolam/saluran dibangun, pengambilan air minum dan pengguyangan ternak menjadi satu dimuara sungai Baron.
4. Setelah sumur Pompa dipasang dan saluran dibangun tanah yang tadinya hanya merupakan tanah tadah hujan hanya dapat ditanami polowijo saja, sekarang ini menjadi tanah sawah yang dapat menghasilkan padi rata-rata  $\pm$  60 Kw. per hektar.
5. Untuk menjaga jangan sampai terjadi kemacetan penggunaan Pompa tersebut, oleh Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul diusulkan ditambah sebuah Pompa lagi sebagai persediaan bilamana Pompa yang telah ada mengalami kerusakan.

Kemudian agar menjadikan periksa adanya,



Kepala Direktorat Pemerintahan  
Sekretariat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta,

**RIO PRONJOATMOJO.**

2 egru  
BUPATI KEPALA DAERAH  
GUNUNGKIDUL

Ag. No. el-6792/15/10/73

Tgl. 6-2-1973

Wonosari, 31 Januari 1973.

No. : Eko/141/IV/d/779/73

Lamp. :

H a l. : Data2 daerah yang secara  
routine kekurangan pa-  
ngan secara serious dan  
rencana untuk mengatasi-  
nya.

Kepada

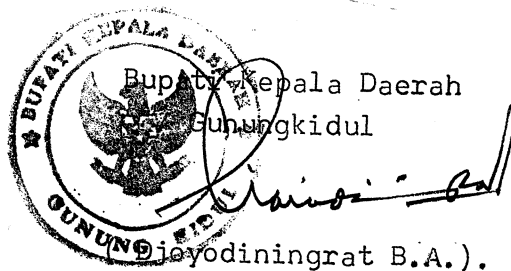
Yth. S.P.Wakil Kepala Daerah D.I.Y.  
di  
Yogyakarta.

- Mencukupi berita interlokal S.P.Wakil Kepala Daerah D.I.Y.  
tanggal 27-1-1973 No.K.194/IV/B/kwt/73 tentang data dari daerah  
yang secara routine menderita kekurangan pangan secara serious  
dan rencana Pemerintah Kabupaten untuk mengatasinya, dengan ini  
kami laporkan dengan hormat sebagai berikut :
- Tentang nama Kalurahan/Desa dan Kecamatan yang secara routine  
menderita kekurangan pangan (termasuk juga air minum) secara  
serious, kami persilahkan memeriksa daftar terlampir (lampiran  
1).
  - Mengenai laporan kerja yang dapat diberikan pada musim kemarau  
beserta tenaga yang dapat dikerahkan, kami persilahkan memerik-  
sa daftar terlampir ( lampiran 2).
  - Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi  
paceklik 1972-1973 yang telah dilaksanakan dan anggaran yang te-  
lah disediakan dalam A.B.P.D.tahun 1972-1973 adalah sebagai beri-  
kut :
    - Mengusahakan agar pengurusan Lumbung Desa dilaksanakan secara  
tertib dan teratur.  
Pada musim paceklik tahun 1972-1973 dalam seluruh lumbung desa  
hanya dapat terkumpul gaplek sejumlah bulat 1200 ton(biasanya  
sampai 3500 ton).Gaplek sebanyak 1200 ton tersebut telah dipin-  
jamkan kepada rakyat.
    - Stokpiling gaplek hasil kerja sama antara Pemerintah Daerah Ka-  
bupaten Gunungkidul B.R.I.Cabang Wonosari dan swasta nasional  
(pedagang hasil bumi)pada musim paceklik tahun 1972-1973 hanya  
dapat mencapai bulat 720 ton (biasanya 2000 ton)gaplek mana di-  
jual kepada rakyat dengan harga murah  $\pm$  40% dari harga umum pa-  
da waktu itu yaitu Rp.20,-per kg(harga umum Rp.45,-/kg.Penjual-  
an dimulai sejak bulan Desember 1972 dan selanjutnya tiap pen-  
jualan gaplek murah itu diteruskan sampai dengan bulan Maret  
1973 hingga habis.
    - Menganjurkan kepada rakyat supaya menanam tanaman cantel, tete-  
la rambat,pala kependem suweg uwi,gembili,ganyong, garut dan  
lain2nya, koro2an, benguk dll.untuk menambah volume produksi ba-  
han makan ketela yang biasanya dipanen pada bulan Agustus 1973  
( periksa lampiran 3).

4). Mengintensifkan -----

- 4). Mengintensifkan penggunaan dam dan saluran air serta sumur ladang yang telah selesai dibangun, baik pada musim penghujan maupun pada musim kemarau, untuk menambah produksi bahan pangan termasuk sayuran (brambang, kobis, lombok, tomat, kacang panjang terong dan lain2nya ).
- 5). Mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyaluran dan penggunaan pupuk U.R.E.A dan T.S.P.pada musim tanam tahun 1972-1973 dan pupuk untuk tanaman sayuran tersebut diatas.
- 6(. Karena budget Gunungkidul sangat kecil maka anggaran yang disediakan dalam A.P.B.D.1972-1973 untuk penanggulangan paceklik/bantuan biaya dropping air minum pada musim kemarau untuk daerah Tepus,Semanu Rongkop hanya Rp. 350.000,-, jauh tidak mencukupi, sehingga masih memerlukan bantuan dari D.I.Y. dan Pemerintah Pusat.Selain itu untuk bantuan penyelenggaraan transmigrasi dalam A.P.B.D.tahun 1972 - 1973 hanya dapat disediakan pos : Rp.300.000,- yang ternyata tidak cukup, sehingga terpaksa mencari bantuan dari penduduk yang mampu secara suka-rela. Jadi kesimpulan untuk menanggulangi paceklik tahun 1973/1974 perlu mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat buat :
  1. Pembelian bibit cantel, ketela rambat,pala kependem,sayuran dengan biaya angkutannya.
  2. Untuk lumbung paceklik (gaplek) tidak perlu bantuan, tinggal pertertiban sahaja.Untuk stockpiling gaplek tidak perlu bantuan, sebab sejak tahun 1958 telah bekerja sama dengan B.R.I.meliputi rata2 Rp.30.000.000,-.
  3. Untuk menambah lapangan kerja usul tambahan proyek padat karya tsb. diatas agar dikabulkan.
  4. Bantuan untuk dropping air minum, yang diperkirakan akan berlangsung selama 4 bulan, perlu bantuan Rp.1½ juta untuk beli bensin, oli dan ban 3 truk tanky air.
  5. Untuk transmigrasi perlu bantuan Rp.½ juta. .
  6. Untuk perluasan penyadapan karet rakyat perlu tambahan Rp.2 juta lagi.
  7. Peternakan perlu dapat bantuan Rp.5 juta. -
  8. Kerajinan rakyat sebagai modal dan tambahan kader Rp.1 juta. -

Demikian agar menjadikan periksa dan terserah adanya.

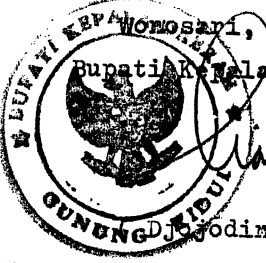


Lampiran : I.

Daftar dari adanya Desa-Desa  
yang tiap-tiap tahun mengalami penderitaan kekurangan pangan  
( air minum ) secara serius.

Kacamatan	Desa/ Kalurahan	Jumlah penduduk	Keterangan		Keterangan.
			Pangan	Air	
1. Wonosari	1. Wunung	3.500	Pangan	-	
	2. Mulo	3.000	Pangan	-	
	3. Duwet	3.455	Pangan	-	
	4. Wareng	2.530	Pangan	-	
2. Nglipar	1. Nglipar	3.999	Pangan	-	
	2. Natah	3.345	Pangan	-	
	3. Kedungkeris	3.876	Pangan	-	
	4. Kedungpoh	3.655	Pangan	-	
3. Karangmojo	1. Bendungan	3.225	Pangan	-	
	2. Ngawis	3.467	Pangan	-	
	3. Kelor	3.315	Pangan	-	
	4. Ngipak	3.205	Pangan	-	
	5. Wiladeg	3.340	Pangan	-	
4. Tepus	1. Sidoharjo	5.946	-	Air	
	2. Ngestirejo	4.451	-	Air	
	3. Banjarejo	4.856	-	Air	
	4. Tepus	4.678	-	Air	
	5. Mentel	3.562	Pangan	Air	
	6. Sumberwungu	4.878	-	Air	
5. Playen	1. Plembutan	3.565	Pangan	-	
	2. Bleberan	3.989	Pangan	-	
	3. Banaran	3.245	Pangan	-	
	4. Ngleri	3.540	Pangan	-	
	5. Ngunut	3.400	Pangan	-	
6. Patuk	1. Semoya	3.225	Pangan	-	
	2. Salam	3.115	Pangan	-	
	3. Beji	3.324	Pangan	-	
	4. Serut	3.340	Pangan	-	
7. Paliyan	1. Sodo	3.585	Pangan	-	
	2. Pampang	3.276	Pangan	-	
	3. Grogol	3.569	Pangan	-	

8. Panggang	1. Girijati	4.587	Pangan	-	
	2. Giricahyo	4.549	Pangan	-	
	3. Giriasih	4.484	Pangan	-	
	4. Girisoka	4.435	Pangan	-	
	5. Giriwungu	4.340	Pangan	-	
	6. Girisekar	4.225	Pangan	-	
9. Semanu	1. Candirejo	4.979	Pangan	Air	
	2. Dadapayu	4.957	Pangan	Air	
	3. Pacarejo	4.667	Pangan	-	
	4. Ngeposari	4.891	Pangan	-	
10. Pomjong	1. Tambakromo	3.875	Pangan	-	
	2. Kenteng	3.226	Pangan	-	
	3. Bedoyo	3.545	Pangan	-	
	4. Sidorejo	3.470	Pangan	-	
11. Semin	1. Kalitekuk	3.607	Pangan	-	
	2. Kemejing	4.000	Pangan	-	
12. Rongkop	1. Semugih	3.921	-	Air	
	2. Karangwuni	3.457	-	Air	
	3. Pringombo	3.554	-	Air	
13. Ngawen	1. Tegalrejo	3.445	Pangan	-	
	2. Tancep	3.470	Pangan	-	
	3. Sambirejo	3.995	Pangan	-	

Wonosari, 31 Januari 1973.  
 Bupati Kepala Daerah Gunungkidul,  
  
 Djodiningrat B.A. ).

Lapangan kerja yang dapat diberikan  
pada musim kemarau (menganggur) th. 1973 - 1974.

Lokasi Proyek	Jenis proyek	Volume	Jumlah tenaga yg. dapat dikerahkan	Keterangan
1. Sambipitu Nglipar - Ngawen	Rehabilitasi jalan desa dari lebar 5m - 7m	22 km.	tiap hari 1000 orang selama 3 bulan.	
2. Paliyan Sodo Wonosari	Rehabilitasi jalan desa dari lebar 5m - 7m.	7 km.	tiap hari 500 orang selama 4 bulan.	
3. a.Kal. Nglora Paliyan.	Penghijauan (terassering) dari batu digali diberi tanah untuk pertanian/ penghijauan.	10 ha.	tiap hari 500 orang selama 4 bulan.	
b.Kal. Gombang Ponjong.	Penghijauan (terassering) dari batu digali diberi tanah untuk pertanian/ penghijauan.	10 ha.	tiap hari 500 orang selama 4 bulan.	
4. Patuk	Rehabilitasi bendungan/ saluran pasangan Kebokuning.	150 ha.	3.500 orang	Impres IV/1973.
5. Karangmojo	Rehabilitasi Koperan siphon- saluran pasangan Gelaran.	110 ha.	2.000 orang	Impres IV/1973.
6. Nglipar	Saluran pasangan Kedungsalam.		250 orang	Impres IV/1973.
7. a. Wonosari b. Karangmojo c. Playen	Sumur-sumur ladang.	290 buah	5.821 orang	Impres IV/1973.
8. a. Tepus b. Wonosari c. Patuk d. Karangmojo	Penghijauan. Penghijauan Penghijauan Penghijauan	2960 ha. 2380 ha. 220 ha. 3000 m <sup>2</sup>	139.000 orang " " "	
9. Kelurahan Mulo - Baron ( 16 km )	Rehabilitasi jalan : 1.Perluasan jalan 2.Aspal tipis 3.Kepras jalan 4.Pengangkatan jalan 5.Duiker	56.000 m <sup>2</sup> 56.000 m <sup>2</sup> 500 m <sup>3</sup> 3.000 m <sup>3</sup> 20 buah	6.860 orang 4.900 orang 2.000 orang 4.800 orang 1.700 orang	
			22.200 orang	
10. Dalam kota Wonosari	1.Landasan jalan 2.Perluasan jalan 3.Aspal tipis 4.Aspal tapyt 5.Aspal sheet 6.Taluut 7.Berem 8.Duiker 9.Slokan darurat 10. Bagian Slokan:	5.498 m <sup>2</sup> 6.380 m <sup>2</sup> 6.060 m <sup>2</sup> 430 m <sup>2</sup> 2.950 m <sup>2</sup> 400 m <sup>2</sup> 860 m <sup>2</sup> 13 temp. 1.740 m <sup>2</sup>	715 orang 830 orang 530 orang 43 orang 384 orang 31 orang 860 orang 1.105 orang 3.480 orang	

	Bagian Slokan :		
	1. Beton 1 : 2½ : 5	195 m2	7.800 orang
	2. Beton 1 : 2 : 3	43 m2	1.720 orang
	3. Bongkar ps. bt.	450 m3	1.800 orang
	4. Pasang bt. kosong	360 m3	540 orang
	5. Pasang bt. belah	100 m3	510 orang
	6. Taluut	378 m2	295 orang
	7. Slokan pasangan	867 m3	6.155 orang
	8. Duiker	6 buah	510 orang
			-----
			16.308 orang.
11. Gombang-Baran	1. Pengangkatan jalan	1.940 m3	2.910 orang
	2. Keprasan batu	76 m3	304 orang
	3. Taluut	3.375 m3	2.700 orang
	4. Duiker	4 buah	340 orang
	5. Perkerasan/aspal	12.000	1.440 orang
			-----
			7.694 orang
12. Karangmojo - Ponjong.	Rehabilitasi Jembatan	1 buah	2.700 orang
	Sanggahan.		
13. Jalan Semir - Ngawen.	a. Rehabilitasi Jembatan	1 buah	1.900 orang
	b. Rehabilitasi Duiker	1 buah	) 1.900 orang
			-----

Jumlah seluruh tenaga: 50.802 orang.



Wonosari, 31 Januari 1973.

Bupati Kepala Daerah Gunungkidul,

Modiningrat B.A. ).

14/2-  
BUPATI KEPALA DAERAH  
GUNUNGKIDUL

Ag. No. 17793/E/B/73

Tgl. 14-2-1973

Nomer : Eko. 177 177/d/1045773.

Wonosari, 12 Februari 1973.

Lamp. : ---

H a l : Gudang paceklik.  
-----

Kepada  
Yth. S.P. Wakil Kepala Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
di  
YOGYAKARTA.

Mencukupi berita interlokal dari Sri Paduka Wakil  
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 8 Februari  
1973. No.37/Telegram K.B./II/1973 tentang akan datangnya  
sejumlah jagung pada pertengahan bulan Februari 1973 dan  
permulaan bulan Maret 1973 yang akan datang, dengan ini  
kami laporkan rencana gudang paceklik yang akan diperguna-  
kan untuk keperluan tersebut diatas ialah Gudang Pangan  
Siono/Wonosari dapat menampung  $\pm$  400 ton.

Kemudian menjadikan periksa adanya.



Bupati Kepala Daerah  
Gunungkidul,

*[Signature]*  
SOJODININGRAT B.A. ).

## Lampiran

### Curah Hujan dari Tahun 1955-1973

Tahun	Hari Hujan	Banyak Hujan (mm)	Bulan Basah	Bulan Kering	Bulan Lembab
1955	110	2230	11	1	0
1956	104	2235	9	1	2
1957	82	1472	6	6	6
1958	106	2136	9	1	0
1959	99	2306	8	4	0
1960	94	2337	7	4	1
1961	61	1448	5	6	1
1962	80	1994	6	5	1
1963	70	1727	5	6	1
1964	107	1274	8	3	1
1965	57	1216	5	3	2
1966	71	1489	6	5	1
1967	57	1143	5	6	1
1968	131	2847	10	1	1
1969	53	1103	6	5	1
1970	62	1848	8	7	0
1971	62	1450	7	5	0
1972	54	1286	7	5	0
1973	135	2778	9	2	1
Total	1595	34319	137	76	21
Rata-rata	83.95	1806.26	7.21	4	1.05

Sumber: Laporan Dinas Pertanian, Tahun 1955-1973

Lampiran

Luas Panen, Produksi dan Rata-rata produksi Tanaman Bahan Makanan di  
Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1974 – 1979

No	Nama	Tahun					
		1974	1975	1976	1977	1978	1979
1.	Padi Sawah	a	6.383,00	6.384,00	6.507,00	4.536,00	3.262,00
		b	26.639,00	25.147,00	20.507,68	13.153,52	12.538,72
		c	41,79	39,39	31,52	29,00	38,44
2.	Padi Ladang	a	40.020,00	43.024,00	41.870,00	35.874,00	44.920,00
		b	55.807,00	71.184,00	65.317,20	65.818,00	68.140,28
		c	13,94	16,54	15,60	18,35	15,34
3.	Jagung	a	65.034,00	39.016,00	40.316,00	21.102,00	46.591,00
		b	42.448,00	32.954,00	16.391,67	32.658,94	64.140,28
		c	6,52	8,45	8,07	15,48	13,92
4.	Cantel	a	3.771,00	1.500,00	2.845,00	9.139,00	7.559,00
		b	790,00	367,00	531,30	2.317,34	1.553,31
		c	2,09,00	5,44	2,14	2,54	2,05
5.	Ubi Kayu	a	49.290,00	49.372,00	52.091,00	46.076,00	51.806,00
		b	284.237,00	275.245,00	190.101,45	342.759,36	461.998,35
		c	42,40	55,74	36,49	74,39	89,18
6.	Ubi Jalar	a	478,00	237,00	119,00	194,00	196,00
		b	974,00	805,00	270,75	666,51	803,76
		c	30,30	33,99	23,96	34,38	89,18
7.	Kacang Tanah	a	28.952,00	244.483,00	16.663,00	17.532,00	26.963,00
		b	16.324,00	13.575,00	12.170,52	7.151,77	24.776,54
		c	5,63	5,54	7,30	4,88	9,19
8.	Kedelai	a	26.123,00	24.800,00	25.290,00	23.770,00	33.494,00
		b	14.546,00	9.337,00	12.880,27	18.147,50	24.461,50
		c	5,55	3,76	5,09	7,63	7,30

Data : Dinas Pertanian Gunungkidul

Keterangan : a. Luas Panen (Ha)

b. Produksi (Ton)

c. Rata-rata Produksi

## Lampiran

### Struktur Penguasaan Tanah di Kabupaten Gunungkidul

No.	Golongan Luas (Ha)	1968		1983	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kurang 0,25	9.878	9,73	28.045	21,27
2.	0,26 - 0,50	12.020	11,84	37.156	28,18
3.	0,51 - 0,75	21.604	21,28	23.153	17,56
4.	0,76 - 1,00	24.050	23,69	18.080	13,72
5.	1.00 ke atas	34.771	34,25	15.822	23,63

### Struktur Pemilikan Tanah di Kabupaten Gunungkidul

No.	Golongan Luas (Ha)	1968		1983	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kurang 0,25	13.760	13,79	21.149	21,97
2.	0,26 - 0,50	29.166	29,23	32.532	33,80
3.	0,51 - 0,75	19.308	19,35	19.389	20,16
4.	0,76 – 1,00	12.602	12,63	7.829	8,13
5.	1.00 ke atas	24.957	25,00	15.337	15,94

Lampiran

Penderita Honggeer Oedeem (HO) di Kabupaten Gunungkidul

Tahun. 1972-1978

No	Uraian	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
1	Stadium I	1.143	591	352	198	4.991	2.999	3.575
2	Stadium II	222	104	147	36	622	312	351
3	Stadium III	20	7	13	-	51	-	-
4	Stadium IV	2	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.387	702	512	234	5.664	3.407	4.042
	Index	100	51	37	17	408	246	291

Keterangan: Sumber dari Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Gunungkidul

TURUNAN.

BADAN PELAKSANA BIMAS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Wonosari, 22 Desember 1973.

No. : 1684/Bm/IV/1973.  
Hal : Kekurangan pupuk.

Kepada Yth.  
Ketua Badan Pembina Bimas  
D.I.Y.  
di Yogyakarta.

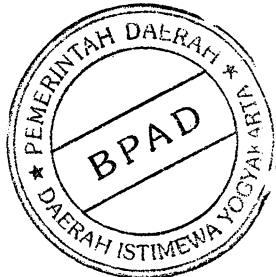
Dengan hormat.

Mengingat bahwa dalam pelaksanaan Bimas MT.73/74 di Kabupaten Gunungkidul dalam realisasi pengeluaran pupuk tahap I telah melampaui separo dari jatah yang telah ditentukan Badan Pembina Bimas D.I.Y. sehingga dalam pengeluaran tahap II terjadi kekurangan pupuk seperti apa yang telah kami laporkan pada Surat Nomer 157/BM/II/73 tanggal 7 Desember 1973, sedangkan sampai sekarang boleh dikatakan belum ada dropping pupuk lagi (kecuali dari ~~Yaya~~ Niaga dan sedikit dari Lamtoro Agung yang juga sudah kami tegor tapi ternyata belum memenuhi semua).

Maka demi suksesnya Bimas 73/74 di Kabupaten Gunungkidul kami mohon agar kekurangan pupuk ± 274 ton dapat segera direalisasi, sebab apabila dalam bulan Desember ini juga belum datang, pemupukan tahap II sudah sangat terlambat, dan kemungkinan besar pupuk tidak akan habis.

Perlu kami laporkan disini, bahwa saat ini di Gunungkidul sudah ada BUUD yang menyetop pengeluaran SPPB tahap II karena pupuknya habis. Juga kekurangan 274 ton adalah khusus untuk padi gogo, sedangkan untuk sawah belum kita perhitungkan.

Demikianlah harap menjadikan maklum dan sekali lagi kekurangan pupuk untuk Gunungkidul agar segera dapat dipenuhi.



Ketua Harian,  
Cap. t.t.d.  
M a r y o t o.

Tembusan kepada Yth.

1. Dinas Perekonomian D.I.Y.
2. Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Arsip.

Telah sesuai dan cocok dengan aslinya.  
Wang ambl turunan,  
ttd.  
Kimandoyo.



Turutan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Pemerintah D.I.Y.  
Kepala Sub Urusan Arsip,

+ Mawariyah \*

TURUNAN

~~BADAN PELAKSANA BIMAS~~  
~~KABUPATEN GUNUNGKIDUL~~

Wonosari, 22 Desember 1973.

No. : 1684/Bm/IV/1973.  
Hal : Kekurangan pupuk.

Kepada Yth.  
Ketua Badan Pembina Bimas  
D.I.Y.  
di Yogyakarta.

Dengan hormat.

Mengingat bahwa dalam pelaksanaan Bimas MT.73/74 di Kabupaten Gunungkidul dalam realisasi pengeluaran pupuk tahap I telah melampaui separo dari jatah yang telah ditentukan Badan Pembina Bimas D.I.Y sehingga dalam pengeluaran tahap II terjadi kekurangan pupuk seperti apa yang telah kami laporkan pada Surat Nomer 157/BM/II/73 tanggal 7 Desember 1973, sedangkan sampai sekarang boleh dikatakan belum ada dropping pupuk lagi (kecuali dari Jaya Niaga dan sedikit dari Lamtoro Agung yang juga sudah kami tegor tapi ternyata belum memenuhi semua ).

Maka demi suksesnya Bimas 73/74 di Kabupaten Gunungkidul kami mohon agar kekurangan pupuk  $\pm$  274 ton dapat segera direalisasikan, sebab apabila dalam bulan Desember ini juga belum datang, pemupukan tahap II sudah sangat terlambat, dan kemungkinan besar pupuk tidak akan habis.

Perlu kami laporkan disini, bahwa saat ini di Gunungkidul sudah ada BUUD yang menyetop pengeluaran SPPB tahap II karena pupuknya habis. Juga kekurangan 274 ton adalah khusus untuk padi gogo, sedangkan untuk sawah belum kita perhitungkan.

Demikianlah harap menjadikan maklum dan sekali lagi kekurangan pupuk untuk Gunungkidul agar segera dapat dipenuhi.

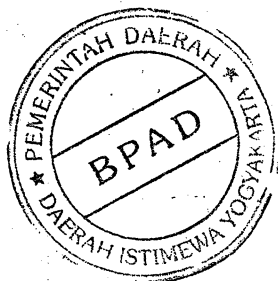
Ketua Harian,  
Cap. t.t.d.

M a r y o t o.

- Tembusan kepada Yth.
1. Dinas Perekonomian D.I.Y.
  2. Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.
  3. Arsip.

Telah sesuai dan cocok dengan aslinya.  
Yang ambil turunan,

( Kimandoyo. )



650

DINAS PERTANIAN & PERIKANAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ag. No. 41993/14/AL/74

Tgl. 18-2-1974

Yogyakarta, 16 Februari 1974.

No. : 1122/4520/1  
Hal : dropping pupuk  
ke Gunungkidul.

Kepada Yth.

S.P. Wakil Kepala Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehubungan dengan surat S.P. Wakil Kepala Daerah D.I.Y.  
tertanggal 2 Februari 1974, No. K.391/I/B/74 mengenai keku-  
rangan pupuk di Kabupaten Gunungkidul, bersama ini dapat  
kami laporkan bahwa kekurangan tsb. telah diisi oleh penyalur2  
pupuk. Pengiriman terakhir dilakukan dalam minggu pertama  
bulan Februari 1974 yang lalu oleh Pusat K.U.D. Metaram se-  
banyak Urea : 100 ton.

Sekian harap menjadikan periksa.

Dinas Pertanian & Perikanan  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Aspektur/Kepala :



Ir. Soeriano Wirosoemarto ).

*Ja 28/74*

*1/Hubang  
10/2*

*IP  
1/Hubang  
19/2*

# T U R U N A N .

Badan Pelaksana Bimas  
Kabupaten Gunungkidul.

Realisasi dropping dan pengeluaran pupuk dari B.U.U.D.  
se Kabupaten Gunungkidul s/d 28 Pebruari 1974.

No.	P e n y a i u r .	U r e a .	T.S.P.	U r e a .	T.B.P.	U r e a .	T.S.P.	S i s a S t o k .	S u s u t .
1.	Jaya Niaga.	485.846,00!	23.495,00!	485.782,00!	15.674,00!	33,00	7.821,00!	31,00	-
2.	P.N. Pertani.	162.199,00!	48.329,50!	162.138,00!	39.953,00!	21,00	8.363,50!	40,00	13,00
3.	Tamansari.	178.921,50!	13.000,00!	178.869,00!	9.640,50!	10,50	3.359,50!	42,00	-
4.	Lantoro Agung.	128.857,00!	20.000,00!	128.556,00!	16.187,00!	241,50	3.813,00!	59,50	-
5.	Cipta Niaga.	209.961,50!	33.433,00!	209.879,00!	27.161,00!	75,50	6.272,00!	7,00	-
6.	Panca Niaga.	136.997,50!	6.000,00!	136.949,50!	5.833,25!	-	164,25!	48,00	2,50
7.	Pus K.U.D.Mataram.	241.103,50!	-	189.439,50!	-	151.650,50	-	13,50	-

J u m l a h . 11543.886,00! 144.257,50! 1.491.613,00! 114.448,75! 52.032,00 ! 29.793,25! 241,00 ! 15,50

N.B. : 1.T.S.P. diatas termasuk D.A.P. ( milik Pertani.)

untuk Bimas Polowijo sebanyak + 20 ton dan sudah keluar + 15 ton.

2. Satuan dalam kg.

Wonosari 6 Maret 1974.

Ketua Harian.

ttd.

( M a r y o t o . )

Yang menurun.

( Sastrasumadiyono. )



Lampiran

Luas Panen, Produksi dan Rata-rata produksi Tanaman Bahan Makanan di  
Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1974 – 1979

No	Nama		Tahun					
			1974	1975	1976	1977	1978	1979
1.	Padi Sawah	a	6.383,00	6.384,00	6.507,00	4.536,00	4.219,00	3.262,00
		b	26.639,00	25.147,00	20.507,68	13.153,52	12.338,72	12.538,72
		c	41,79	39,39	31,52	29,00	28,37	38,44
2.	Padi Ladang	a	40.020,00	43.024,00	41.870,00	35.874,00	44.920,00	16.081,00
		b	55.807,00	71.184,00	65.317,20	65.818,00	68.140,28	14.521,14
		c	13,94	16,54	15,60	18,35	15,34	9,03
3.	Jagung	a	65.034,00	39.016,00	40.316,00	21.102,00	46.591,00	32.218,00
		b	42.448,00	32.954,00	16.391,67	32.658,94	64.140,28	27.961,55
		c	6,52	8,45	8,07	15,48	13,92	8,68
4.	Cantel	a	3.771,00	1.500,00	2.845,00	9.139,00	7.559,00	8.535,00
		b	790,00	367,00	531,30	2.317,34	1.553,31	1.761,38
		c	2,09,00	5,44	2,14	2,54	2,05	2,06
5.	Ubi Kayu	a	49.290,00	49.372,00	52.091,00	46.076,00	51.806,00	51.490,00
		b	284.237,00	275.245,00	190.101,45	342.759,36	461.998,35	439.169,33
		c	42,40	55,74	36,49	74,39	89,18	85,29
6.	Ubi Jalar	a	478,00	237,00	119,00	194,00	196,00	236,00
		b	974,00	805,00	270,75	666,51	803,76	658,07
		c	30,30	33,99	23,96	34,38	89,18	27,88
7.	Kacang Tanah	a	28.952,00	244.483,00	16.663,00	17.532,00	26.963,00	24.744,00
		b	16.324,00	13.575,00	12.170,52	7.151,77	24.776,54	18.768,24
		c	5,63	5,54	7,30	4,88	9,19	7,58
8.	Kedelai	a	26.123,00	24.800,00	25.290,00	23.770,00	33.494,00	44.795,00
		b	14.546,00	9.337,00	12.880,27	18.147,50	24.461,50	22.297,02
		c	5,55	3,76	5,09	7,63	7,30	4,97

Data : Dinas Pertanian Gunungkidul

Keterangan : a. Luas Panen (Ha)

b. Produksi (Ton)

c. Rata-rata Produksi

Lampiran

Struktur Penguasaan Tanah di Kabupaten Gunungkidul

No.	Golongan Luas (Ha)	1968		1983	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kurang 0,25	9.878	9,73	28.045	21,27
2.	0,26 - 0,50	12.020	11,84	37.156	28,18
3.	0,51 - 0,75	21.604	21,28	23.153	17,56
4.	0,76 - 1,00	24.050	23,69	18.080	13,72
5.	1.00 ke atas	34.771	34,25	15.822	23,63

Struktur Pemilikan Tanah di Kabupaten Gunungkidul

No.	Golongan Luas (Ha)	1968		1983	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kurang 0,25	13.760	13,79	21.149	21,97
2.	0,26 - 0,50	29.166	29,23	32.532	33,80
3.	0,51 - 0,75	19.308	19,35	19.389	20,16
4.	0,76 - 1,00	12.602	12,63	7.829	8,13
5.	1.00 ke atas	24.957	25,00	15.337	15,94

KEPALA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Februari 1973.

No. : K 346/II/B/122/73.  
Lamp. : 1 bendel.  
Hal : Daerah2 yang secara rutin  
setiap tahun kekurangan  
bahan makanan.

Kepada  
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri  
di

J A K A R T A

Mencukupi surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Januari 1972 No. SDx. 21/1/1 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami kirirkan satu bendel laporan mengenai :

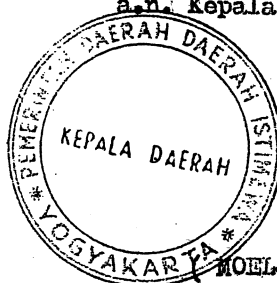
1. Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perincian Kecamatan dan Desa/Kalurahan serta jumlah penduduknya yang secara rutin setiap tahun memerlukan bantuan bahan makanan.
2. Lapangan pekerjaan yang dapat diberikan dalam musim kemarau misalnya padat karya, Inpres dlsb-nya serta usaha2 Pemerintah Daerah Tingkat II jbs. untuk mengatasinya.

Sehubungan dengan itu, dari lima Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dua Daerah Tingkat II ialah Kabupaten Bantul dan Kotamadya karena data2-nya sedang disiapkan laporannya akan kami susulkan kemudian.

Kemudian agar menjadikan maklum adanya.

a.n. Kepala Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta,

Sekretaris Daerah



(MOELJONO MOELIADI S.H. )

+ 4/542/I/B/73

**KEPALA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 10 Februari 1973.

No. :  
Lamp. : 1 bendel.  
Hal : Daerah2 yang secara rutin  
setiap tahun kekurangan  
bahan makanan.

Kepada  
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri  
di

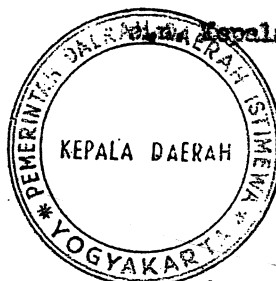
J A Y A K A R T A

Menekuni surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Januari 1972 No. SDK. 21/1/1 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami kirimkan satu bendel laporan mengenai :

1. Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perincian Kecamatan dan Desa/Kalurahan serta jumlah penduduknya yang secara rutin setiap tahun memerlukan bantuan bahan makanan.
2. Lapangan pekerjaan yang dapat diberikan dalam musim kemarau misalnya padat karya, Impres disb-nya serta usaha2 Pemerintah Daerah Tingkat II jbs. untuk mengatasinya.

Selubungan dengan itu, dari lima Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dua Daerah Tingkat II ialah Kabupaten Bantul dan Kotamadya karena data2-nya sedang disiapkan laporannya akan kami susulkan kemudian.

Kemudian agar menjadikan maklum adanya.



Kepala Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta,  
Sekretaris Daerah

( MOELJONO MOELIADI S.B. )

[illegible]

Kabupaten Gunungkidul.	Kecamatan	Kelurahan :		Proyek Ront Karyo :		Jumlah penduduk dalam daftar ini kekurangan pangan, kecuali penduduk di kecamatan Tepus di kalurahan Sidoharjo, Ngostirojo, Banjarojo, Tepus dan Sunbarwungu tidak kekurangan pangan, tetapi kekurangan air, sedang di kalurahan Montel kekurangan pangan dan air - kecuali itu di kecamatan Semanu di kalurahan Candirejo dan Dadapaya disamping kekurangan pangan juga kekurangan air. Sedang di kecamatan Rongkop tidak kekurangan pangan tetapi kekurangan air.
1. Kecamatan Wonorejo	11. Wunung	11. Wunung	3.500	1. Rehabilitasi Jalan Desa Sambipitu Nglijor - Ngawen 22 km 1000 orang sehari 20 bulan 3 bl.	1. Lumbang banyak gaplek 1200 ton telah dipinjamkan kepada rakyat.	
2. Nglijor	12. M u l o	12. M u l o	3.000	2. Idan Poliyun Sodo-Wonorejo 7 km 500 orang sehari, selam 4 bl.	2. Stockpiling gaplek hasil kerja sama dengan BRI Cabang Gunungkidul pihak swasta nasional dan Penda Gunungkidul mencapai 720 ton untuk dijual kepada rakyat dengan harga 40% dari harga umum.	
3. Duset	13. Duset	13. Duset	3.455	3. Penghijauan di Kal. Ngliore 10 km 500 orang sehari selam 4 bl.	3. Mengajukan kepada rakyat supaya menanam	
4. Waring.	14. Waring.	14. Waring.	2.530	4. Idan Kal.Gembong Pajong 10 km 500 orang sehari selam 4 bl.		
5. Nglijor	15. Nglijor	15. Nglijor	3.999	5. Rehabilitasi Koperasi Sijoni seluruh pascapan Selaran Karangarjo mangairi 110 ha dikorah kan 2.000 orang Inpres IV/73		
6. N a t a h	16. N a t a h	16. N a t a h	3.345	6. Rehabilitasi bendungan/saluran pascapan Kobekuning Patuk mangairi 150 ha dikorahkan 3.500 orang. Inpres IV/73		
7. Kodung karis.	17. Kodung karis.	17. Kodung karis.	3.876	7. Saluran pascapan kedungsulan Nglijor 250 orang. Inpres IV/73.		
8. Kodungyopoh	18. Kodungyopoh	18. Kodungyopoh	3.655	8. Pembangunan sumur2 Wonorejo Karangarjo dan Playon ladang dan 250 buah, 5821 orang Inpres IV/73.		
9. Kecamatan Karangarjo	19. Karangarjo	19. Karangarjo	3.225	9. Penghijauan di :		
10. Kecamatan Topus	20. Topus	20. Topus	3.467	a. Topus 2960 ha		
11. Kecamatan Wiladag	21. Wiladag	21. Wiladag	3.315	b. Wonorejo 2380 ha		
12. Kecamatan Sidoharjo	22. Sidoharjo	22. Sidoharjo	3.205	c. Patuk 220 ha		
13. Kecamatan Ngostirojo	23. Ngostirojo	23. Ngostirojo	3.340	d. Karangarjo 3000 m2		
14. Kecamatan Banjarojo	24. Banjarojo	24. Banjarojo	3.946			
15. Kecamatan Sunbarwungu	25. Sunbarwungu	25. Sunbarwungu	4.451			
16. Kecamatan Tepus	26. Tepus	26. Tepus	4.856			
17. Kecamatan Montol	27. Montol	27. Montol	4.678			
18. Kecamatan Sunbarwungu	28. Sunbarwungu	28. Sunbarwungu	3.562			
19. Kecamatan Playon	29. Playon	29. Playon	4.878			
20. Kecamatan Patuk	30. Patuk	30. Patuk	3.565			
			3.989			
			3.245			
			3.540			
			3.225			
			3.115			
			3.324			
			3.340			

.....

7 Paliyan	1. S o d o	3.585,--	11. Dalam Kota Wonosari :	5.498 m2 - 715 orang	Cantel, ketela rambat,
2. Pampang	2. Grogol	3.276,--	1. landasan jalan	6.380 m2 - 830 "	pala kerdem, suweg,
3. Grogol		3.569,--	2. perluasan jalan	6.060 m2 - 530 "	ubi, dll untuk menambah
8. Panggang	1. Giri Jati	4.887,--	3. aspal tipis	430 m2 - 43 "	volume produksi.
	2. Giridhoyo	4.519,--	4. aspal tapyt	2.950 m2 - 384 "	4. APBD 72/73 hanya dapat
	3. Giriasih	4.484,--	5. aspal sheet	400 m2 - 31 "	menyediakan Rp 350.000,-
	4. Girisoeka	4.435,--	6. talut	860 m2 - 860 "	untuk dropping air mi-
	5. Giriwungu	4.310,--	7. beram	13 tempat - 1.105 "	num disusui kemaru
	6. Girisekar	4.225,--	8. duiker	1.740 m2 - 3.480 "	dan untuk penyelenggara
9. Semanu	1. Candirejo	4.979,--	9. slokan darurat		an transmigrasi
	2. Dadapayu	4.957,--	Bagian Slokan :	195 m2 - 7.800 "	Rp 300.000,- Hal itu ky
	3. Pacarejo	4.667,--	1. Beton 1 : 2 1/2 : 5	43 m2 - 1.720 "	reng menukupi
	4. Ngoposari	4.891,--	2. " 1 : 2 : 3	450 m2 - 1.800 "	Mohon bantuan Peme-
10. Ponjong	1. Tambakromo	3.875,--	3. Bongkat ps. bt.	360 m2 - 540 "	rintah Pusat :
	2. Kenteng	3.226,--	4. Pasang batu kosong	100 m2 - 510 "	1. Untuk pembelian bibit:
	3. Bedoyo	3.545,--	5. Pasang batu belah	378 m2 - 295 "	cantel, ketela rambat,
	4. Sidorejo	3.470,--	6. Talut	867 m2 - 6.155 "	pala kerdem, sayuran
11. Bongkorp	1. Semugh	3.921,--	7. Slokan pasangan		dengan angkutannya.
	2. Karangwuni	3.457,--	8. Duiker 6 buah		2. Proyek padat karya
	3. Pringombo	3.554,--	12. Jalan Gombang - Baron :	1.940 m2 - 2.910 "	seperti tersebut dalam
12. Semin	1. Kaliteluk	3.607,--	1. Pengangkatan jalan	76 m2 - 304 "	daftar.
	2. Kemajing	4.000,--	2. Kerasan	3.375 m2 - 2.700 "	3. Untuk dropping air mi-
13. Ngawan	1. Tegalorejo	3.445,--	3. Talut	14.884 m2 - 1.840 "	num Rp. 1 1/2 juta.
	2. Tancep	3.470,--	4. Duiker	12.000 m2 - 1.440 "	Untuk beli bensin, oliis
	3. Samdirejo	3.995,--	5. Perkerasan/aspal		dan ban 3 truck tanki
4. Kabupaten			13. Rehabilitasi Jembatan		air.
Bantul			Sanggrahan Kawang/- Ponjong		4. Untuk penyelenggaraan
			- 1 buah dapat dikerahkan		5. Untuk penyediaan karet
5. Kotamadya Yogya			14. Rehabilitasi Jembatan Ibuhan dan dukar		6. Peternakan Rp. 5 juta.
Karta.			1 buah dikerahkan		7. Kerajinan rakyat sbg
			1 buah dikerahkan		modal dan tambahan kada
					Rp. 1 juta.
					Permintaan bantuan disem-
					ping padat karya berupa
					uang sejumlah Rp. 10 juta.

Yogyakarta, 10 Februari 1973.

An. Kepala Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta,

